



LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

J P I

















KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022" dapat selesai tepat pada waktunya. Laporan Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja serta bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan ini menyajikan capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2022 berdasarkan target kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022.

Kami berharap melalui Laporan Kinerja ini, terlihat sasaran kinerja yang telah tercapai maupun yang belum dapat dicapai, sehingga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, 20 Januari 2023

Herry Trisaputra Zuna

myst



DAFTAR ISI

KATA	PEN	GANTAR	ii
DAFT	AR IS	SI	iv
DAFT	AR G	AMBAR	V
DAFT	AR T	ABEL	viii
RING	KASA	N EKSEKUTIF	xii
BAB ²	1 PEN	IDAHULUAN	1
,	1.1	LATAR BELAKANG	1
•	1.2	TUGAS DAN FUNGSI	2
,	1.3	STRUKTUR ORGANISASI	4
•	1.4	ISU STRATEGIS	14
BAB 2	2 PER	RENCANAAN KINERJA	18
2	2.1	URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS	18
2	2.1.1	Tujuan dan Kegiatan Strategis	20
2	2.1.2	Program dan Kegiatan	23
2	2.2	PERJANJIAN KINERJA	24
2	2.3	METODE PENGUKURAN	27
2	2.4.	TARGET TAHUN 2022 BERDASARKAN RENSTRA	28
BAB :	3 KAF	PASITAS ORGANISASI	33
3	3.1	SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	33
3	3.2	SARANA DAN PRASARANA	41
3	3.3	DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	44
BAB 4	4 AK	UNTABILITAS KINERJA	47
4	4.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	47
4	4.1.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis	47
2	4.1.2	Capaian Kinerja Sasaran Program	53
2	4.1.3	Capaian Indikator Kinerja Program	57
2	4.1.4	Capaian Kineria Sasaran Kegiatan	64



98 98 a 102 107
a 102 107
107
111
119
120
122
123
124
126
126
130
132
Prakarsa
ngadaan
137
140
140
142

LAMPIRAN

Lampiran I: Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Lampiran II: Revisi DIPA Terakhir Tahun 2022

Lampiran III: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2022

Lampiran IV: Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP DJPI TA. 2021



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
	Pekerjaan Umum dan Perumahan5
Gambar 2.1	Perjanjian Kinerja Awal Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
	Pekerjaan Umum dan Perumahan25
Gambar 2.2	Perjanjian Kinerja Revisi Pertama Direktur Jenderal Pembiayaan
	Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan26
Gambar 2.3	Perjanjian Kinerja Revisi Kedua Direktur Jenderal Pembiayaan
	Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan26
Gambar 3.1	Persentase Jumlah Pegawai DJPI Tahun 2022 34
Gambar 3.2	Persentase PNS Per Golongan35
Gambar 3.3	Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Gambar 3.4	Persentase Pegawai Berdasarkan Usia
Gambar 3.5	Hubungan Empat Perspektif Balanced Scorecard
Gambar 3.6	SKP Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
	dan Perumahan39
Gambar 3.7	SKP Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
	dan Perumahan39
Gambar 3.8	Pelatihan/Workshop DJPI Tahun 202240
Gambar 4.1	Struktur Program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
	Pekerjaan Umum dan Perumahan55
Gambar 4.2	Akad Massal Serentak KPR Bersubsidi 58
Gambar 4.3	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal
	Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 71
Gambar 4.4	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pengembangan
	Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 74
Gambar 4.5	Jumlah Proyek KPBU Sektor SDA76
Gambar 4.6	Grafik Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor SDA (Solicited) 77
Gambar 4.7	Grafik Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor SDA (Unsolicited). 78
Gambar 4.8	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Direktorat PPISDA 79
Gambar 4.9	Jumlah Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan 81



Gambar 4.10	Grafik Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatar	1
	(Solicited)	82
Gambar 4.11	Grafik Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	า
	(Unsolicited)	83
Gambar 4.12	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan	
	Pembiayaan Infrastuktur Jalan dan Jembatan	85
Gambar 4.13	Jumlah Proyek KPBU Sektor Perumahan	87
Gambar 4.14	Grafik Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Perumahan	
	(Solicited)	88
Gambar 4.15	Grafik Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Perumahan	
	(Unsolicited)	89
Gambar 4.16	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan	
	Pembiayaan Perumahan	91
Gambar 4.17	Jumlah Proyek KPBU Sektor Permukiman	92
Gambar 4.18	Grafik Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Permukiman	
	(Solicited)	94
Gambar 4.19	Grafik Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Permukiman	
	(Unsolicited)	95
Gambar 4.20	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan	
	Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	96
Gambar 4.21	Grafik Perbandingan Capaian Proyek KPBU Tiap Sektor dengan	
	Target Renstra	111
Gambar 4.22	Deklarasi Bersama Pengendalian Gratifikasi	130
Gambar 4.23	Pakta Integritas	130
Gambar 4.24	Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Direktur	
	Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	131
Gambar 4.25	Dokumentasi Pelaksanaan Pencanangan	
	Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Pelaksana	aan
	Pembiayaan Perumahan	132
Gambar 4.26	Dokumentasi Pelaksanaan Press Conference Road to CreatIFF	
	2022	135
Gambar 4.27	Penyerahan Hadiah Pemenang Call for Policy Brief CreatIFF	
	2022	135



Gambar 4.28	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Webinar Series CreatIFF			
	2022	136		
Gambar 4.29	Dokumentasi Pelaksanaan Hari Puncak CreatIFF 2022	137		
Gambar 4.30	Soft Launching SIPADU dan SIPRABU	138		
Gambar 4.31	Tampilan Website SIPRABU	139		
Gambar 4.31	Tampilan Website SIPADU	139		



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan	
	Umum dan Perumahan Tahun 2022	29
Tabel 2.2	Target Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur	
	Pekerjaan Umum dan Perumahan	30
Tabel 2.3	Target Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi	
	Penyelenggaraan Pembiayaan	30
Tabel 2.4	Target Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber	
	Daya Air	31
Tabel 2.5	Target Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dar	1
	Jembatan	31
Tabel 2.6	Target Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur	
	Permukiman	31
Tabel 2.7	Target Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	32
Tabel 3.1	Jumlah Pegawai Per Unit Kerja Eselon II	34
Tabel 3.2	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	35
Tabel 3.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Tabel 3.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	36
Tabel 3.5	Pelatihan/Workshop DJPI Tahun 2022	38
Tabel 3.6	Daftar Sarana dan Prasarana di DJPI	43
Tabel 4.1	Capaian Sasaran Strategis	48
Tabel 4.2	Hasil Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan d	an
	Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Um	num
	dan Perumahan	51
Tabel 4.3	Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBU	52
Tabel 4.4	Capaian Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Pembiayaa	n
	Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	56
Tabel 4.5	Realisasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	
	Tahun 2022	59



Tabel 4.6	Hasil Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem,	
	Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur	
	Pekerjaan Umum dan Perumahan	62
Tabel 4.7	Capaian Sasaran Kegiatan DJPI	64
Tabel 4.8	Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan	
	Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	68
Tabel 4.9	Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi	
	Penyelenggaraan Pembiayaan	72
Tabel 4.10	Proyek KPBU Sektor SDA yang Siap Dikerjasamakan	75
Tabel 4.11	Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan	
	Infrastruktur SDA	75
Tabel 4.12	Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor SDA (Solicited)	76
Tabel 4.13	Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor SDA (Unsolicited)	77
Tabel 4.14	Isu Strategis pada Proyek KPBU Sektor SDA	78
Tabel 4.15	Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan yang Siap	
	Dikerjasamakan	80
Tabel 4.16	Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastuktur Ja	lan
	dan Jembatan	80
Tabel 4.17	Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	
	(Solicited)	81
Tabel 4.18	Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	
	(Unsolicited)	83
Tabel 4.19	Isu Strategis pada Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	84
Tabel 4.20	Proyek KPBU Sektor Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	86
Tabel 4.21	Realisasi Bantuan Pembiayaan Perumahan	86
Tabel 4.22	Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	87
Tabel 4.23	Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Perumahan (Solicited)	88
Tabel 4.24	Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Perumahan (Unsolicited)	89
Tabel 4.25	Isu Strategis Proyek KPBU Sektor Perumahan	90
Tabel 4.26	Isu Strategis Bidang Pembiayaan Perumahan	90
Tabel 4.27	Proyek KPBU Sektor Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	92
Tabel 4.28	Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur	
	Permukiman	92



Tabel 4.29	Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Permukiman (Solicited) 93
Tabel 4.30	Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Permukiman (<i>Unsolicited</i>) 94
Tabel 4.31	Isu Strategis pada Proyek KPBU Sektor Permukiman
Tabel 4.32	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target DJPI 98
Tabel 4.33	Capaian Proyek KPBU yang Siap Dikerjasamakan 100
Tabel 4.34	Realisasi Anggaran BA. 033 DJPI Tahun 2022 101
Tabel 4.35	Realisasi Anggaran BA. 999.07 DJPI Tahun 2022 101
Tabel 4.36	Realisasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2022 102
Tabel 4.37	Perbandingan Capaian IKSS dan IKSP DJPI Tahun 2022 103
Tabel 4.38	Perbandingan Capaian Proyek KPBU yang Siap Dikerjasamakan
	Tahun 2021 dengan Tahun 2022 104
Tabel 4.39	Perbandingan Capaian Bantuan Pembiayaan Perumahan
	Tahun 2021 dengan Tahun 2022 105
Tabel 4.40	Perbandingan Realisasi Anggaran BA. 033 Tahun 2021 dengan
	Tahun 2022
Tabel 4.41	Perbandingan Realisasi Anggaran BA.999.07 Tahun 2021 dengan
	Tahun 2022
Tabel 4.42	Perbandingan Capaian Kinerja IKSS dan IKSP terhadap Renstra
	2020-2024
Tabel 4.43	Perbandingan Capaian Penyaluran Bantuan Pembiayaan
	Perumahan dengan Target Renstra 2020-2024 110
Tabel 4.44	Perbandingan Capaian Proyek KPBU yang Siap Dikerjasamakan
	dengan Target Renstra 2020-2024 110
Tabel 4.45	Perbandingan Kinerja Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan
	Target Kegiatan Prioritas RPJMN 2020-2024 112
Tabel 4.46	Perbandingan Kinerja Bantuan Pembiayaan Perumahan terhadap
	Target Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024
Tabel 4.47	Penjelasan Proyek Waduk Multiguna yang Tercantum dalam RPJMN
	2020-2024
Tabel 4.48	Target Proyek KPBU IKN sektor Perumahan yang Mendukung Major
	Project RPJMN: Ibu Kota Negara (IKN)
Tabel 4.49	Proyek KPBU SPAM yang Mendukung Major Project RPJMN:
	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)



Tabel 4.50	Proyek KPBU Jalan Tol yang Mendukung Major Project RPJMN:		
	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	118	
Tabel 4.51	Proyek KPBU Rumah Susun yang Mendukung Major Project		
	RPJMN: Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	118	
Tabel 4.52	Perbandingan Kinerja KPBU antara DJPI dan DJPPR	119	
Tabel 4.53	Realisasi Per Kegiatan	121	
Tabel 4.54	Hasil Penilaian SPIP	128	



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024 telah dijabarkan bahwa Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berkontribusi untuk mendukung capaian Sasaran Strategis Kementerian PUPR pada SS-3 dan SS-5, yaitu:

- Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja: Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
- Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja: Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;

Terbentuknya Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan bertujuan untuk menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua". Dalam mencapai kedua indikator kinerja program di atas, pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menggunakan 2 (dua) mata anggaran, yaitu BA.033 dan BA. 999 dengan rincian sebagai berikut:

- Pagu BA.033 adalah sebesar Rp792.617.174.000;
- Pagu BA.999.07 adalah sebesar Rp3.517.707.935.000 yang dialokasikan untuk penyaluran Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp2.584.031.935.000 dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp933.676.000.000.



Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Realisasi BA.033 sebesar Rp675.074.386.000 atau 85,17%;
- Total realisasi BA.999.07 adalah sebesar Rp3.500.601.611.769 atau 99,51% yang terdiri atas realisasi SBUM sebesar Rp929.980.000.000 atau 99,60% untuk menyalurkan 225.987 rumah tangga, dan anggaran SSB yang digunakan untuk pembayaran penerbitan KPR tahun sebelumnya sebesar Rp2.570.621.611.769 atau 99,48%.

Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	BANTUAN PEMBIAYAAN	PAGU	TARGET	REALISASI	
NO	PERUMAHAN	ANGGARAN	UNIT	KEUANGAN	UNIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	23.000.000.000.000	200.000	25.150.724.329.163	226.000
2	Subsidi Selisih Bunga (SSA/SSB) *	2.584.031.935.000	769.903	2.570.621.611.769	757.087
3	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)**	933.676.000.000	200.000	929.980.000.000	225.987
4	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)	546.970.000.000	13.672	460.903.053.015	11.886
5	SMF	-	10.000	-	65.263
6	Tapera	-	100.000	-	4.534
TOTAL		27.064.677.935.000	323.672	29.112.228.993.947	307.683

Keterangan: *) Subsidi Selisih Bunga untuk pembayaran penerbitan KPR tahun sebelumnya

^{**)} Realisasi Unit SBUM tidak dimasukkan ke penjumlahan



Capaian kinerja paket pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang adalah sebagai berikut:

		TAR	TARGET TA. 2022		REALISASI			
NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1.	Sumber Daya Air	2	1.203.486.000.000	5	Bendungan Bodri Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW – NTB Daerah Irigasi Komering Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok – NTB PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji – Sumatera Selatan	7.113.956.483.000		
2.	Jalan dan Jembatan	10	187.315.000.000.000	10	1. Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena (Segmen Mamberamo – Elelim 2. Jalan Akses Exit Toll 3. Jalan Tol Cilacap – Yogyakarta 4. Jalan Tol Demak – Tuban 5. Jalan Tol Ngawi – Babat 6. Jalan Tol Jember – Lumajang 7. Jalan Tol Jember – Situbondo 8. Jalan Tol Tulungagung – Kepanjen 9. Jembatan Tanah Bumbu – Pulau Laut 10. Jembatan Muna – Buton	181.173.460.000.000		
3.	Perumahan	2	1.800.000.000.000	2	KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung KPBU Rumah Susun Karawang Spuur	1.240.050.000.000		
4.	Permukiman	4	5.570.000.000.000	2	Pendampingan Transaksi SPAM Hilir DKI Jakarta (BtoB) Pendampingan SPAM Rajeg – Kabupaten Tangerang (BtoB)	30.690.000.000.000		
	TOTAL	18	195.888.486.000.000	19		220.217.466.483.000		



Pada TA. 2022, berdasarkan hasil analisis akuntabilitas kinerja, dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2022 berhasil mencapai target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif dengan capaian 107,57%, dan pada Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif dengan capaian 102,37%. Pada Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dengan capaian pada Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 95,06%. Pencapaian kinerja pada IKSP ini berasal dari kinerja KPR FLPP, BP2BT, SMF, dan Tapera.

BAB 1 PENDAHULUAN



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) bertanggung jawab menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentana Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kineria Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan wajib menyusun rencana strategis, perjanjian kinerja, rencana aksi, laporan monev, dan laporan kinerja yang merupakan bagian dari komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2022, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–



2024 serta menjalankan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebagai bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja maka, perlu untuk menyusun laporan kinerja tahun 2022. Laporan kinerja ini disusun dan dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal Kementerian **PUPR** sebagai koordinator penyusunan Laporan Kinerja di internal Kementerian PUPR, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai koordinator penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan instansi pemerintah.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) adalah unit organisasi yang melaksanakan program pengembangan pendanaan dan sistem pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020 – 2024. Selain itu, DJPI juga ditetapkan sebagai Simpul KPBU di Kementerian PUPR berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 641/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Simpul KPBU di Kementerian PUPR.



A. Kedudukan

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta dipimpin oleh Direktur Jenderal.

B. Tugas

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- 3. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- 4. Penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;



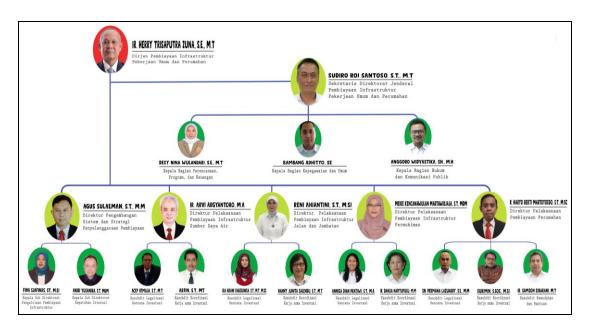
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- 7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- 9. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
- 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki 6 Unit Kerja Eselon II, yaitu:

- Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- 2. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan;
- 3. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
- 4. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
- 5. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman; dan
- 6. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.





Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Pada tanggal 31 Oktober 2021, Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan telah menutup penyaluran FLPP. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari BLU PPDPP kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan secara resmi diundangkan pada tanggal 5 September 2022. Dengan terbitnya Peraturan tersebut, maka PPDPP resmi dibubarkan. Masing-masing Unit Kerja di DJPI memilki tugas dan fungsi yang menunjang pencapaian kinerja dari DJPI. Tugas dan fungsi tersebut diuraikan sebagai berikut:



1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Tugas : Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal

Fungsi : - Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

- Pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;
- Pelaksanaan penatausahaan BMN;
- Pengelolaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- Pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional;
- Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- Koordinasi penyusunan peraturan perundangundangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- Pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan



 Pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan didukung oleh 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan;
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.

2. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

- Fungsi : Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
 - Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;



- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- Koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- Pengelolaan data dan informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- Pelaksanaan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;
- Pembinaan jabatan fungsional di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan



umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan

 Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan didukung oleh 2 (dua) Sub Direktorat dan 1 (satu) Bagian, yaitu:

- a. Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur;
- b. Sub Direktorat Kepatuhan Intern; dan
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Fungsi : - Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;



- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air didukung oleh 2 (dua) Sub Direktorat dan 1 (satu) Bagian, yaitu:

- a. Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi;
- b. Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

4. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Fungsi : - Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;

- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembata;
- Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;



- Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan didukung oleh 2 (dua) Sub Direktorat dan 1 (satu) Bagian, yaitu:

- a. Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi;
- b. Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

5. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Fungsi : - Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;



- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukima;
- Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman didukung oleh 2 (dua) Sub Direktorat dan 1 (satu) Bagian, yaitu:

- a. Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi;
- b. Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- c. Sub Bagian Tata Usaha.



6. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan

infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan

pembiayaan perumahan.

Fungsi : - Penyiapan perumusan kebijakan di bidang

pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan,

kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;

- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan

pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan

dan bantuan pembiayaan perumahan;

- Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan

pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan

dan bantuan pembiayaan perumahan;

- Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan

skema pembiayaan di bidang pelaksanaan

pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan

dan bantuan pembiayaan perumahan;

- Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan

badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan

infrastruktur perumahan;

- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan

infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan

pembiayaan perumahan;

- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan,

kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur

perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan

perumahan; dan



 Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan didukung oleh 3 (tiga) Sub Direktorat dan 1 (satu) Bagian, yaitu:

- a. Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi;
- b. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi;
- c. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi;
- d. Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan;
 dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

1.4 ISU STRATEGIS

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai institusi yang mengemban amanah penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Indonesia, telah melakukan berbagai upaya dan strategi percepatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Selama periode 2015-2019, capaian pembangunan infastruktur Kementerian PUPR di masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

Sumber Daya Air, yaitu meliputi pembangunan dan rehabilitas/peningkatan bendung/waduk/embung /bangunan penampung air lainya serta restorasi sungai, revitalisasi danau dan konservasi rawa. Capaian dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2019 meliputi: bendungan/waduk yang telah terbangun sebanyak 61 buah, terdiri dari 16 bendungan lanjutan periode sebelumnya dan 45 bendungan baru, embung yang telah terbangun sebanyak 1.212 buah, 1.005.402 Ha jaringan irigasi baru telah terbangun, rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 3.021.105 Ha, pembangunan air baku sebanyak 30,70 m³/detik, pembangunan/rehabilitasi pengendali sedimen dan lahar



sebanyak 330 buah dan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali daya rusak air sebanyak 1.485 km.

Jalan dan Jembatan, yaitu capaian 2015-2019 untuk pembangunan jalan dan jembatan baru dengan panjang masing-masing 3.867km dan 58.346m. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah membangun jalan bebas hambatan sepanjang 1.500km.

Perumahan, meliputi pembangunan rumah susun sebanyak 48.792 unit, rumah khusus 23.960 unit, rumah swadaya sebanyak 735.856 unit dan bantuan PSU Perumahan 119.612 unit. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2015-2019 sebanyak mencapai 1.014.825 unit (FLPP, SSB dan BP2BT) dan SBUM sejumlah 707,212 unit.

Permukiman, yaitu pembangunan SPAM sebanyak 21.499,5 lt/detik di tahun 2015-2018 dan akan bertambah sebanyak 3.173 lt/detik di tahun 2019. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah melakukan penanganan kawasan kumuh sebanyak 23.407 Ha di tahun 2015-2018 dan akan bertambah sebanyak 8.815 Ha di tahun 2019.

Adapun untuk rencana pembangunan infrastruktur di periode 2020-2024, sesuai Visium Kementerian PUPR 2030, memproyeksikan kebutuhan investasi untuk mendanai kebutuhan infrastruktur selama lima tahun adalah sebanyak Rp 2.058 Triliun. Sesuai dengan tren ketersediaan APBN, kebutuhan pendanaan tersebut diproyeksikan tidak dapat didanai seluruhnya oleh anggaran Pemerintah dan diperkirakan hanya mampu untuk mendanai sebesar 30% dari total kebutuhan anggaran infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan atau sebesar Rp 623 Triliun. Sehingga terdapat *gap funding* untuk penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama lima tahun kedepan.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan sebuah kebutuhan mendesak, oleh karenanya Pemerintah perlu mengambil langkahlangkah yang komprehensif untuk memenuhi *gap funding* yang ada.



Salah satu strategi yang telah dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah melakukan penguatan dan revitalisasi organisasi di lingkungan Kementerian PUPR serta membentuk Unit Organisasi yang secara khusus menangani pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yaitu Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Amanat untuk penyelenggara pembiayaan infrastruktur dengan sumber dana non konvensional, khususnya Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) mengingat besarnya gap funding penyediaan infrastruktur yang ada.

Isu strategis lainnya yang dihadapi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yaitu: (1) Perencanaan penyediaan infrastruktur pekerjaan dan perumahan masih belum mengakomodasi pendanaan di luar skema Non APBN; (2) Belum adanya kriteria proyek KPBU untuk semua sektor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan; (3) Belum efektifnya kelembagaan simpul KPBU dalam mendukung pelaksanaan KPBU; (4) Keterbatasan dokumen KPBU yang memadai sehingga mempengaruhi kualitas proyek KPBU; (5) Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama; (6) Dukungan kelayakan proyek dan penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh proyek KPBU; (7) Proyek KPBU mayoritas diikuti dan dilaksanakan oleh BUMN; (8) Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai PJPK; (9) Ketersediaan lahan yang *clear* dan *clean* untu proyek KPBU, serta (10) Isu-isu strategis yang terkait dengan sektor pembiayaan perumahan yang merupakan domain Unit Organisasi sebelumnya.

Meskipun dihadapkan pada tantangan pembiayaan infrastruktur yang tidak mudah, namun Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur



Pekerjaan Umum dan Perumahan tetap merasa optimis dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya. Hal ini dikarenakan potensi pembiayaan KPBU yang sangat besar. Sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR, jenis proyek yang dapat menggunakan skema KPBU adalah sebagai berikut: (1) Jalan dan Jembatan, meliputi Jalan Tol, Jalan Nasional dan Jembatan; (2) Sumber Daya Air, meliputi waduk/bendungan, bendung, saluran pembawa air baku dan jaringan Irigasi; (3) Infrastruktur Permukiman, meliputi infrastruktur air minum, sistem pengelolaan air limbah domestik dan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; serta (4) Perumahan, meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara yang pemanfaatannya dengan cara sewa.

BAB 2 PERENCANAN KINERJA



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, arah pembangunan 2020 – 2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar RPJMN tahun 2020 – 2024 yaitu:

- 1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
- 2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
- 3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan
- 4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Dalam rangka menindaklanjuti arah pembangunan RPJMN tersebut di atas, arah kebijakan Kementerian PUPR bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah peningkatan peran dan kontribusi BUMN, BUMD, dunia usaha dan swasta serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan sistem dan alternatif pembiayaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang efisien, produktif dan berkelanjutan, dengan strategi sebagai berikut:

- 1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk percepatan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- 2. Peningkatan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;



 Pengembangan skema dan percepatan proses pelaksanaan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

Sedanngkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

- Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan:
- Peningkatan keterpaduan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS);
- Penataan dan peningkatan peran Simpul KPBU dalam pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
- Peningkatan kontribusi dan manfaat pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam rangka mendukung pencapian Visium PUPR 2020-2024;
- 5. Percepatan proses perencanaan dan penyiapan KPBU;
- 6. Percepatan proses pengadaan KPBU;
- 7. Pengembangan skema pembiayaan KPBU;
- Membentuk unit pelaksana teknis/ memanfaatkan unit kerja eksisting yang berfungsi sebagai paying agent serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- Pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel;
- Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya;



- 11. Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan;
- 12. Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi dan pemberian pinjaman (*refinancing*);
- 13. Percepatan operasionalisasi BP Tapera; dan
- 14. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaanpembiayaan perumahan, melalui: sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

2.1.1 Tujuan dan Kegiatan Strategis

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan beberapa tujuan yang harus dicapai pada tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

- Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
- 2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
- Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.



 Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

- Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
 - b. Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
 - c. Kapasitas tampung per kapita;
 - d. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
- 2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
- 3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
 - b. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.
- 4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
 - b. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.



- Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
 - a. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
 - b. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur
 Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem,
 kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
 - Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
 - d. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
 - e. Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
 - f. Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Berdasarkan kelima Sasaran Strategis Kementerian PUPR, DJPI mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR pada SS-3 dan SS-5, yaitu:

- 1. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.
- 2. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.



Berdasarkan potensi, permasalahan, tantangan lingkungan strategis kedepan, dan keterkaitan dengan Sasaran Strategis Kementerian PUPR, DJPI menetapkan tujuan Unit Organisasi Tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut:

- Peningkatan dan Percepatan Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui pembiayaan kreatif dan inovatif; dan
- 2. Peningkatan Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui bantuan dan fasilitasi pembiayaan perumahan.

2.1.2 Program dan Kegiatan

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung 2 (dua) program yaitu:

- Program Dukungan Manajemen yang terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:
 - a. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR; dan
 - b. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yag efisien dan efektif
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 1 (satu)
 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:
 - a. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan
 Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan
 Perumahan



IKSP di atas akan diturunkan menjadi beberapa kegiatan untuk mencapai target yang ditetapkan. Adapun kegiatan pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu:

- Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- 2. Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- 3. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
- 4. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
- 5. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
- 6. Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan; dan
- 7. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

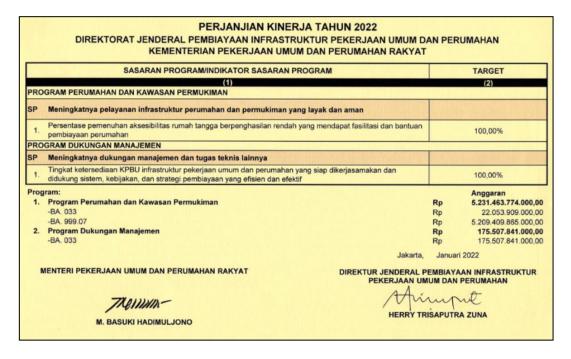
Selama periode tahun 2022, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyusun 3 Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang disebabkan karena adanya perubahan anggaran.

- Perjanjian Kinerja awal antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditandatangani oleh pada bulan Januari 2022.
- Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditandatangani pada bulan September 2022. Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 ini dilakukan karena



- terdapat penambahan anggaran PHLN untuk penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
- 3. Perjanjian Kinerja Revisi ke-2 antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditandatangani pada bulan Desember 2022. Perjanjian Kinerja Revisi ke-2 ini dilakukan karena terdapat realokasi anggaran TA. 2022 yang terblokir Automatic Adjusment ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp10,2 Miliar.

Berikut Perjanjian Kinerja awal serta revisi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021.



Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Awal Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REVISI						
	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM TARGET						
	(1)		(2)				
PRO	GRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SP	Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman		经 对位据是存在。				
1.	Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan		100,00%				
PRO	GRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SP	Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		SCHOOL STREET,				
1.	Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif		100,00%				
Prog 1.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman -8A. 303 -8A. 999.07 Program Dukungan Manajemen	Rp Rp Rp Rp	Anggaran 5.776.663.774.000,00 567.253.909.000,00 5.209.409.865.000,00 247.765.885.000,00				
	-BA. 033	Rp	247.765.885.000,00				
	Jakarta, 30) Septem	ber 2022				
N	MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN						
	TROMMAN	ning	ut				
	M. BASUKI HADIMULJONO HERRY TR	. 1					

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Revisi Pertama Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

PERJAN	NJIAN KINERJA TAHUN 2022	REVISI			
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT					
SASARAN PROGRAM/INDIKAT	OR SASARAN PROGRAM	TARGET			
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		(2)			
SP Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dar	n permukiman yang layak dan aman				
Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpe pembiayaan perumahan	enghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan	100,00%			
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
SP Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis					
Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien d	dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung lan efektif	100,00%			
Program:		Anggaran			
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	4.082.440.801.000,00			
-BA. 033 -BA. 999.07	Rp	564.732.866.000,00			
2. Program Dukungan Manajemen	Rp	3.517.707.935.000,00			
-BA. 033	Rp Rp	227.884.308.000,00 227.884.308.000.00			
	Jakarta,30 Desemb				
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN					
Transa-	Amy	nt			
M. BASUKI HADIMULJONO	HERRY TRISAPUTR	A ZUNA			

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Revisi Kedua Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



2.3 METODE PENGUKURAN

Metode pengukuran digunakan untuk menghitung capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

A. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif dihitung dengan menjumlahkan indikator kontributor 1 dan 2 dengan pembobotan (%) sebagai berikut:

1. Indikator 1 (30%)

Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan dibandingkan dengan target.

2. Indikator 2 (70%)

Nilai investasi/pembiayaan KPBU yang dihasilkan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA,Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan) dibandingkan dengan target.

B. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif dihitung dengan menjumlahkan indikator kontributor 1 dan 2 dengan pembobotan (%) sebagai berikut:



1. Indikator 1 (30%)

Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target.

2. Indikator 2 (70%)

Jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan)

C. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program di atas dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dan fasilitasi pembiayaan perumahan (FLPP, BP2BT, SMF dan TAPERA) dibandingkan dengan target.

2.4 TARGET TAHUN 2022 BERDASARKAN RENSTRA

Target Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ditetapkan pada Rencana Strategis tahun 2020-2024. Adapun target yang harus dicapai pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1



Tabel 2.1 Target Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022

	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM				
	(1)	(2)			
PRO	GRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	ARAN STRATEGIS: Meningkatnya penyediaan akses perumahan struktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	dan			
IKSS	: Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	58,02%			
SP	Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permuk layak dan aman	iman yang			
1.	Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	100,00%			
PRO	GRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
	ARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementeri augas teknis lainnya	an PUPR			
peke	IKSS: Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif				
SP	Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				
1.	Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00%			

Sumber: Renstra DJPI 2020-2024

Pencapaian terhadap target sebagaimana pada Tabel 2.1 didukung oleh kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Target pencapaian indikator kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah target setiap Unit Kerja Eselon II yang ada di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.



Adapun target pencapaian indikator kinerja kegiatan masing-masing Unit Eselon II adalah sebagai berikut

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Tabel 2.2 Target Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%

Sumber: Renstra DJPI 2020-2024

b. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Tabel 2.3 Target Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100%

Sumber: Renstra DJPI 2020-2024



c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Tabel 2.4 Target Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25%

Sumber Data: Renstra DJPI 2020-2024

d. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Tabel 2.5 Target Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur

Jalan dan Jembatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25%

Sumber Data: Renstra DJPI 2020-2024

e. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Tabel 2.6 Target Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan	25%
	Infrastruktur Permukiman	

Sumber: Renstra DJPI 2020-2024



f. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Tabel 2.7 Target Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%

Sumber: Renstra DJPI 2020-2024

BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI



BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor terpenting dan utama dalam proses pencapaian kinerja organisasi. Peranan strategis SDM menentukan arah tata pengelolaan instansi pemerintahan yang baik dan berkualitas. Hal ini dijelaskan dalam Permen PUPR Nomor 896/KPTS/M/2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2020-2024. Adapun pelaksanaan internalisasi *core value* Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAkhlak di lingkungan Kementerian PUPR, bertujuan sebagai bentuk penguatan peran SDM yang unggul dan mampu menujang terlaksananya penguatan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam upaya pembangunan suatu organisasi yang berkesinambungan, Sumber Daya Manusia mempunyai peran yang sangat vital dalam proses pencapaian tujuan. Untuk kepentingan tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkelanjutan.

Dalam kerangka organisasi terdapat hubungan antara kinerja perorangan dengan kinerja organisasi. Suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus melalui kegiatan-kegiatan yang digerakkan oleh sekelompok orang yang aktif berperan sebagai pelaku, dengan kata lain tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena adanya upaya yang dilakukan oleh orang dalam atau aparatur organisasi tersebut.

Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berjumlah 420 orang pegawai yang terdiri dari 218 PNS, 97 honorer dan 105 Tenaga Pendukung Individu



(TPI). Rekapitulasi SDM Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

A. SDM Per Unit Kerja Eselon II

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) terdiri dari 6 Unit Kerja Eselon II. Total pegawai DJPI tahun 2022 adalah sebanyak 420 orang pegawai yang tersebar kedalam 6 Unit Kerja Eselon II dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Per Unit Kerja Eselon II

No	Unit Korio	PNS	Non P	NS	Jumlah
NO	Unit Kerja	FNO	Honorer	TPI	Juillian
1	Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	58	55	20	133
2	Dit. Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	31	9	21	61
3	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	26	8	9	43
4	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	32	8	13	53
5	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	41	8	28	77
6	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	30	9	14	53
	TOTAL	218	97	105	420

Sumber: Surat Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Nomor: KP 06 01-Ps.2/96



Gambar 3.1 Persentase Jumlah Pegawai DJPI Tahun 2022

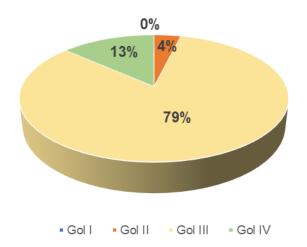


B. SDM Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, persentase PNS di DJPI yang paling banyak adalah PNS Golongan III sebanyak 172 orang atau sebesar 79%, Golongan IV sebanyak 38 orang atau sebesar 17%, dan Golongan II sebanyak 8 orang atau sebesar 4%, dan tidak ada PNS untuk Golongan I. Rincian jumlah PNS berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	0
2	Golongan II	8
3	Golongan III	172
4	Golongan IV	38
	TOTAL	218



Gambar 3.2 Persentase PNS Per Golongan

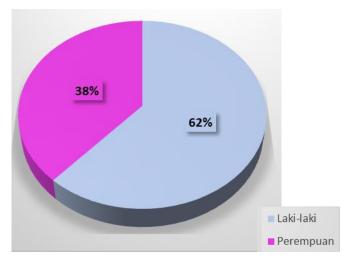
C. SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 259 orang atau sebesar 62% dan perempuan sebanyak 161 orang atau sebesar 38%. Rincian jumlah SDM berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.3.



Tabel 3.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS	TPI	Honorer	Jumlah
1	Laki-laki	116	66	77	259
2	Perempuan	102	39	20	161
	TOTAL	218	105	97	420



Gambar 3.3 Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

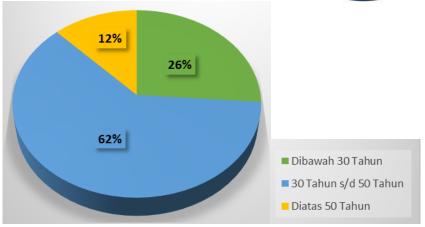
D. SDM BERDASARKAN USIA

Berdasarkan usia, pegawai dengan jumlah yang paling banyak berada pada kelompok usia 30 s/d 50 tahun yaitu sebanyal 259 orang, selanjutnya urutan kedua berada pada kelompok usia dibawah 30 tahun yaitu sebanyak 110 orang, dan yang jumlahnya paling sedikit berada pada kelompok usia diatas 50 tahun yaitu sebanyak 51 orang. Secara detail jumlah pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

No	Kelompok Usia	PNS	KI	Honorer	Jumlah
1	Dibawah 30 Tahun	51	8	51	110
2	30 Tahun s/d 50 Tahun	121	84	54	259
3	Diatas 50 Tahun	46	5	0	51
	TOTAL	218	97	105	420





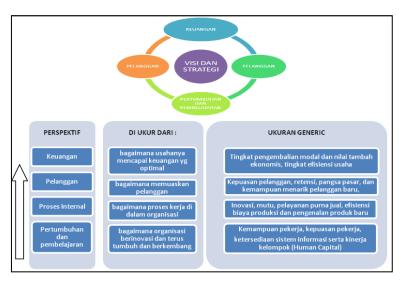
Gambar 3.4 Persentase Pegawai Berdasarkan Usia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur paling utama dalam mencapai tujuan kinerja suatu organisasi. Saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebanyak 218 orang. Pengukuran kinerja PNS menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun oleh masing-masing PNS secara berjenjang dari Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon IV dan Jabatan Fungsional.

Dalam mendukung tercapainya kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki jumlah PNS sebanyak 218 orang. Berdasarkan peta jabatan DJPI, kebutuhan pegawai di DJPI sebanyak 448 orang. Untuk memenuhi gap tersebut maka masih dibutuhkan pegawai non PNS yang terdiri dari tenaga honorer sebanyak 97 orang dan Tenaga Pendukung Individual (TPI) sebanyak 105 orang.

Salah satu metode pengukuran kinerja terintegrasi adalah metode Balanced Scorecard. Balanced Scorecard adalah sekumpulan ukuran kinerja yang mencakup 4 perspektif yaitu: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Keempat perspektif tersebut berkaitan antara satu dengan yang lain. Hubungan antara keempat perspektif digambarkan sebagai suatu kesatuan sebagaimana digambarkan pada gambar sebagai berikut:





Gambar 3.5 Hubungan Empat Perspektif Balanced Scorecard

Indikator Kinerja Individu diukur menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Dalam kegiatan pengumpulan dan merekap SKP seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi langsung mulai dari inputing hingga pada penilaian SKP di akhir tahun. Sistem aplikasi tersebut mempermudah dalam penghitungan sekaligus menjadi database kinerja setiap individu di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sehingga pelaksanaan *monitoring* kinerja individu dapat dilaksanakan dengan waktu yang lebih singkat. SKP Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Kemi	enterian Pekerjaar	Umum dan Perumahan Rakyat		Periode Penilaian : 1 J	anuari 2022 s/d 31 Desember 2022			
NAMA		PEGAWAI YANG DINILAI Dr. Ir. Herry Trisaputra Zuna, S.E., M.T.		NAMA	PEJABAT PENILAI KINERJA Dr. Ir.Mochamad Basuki Hadimuljono, M.Sc.			
NIP	•	196705151996031001		NIP	195411051983021001			
	KAT/GOL RUANG	Pembina Utama - IV/e		PANGKAT/GOL RUANG	null			
ABAT	KERJA	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaar DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUI		JABATAN UNIT KERJA	•			
_	SII KERJA	DIRECTORAL JEROENOE PERIODITION IN TOTAL CONTROL OF THE PERIODIC P	C) Energy at Omore part / Enough soft	OHI HEIGH			41 1411	
NO		RENCANA HASIL KERJA		INDIKATOR KINERJA	INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	
A.UTA	Meningkatnya	Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rum	nah Tangga Berpengha	silan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan	100%	Penerima Layanan	
-	yang Layak da	n Aman	Pembiayaan Perumahan Tinekat Ketersediaan KPBU Infrastruktur	Pekeriaan Umum dan I	Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung	2000		
			sistem, kebijakan dan strategi pembiayaa	n yang efisien dan efek	tif		Penerima Layanan	
2	Meningkatnya	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya Birokrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			Penguatan Internal Proses Bisnis	
			Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direk			Transcent Control	Anggaran	
B.TAI	MBAHAN	The second second second						
PERIL	LAKU KERJA	-	Tidak a	da Data				
$\overline{}$	Berorientasi	Pelayanan						
		memenuhi kebutuhan masyarakat;		Ekspektasi Khusus	Pimpinan			
1		, solutif, dan dapat diandalkan; paikan tiada henti.						
	NAME OF TAXABLE PARTY.							
	Akuntabel							
2	- Melaksanakan	tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin d sekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif da	dan berintegritas tinggi; n. efisien:	Ekspektasi Khusus	Pimpinan			
-	- Tidak menyalah	gunakan kewenangan jabatan.						
	Kompeten							
	-	kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu	berubah;	Ekspektasi Khusus	Pimpinan			
3	- Membantu ora	ng lain belajar; tugas dengan kualitas terbaik.						
		rugas dengan koancas terbanc.						
	Harmonis			<u>'</u>				
	- Menghargai se	tiap orang apapun latar belakangnya;		Ekspektasi Khusus	Pimpinan			
4	- Suka menolon - Membangun li	g orang iain; ngkungan kerja yang kondusif.						
	Lovel							
	Loyal	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF			With Williams			
5	- Memegang teg Negara Kesatua	uh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Re n Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;	publik Indonesia Tahun 1945, setia kepada	Ekspektasi Khusus	Pimpinan			
,	- Menjaga nama	baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara; ia jabatan dan negara.						
	- Wichjaga ranas	a pooter, carringer						
	Adaptif	3						
		aaikan diri menghadapi perubahan;		Ekspektasi Khusus	Dimpinso			
6	- Terus berinova	si dan mengembangkan kreativitas;		скэрекцая клизиз	r mpadri			
	- Bertindak proa	KIN.						
	Kolaborasi							
		mpatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;		Ekspektasi Khusus	Pimpinan			
7	- Nenggerakkar	i bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersa	ima.					
			Lampiran Cacara	n Kinaria	Родамаі			
			Lampiran Sasara	ii Kiileija	regawai			
V.	menterian	Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rakvat		Periode Penilaian : 1 Janua	ri 2022 s/d 2	1 Desember 202	
	UKUNGAN SUN		·····yut		, chode remidian . 1 janua	EVEL 3/U 3	. Describer 202	
1	Membutuh	skan Sumber Daya Manusia yang dapat menu	njang tugas dan fungsi DJPI					
2	Sarana dar	n Prasarana Gedung dan Kantor yang memada	ı					
Sk		GUNGJAWABAN						
1		paian kinerja disampaikan kepada pimpinan s	ecara berkala					
	ONSEKUENSI							
1		emenuhi ekspektasi pimpinan, maka pimpinan						
2	Apabila tid	ak memenuhi ekspetasi pimpinan, maka diber	ikan waktu memperbaiki kinerja selam	a z Dujan				
		Pegawai yang Dinilai			Pejabat Penilai Kinerja			
		r egarrai yang Dililidi			rejudat remai Killerja			
		14.	_		TION WALL			
		/TT			//WIIII/			

Gambar 3.7 SKP Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), berbagai pelatihan atau kegiatan bimbingan teknis diikuti pada tiap bidang pekerjaan oleh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Melalui pengembangan kompetensi SDM ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Adapun rincian pelatihan/workshop yang dilakukan adalah sebagai berikut:

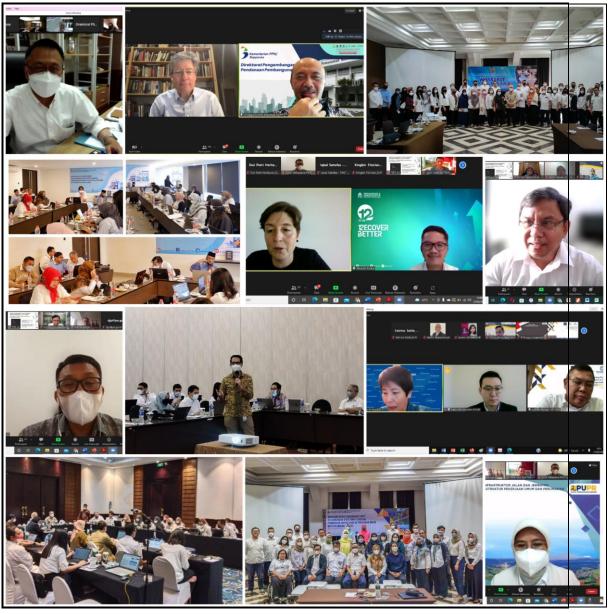
Tabel 3.5 Pelatihan/Workshop DJPI Tahun 2022

No	Nama Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Jenis Pelatihan
1	Workshop on Housing PPP Service Level Agreements	3-4 Februari 2022	KPBU
2	Sectoral Workshop: Key Performance Indicators for Road PPP Project	21 Maret 2022	KPBU
3	Workshop on Housing Finance Subsidiy Program: A Virtual Knowledge Exchange Between Indonesia and Mongolia	21 Maret 2022	Program Bantuan Pembiayaan Perumahan
4	Workshop Pengelolaan Risiko atas Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan DJPI	31 Maret 2022	Manajemen Risiko
5	Sectoral Workshop: Fundamental of Land Value Capture	5 April 2022	Land Value Capture (LVC)
6	Workshop Pengenalan Analisis Input Output dalam Mendukung Evaluasi Dampak dari Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR melalui Skema KPBU dan Pembiayaan Alternatif Lainnya	20 Mei 2022	Analisis Input Output (IO)
7	Workshop II: Pendalaman Analisis Input Output dalam Mendukung Evaluasi Dampak dari Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR melalui Skema KPBU dan Pembiayaan Alternatif Lainnya	22-24 Juni 2022	Analisis Input Output (IO)
8	Pelatihan <i>Financial Modelling</i> Proyek KPBU bidang PUPR	27 Juni-29 Juli 2022	Financial Model KPBU
9	Pelatihan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU Secara Distance Learning Di Balai Pengembangan Kompetensi Pupr Wilayah II Palembang	4-8 Juli 2022	KPBU
10	Web Development	5-19 Juli 2022	Teknologi Informasi
11	Workshop Penganalan Manajemen Risiko Proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	21-22 Juli 2022	Manajemen Risiko KPBU
12	Workshop Pengembangan Manajemen Risiko Proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui <i>Lesson Learned</i>	18-19 Agustus 2022	Manajemen Risiko KPBU



No	Nama Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Jenis Pelatihan
	Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung		
13	Diklat Hukum Kontrak dan Kerjasama Konstruksi	22-31 Agustus 2022	Kontrak dan Kerjasama Konstruksi
14	Bincang <i>Financial Planning</i> Generasi Muda Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2 September 2022	Financial Planning
15	Workshop Pengembangan Pengelolaan Risiko Proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan melalui Lesson Learned Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung	15-16 September 2022	Manajemen Risiko KPBU
16	Workshop Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022	27 Oktober 2022	SAKIP
17	Sharing Knowledge Saber Pungli dan Penanganan Benturan Kepentingan	3 November 2022	Saber Pungli dan Penanganan Benturan Kepentingan
18	Workshop Teknis Penilaian PIPK Entitas Akuntansi Tahun 2022	8-9 November 2022	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
19	Webinar on Quantifying Emissions (GHGs and SLCPs) from the Urban Infrastructures: Water and Wastewater Sector	7-8 Desember 2022	KPBU





Gambar 3.8 Pelatihan/Workshop DJPI Tahun 2022



3.2 SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas kerja merupakan sarana dan prasarana yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai. Fasilitas kerja yang memadai dapat meningkatkan semangat kerja pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Hal ini karena fasilitas kerja merupakan faktor yang mempengaruhi manajemen sarana dan prasarana suatu organisasi dalam mendukung proses berjalannya suatu organisasi.

Sistem penyelenggaraan pemerintah secara menyeluruh telah mengalami perubahan baik di pusat maupun di daerah dengan berbasis kinerja, tingkat capaian yang berdasarkan pada kinerja serta pelayanan yang prima, untuk mencapai keberhasilan kinerja yang baik pegawai pemerintah diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, diharapkan sarana dan prasarana yang disiapkan juga telah mengarah kepada teknologi yang saat ini sedang berkembang. Oleh karena itu, manajemen sarana dan prasarana diperlukan guna untuk menjamin Unit Kerja telah tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung berbagai kegiatan, tugas dan fungsi yang sesuai, cepat, tepat dan bermanfaat. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pasal 3 yang menjelaskan tentang penataan sarana dan prasarana kerja, antara lain:

- Kelancaran proses pelaksanaan pekerjaan;
- Kelancaran hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/ pegawai;
- Memudahkan sistem komunikasi;
- Kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- Memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.



Dalam menyikapi hal tersebut diatas, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Pada tahun 2022 ini, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sedang melakukan penataan ruang kerja guna mendukung sarana dan prasarana untuk proses kelancaran pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan dan Perumahan Umum sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri tersebut di atas. Adapun sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.6 Daftar Sarana dan Prasarana di DJPI

URAIAN	KUANTITAS	URAIAN	KUANTITAS	URAIAN	KUANTITAS
Pompa Air	1	Pompa Air	1	Mesin Barcode	16
Sedan	1	Sedan	1	Telephone (PABX)	24
Jeep	1	Jeep	1	Telephone Mobile	5
Station Wagon	13	Station Wagon	13	Handy Talky (HT)	26
Sepeda Motor	5	Sepeda Motor	5	Finger Printer Time and Attandance	1
Scanner (Universal Tester)	5	Scanner (Universal Tester)	5	Alat Komunikasi Lainnya	1
Lemari Penyimpan	4	Lemari Penyimpan	4	Switcher Combination	1
Mesin Ketik Listrik	1	Mesin Ketik Listrik	1		2
Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Unit Remote Control	6
Mesin Penghitung Uang	2	Mesin Penghitung Uang	2	Kursi Dorong	1
Mesin Fotocopy Electronic	2	Mesin Fotocopy Electronic	2	Kursi Zeis	0
Lemari Besi/Metal	132	Lemari Besi/Metal	132	Electrik Thermometer	5
Lemari Kayu	59	Lemari Kayu	59	Thermometer Digital (Alat	1
Rak Besi	128	Rak Besi	128	Mini Komputer	5
Rak Kayu	8	Rak Kayu	8	P.C Unit	407
Filing Cabinet Besi	100	Filing Cabinet Besi	100	Lap Top	3
Filing Cabinet Kayu	9	Filing Cabinet Kayu	9	Note Book	134
Brandkas	3	Brandkas	3	Tablet PC	26
Buffet	15	Buffet	15	Storage Modul Disk (Peralatan	2
Locker	6	Locker	6	Hard Disk	16
Laci Box	4	Laci Box	4	Data Patch Panel	- 6
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2	Auto Switch/Data Switch	1
CCTV - Camera Control Television	33	CCTV - Camera Control Television	33	Monitor	1
White Board	10	White Board	10		4
Alat Penghancur Kertas	63	Alat Penghancur Kertas	63	Printer (Peralatan Personal Komputer)	303
Mesin Absensi	2	Mesin Absensi	2	Scanner (Peralatan Personal	52
White Board Electronic	3	White Board Electronic	3	LAN Card	2
Laser Pointer	7	Laser Pointer	7	Server	11
Lampu-lampu Kristal	2	Lampu-lampu Kristal	2	Router	9
LCD Projector/Infocus	22	LCD Projector/Infocus	22	Repeater and Transciever	12
Flip Chart	1	Flip Chart	1	Rak Server	5
Softboard	1	Softboard	1	Firewall	3
Acces Control System	10	Acces Control System	10	Wireless Access Point	16
Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	20	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	20	Switch	24
Focusing Screen/Layar LCD Projector	12	Focusing Screen/Layar LCD Projector	12	Acces Point	15
Alat Kantor Lainnya	14	Alat Kantor Lainnya	14	Rackmount	1
Meja Kerja Kayu	410	Meja Kerja Kayu	410	Network Cable Tester	1
Kursi Besi/Metal	409	Kursi Besi/Metal	409	Modul Untuk Penambahan di Core	18
Kursi Kayu	38	Kursi Kayu	38		
Meja Rapat	47	Meja Rapat	47	Peralatan Jaringan Lainnya	116
Meja Komputer	1	Meja Komputer	1	Peralatan Olah Raga Lainnya	5

Sumber: Data Simak BMN DJPI Tahun 2022



3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) BA. 033 dan BA. 999 yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024.

A. BA. 033

Alokasi awal Pagu Anggaran BA. 033 adalah sebesar Rp197.561.750.000,00 yang terdiri dari:

- Satuan Kerja Pembiayaan Perumahan sebesar Rp178.161.750.000; dan
- Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan
 Dana Pembiayaan Perumahan sebesar Rp19.400.000.000.

Seiring dengan berjalannya Tahun Anggaran 2022, terdapat 8 kali revisi DIPA BA. 003 adalah sebagai berikut:

- Revisi DIPA pertama terbit pada tanggal 16 Desember 2021, pada revisi pertama karena Automatic Adjusment oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp20.000.000.000;
- 2) Revisi DIPA kedua terbit pada tanggal 01 Maret 2022, revisi ini dimaksudkan untuk Perubahan anggaran yang bersumber dari PHLN (Program BP2BT, HREIS, ESP, dan Toll Roads and Bridges FBC and Bidding Documents Development) dan Pergeseran anggaran antar KRO;
- 3) Revisi DIPA ketiga terbit pada 27 April 2022, revisi ini karena perubahan catatan halaman IV DIPA kegiatan Dukungan Manajemen Internal DJPI (4194) yang disebabkan kekurangan dokumen pendukung sebesar Rp1.605.600.000.000 dan pembukaan blokir paket Pemantauan dan Evaluasi Tahapan Transaksi dan Pelaksanaan Proyek KPBU Jalan dan Jembatan sebesar Rp953.713.000;



- 4) Revisi DIPA keempat terbit pada 15 Juli 2022, revisi ini karena Perubahan catatan halaman III DIPA;
- 5) Revisi DIPA kelima terbit pada tanggal 05 September 2022, revisi ini terkait Perubahan anggaran yang bersumber dari PHLN (Program BP2BT, PMC ESP, dan *Toll Roads and Bridges* FBC and *Bidding Documents Development*), pergeseran anggaran antar KRO, pemanfaatan sisa anggaran kontraktual, pemenuhan belanja operasional, pergeseran dari belanja pegawai operasional, dan pembukaan blokir;
- 6) Revisi DIPA keenam terbit pada tanggal 31 Oktober 2022, revisi ini terkait Pergeseran *Automatic Adjusment* ke Ditjen Binakon sebesar Rp9.800.000.000, pergeseran anggaran ke Setjen sebesar Rp2.402.620.000 dan pergeseran anggaran antar KRO;
- 7) Revisi DIPA ketujuh terbit pada tanggal 28 November 2022, revisi ini terkait Pergeseran Anggaran untuk memenuhi kekurangan Belanja Operasional Direktorat PPIP;
- 8) Revisi DIPA kedelapan pada tanggal 6 Desember 2022, revisi ini karena Realokasi Anggaran TA 2022 yang Terblokir Automatic Adjusment ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp10,2 M;

Dengan adanya revisi DIPA, maka total pagu anggaran BA. 033 untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp792.617.174.000 yang terdiri dari:

- Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp773.217.174.000,00; dan
- Satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan
 Dana Pembiayaan Perumahan sebesar Rp19.400.000.000.



B. BA. 999.07

Anggaran BA 999.07 dikelola oleh Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Total pagu anggaran sebesar Rp5.209.409.865.000. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran Subsidi Bunga Kredit menggulung sebesar Rp4.275.733.865.000 dan untuk program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 933.676.000.000. Pada tahun 2022 BA. 999.07 mengalami dua kali revisi, pertama pada tanggal 03 November 2022 dan yang kedua 30 Desember 2022, revisi ini karena perubahan alokasi Subsidi Bunga Kredit dan Subsidi Bantuan Uang Muka. Sehingga total pagu anggaran akhir BA. 999.07 sebesar Rp3.517.707.935.000, untuk Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Rp933.676.000.000 dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan sebesar Rp2.584.031.935.000.

BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA



BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

4.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian PUPR, DJPI mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR SS-3 dan SS-5, yaitu:

- a. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - 1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;
 - 2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.
- b. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
 - 1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
 - Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
 - Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
 - 4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
 - 5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
 - 6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) bersama Direktorat Jenderal Perumahan (DJP) mendukung ketercapaian SS-3 pada indikator kinerja ke -2 yaitu Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni.



A. Capaian Kinerja SS-3: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni

Capaian indikator kinerja pada SS-3 yaitu persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni didukung oleh realisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR tahun 2022 yang dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Capaian Sasaran Strategis

PROGRAM KEMENTERIAN	KEGIATAN	CAPAIAN (Unit)			TOTAL
PUPR	REGIATAN	2020	2021	2022	TOTAL
	Rumah Swadaya	233.298	127.091	185.802	546.191
PENYEDIAAN PERUMAHAN	Rumah Susun	823	7.024	3.872	11.719
(DJP)	Rumah Khusus	1.575	3.311	4.359	9.245
	Total	235.696	137.426	194.033	567.155
	FLPP	109.253	178.728	226.000	513.981
	SSB	90.362	1	1	90.362
PEMBIAYAAN PERUMAHAN	BP2BT	1.357	11.999	11.886	25.242
(DJPI)	SMF	8.460	13.329	65.263	87.052
	Tapera		389	4.534	4.923
	Total	209.432	204.445	307.683	721.560
TOTAL		445.128	341.871	721.560	1.288.715

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Indonesia, terhitung dari tahun 2020-2022 Kementerian PUPR telah merealisasikan sebanyak 1.288.715 unit rumah yang terdiri dari capaian program program Pembiayaan Perumahan yang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebanyak 721.560 unit, dan program Penyediaan Perumahan yang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perumahan sebanyak 567.155 unit.



Berdasarkan realisasi tersebut, perhitungan capaian IKSS Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni adalah sebagai berikut:

$$A = Y + \left[\left\{ \left(\frac{\sum (V + W)}{11.000.000} \right) x \ 100 \right\} x (X - Y) \right]$$

$$= 56,1\% + \left[\left\{ \left(\frac{\sum (567.155 + 721.560)}{11.000.000} \right) x \ 100 \right\} x (70\% - 56,1) \right]$$

$$= 57,73\%$$

Keterangan:

A = Capaian Kinerja (%)

V = Jumlah rumah layak huni yang dibangun oleh DJP (unit)

W = Jumlah rumah yang mendapat subsidi perumahan dari DJPI (unit)

X = Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024

Y = Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,1%)

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh capaian IKSS Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni adalah sebesar **57,73%**. Kontribusi Kementerian PUPR dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dalam skala nasional adalah sebesar **1,63%** (diperoleh dari capaian 57,73% dikurangi *baseline* tahun 2019 sebesar 56,1%).

Dalam hal ini diperlukan penyesuaian terhadap baseline rumah tangga yang menghuni rumah layak huni 2019 semula dalam Renstra Kementerian PUPR sebesar 56,1% menjadi 56,51%. Penyesuaian baseline tersebut mengacu kepada Lampiran Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Sidang Bersama DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tanggal 14 Agustus 2020. Dengan menggunakan baseline 56,51% maka diperoleh capaian kinerja IKSS ini pada tahun 2022 sebesar 58,09%.



B. Capaian Kinerja SS-5: Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif

Selain mendukung ketercapaian SS-3 pada indikator kinerja Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan Unit Organisasi tunggal yang mengampu dan mendukung capaian SS-5 pada indikator kinerja ke-2 yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif.

Metode pengukuran capaian IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif yaitu berdasarkan penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:

- Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan dibandingkan dengan target (30%); dan
- Nilai investasi/pembiayaan KPBU yang dihasilkan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (Paket Pembiayaan KPBU yang siap dikerjasamakan (70%).

Pada tahun 2022, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan telah melakukan survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada 30 responden dari pihak internal dan eksternal DJPI.



Penetapan indikator kinerja dikembangkan dari nilai-nilai pada dimensi service quality yang kemudian dihubungkan dengan masing-masing cakupan penilaian. Dimensi service quality terdiri dari lima nilai, yaitu; (1). reliability (keandalan), (2) reponsiveness (daya tanggap), (3) assurance (kepastian), (4) emphaty (empati), dan (5) tangible (berwujud). Dari lima nilai tersebut, terdapat batasan-batasan yang dinilai antara lain man, method, money, resource, time. Seluruh nilai beserta batasan kemudian dituangkan dalam Survey. Pertanyaan-pertanyaan survey dibagi menjadi tiga kategori, yaitu; perencanaan, pelaksanaan dan hasil (outcomes). Berdasarkan hasil pengumpulan kuesioner, maka didapatkan hasil sebagaimana pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kategori	Jumlah Pertanyaan	Nilai (%)	Bobot (30%)
Perencanaan	7	97,05	
Pelaksanaan	6	96,00	28,88%
Outcomes	6	95,67	20,00%
Nilai Total Survei	19	96,28%	

Rincian perhitungan Hasil Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

$$X = A x 30\%$$

 $X = 96,28\% x 30\%$
 $= 28,88\%$

Keterangan:

- X = Capaian Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem,
 Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan
 Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)
- A = Nilai Hasil Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)

Berdasarkan Tabel 4.2, diperoleh nilai hasil survey adalah sebesar 96,28%. Setelah dilakukan pembobotan 30% terhadap hasil survey tersebut, maka capaian indikator kontributor 1 yaitu Tingkat Kualitas



Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar 28,88%.

Berdasarkan Rencana Strategis DJPI tahun 2020-2024, target proyek KPBU yang siap dikerjasamakan pada tahun 2022 adalah sebanyak 18 proyek dengan total nilai investasi **Rp195.888.486.000.000**. Realisasi proyek KPBU yang siap dikerjasamakan tahun 2022 adalah sebanyak 19 proyek dengan total nilai investasi sebesar **Rp220.217.466.483.000**.

Capaian tersebut terdiri atas 5 proyek sektor SDA, 10 proyek sektor Jalan dan Jembatan, 2 proyek sektor Perumahan, dan 2 proyek sektor Permukiman. Rincian capaian KPBU tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBU yang Siap Dikerjasamakan

		TAR	GET TA. 2022		REALISASI	
NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sumber Daya Air	2	1.203.486.000.000	5	Bendungan Bodri Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW – NTB Daerah Irigasi Komering Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok – NTB PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji – Sumatera Selatan	7.113.956.483.000
2.	Jalan dan Jembatan	10	187.315.000.000.000	10	Jalan Trans Papua Ruas Jayapura Wamena (Segmen Mamberamo Elelim Jalan Akses Exit Toll Jalan Tol Cilacap – Yogyakarta Jalan Tol Demak – Tuban Jalan Tol Demak – Babat Jalan Tol Jember – Lumajang Jalan Tol Jember – Situbondo Jalan Tol Tulungagung – Kepanjen Jembatan Tanah Bumbu – Pulau Laut Jembatan Muna – Buton	181.173.460.000.000
3.	Perumahan	2	1.800.000.000.000	2	KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung KPBU Rumah Susun Karawang Spuur	1.240.050.000.000
4.	Permukiman	4	5.570.000.000.000	2	Pendampingan Transaksi SPAM Hilir DKI Jakarta (BtoB) Pendampingan SPAM Rajeg – Kabupaten Tangerang (BtoB)	30.690.000.000.000
	TOTAL	18	195.888.486.000.000	19		220.217.466.483.000

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 Nomor: 02/BA/Dp/2022



Berdasarkan target dan realisasi proyek KPBU pada Tabel 4.3, perhitungan capaian nilai investasi KPBU yang siap dikerjasamakan adalah sebagai berikut:

Capaian nilai investasi KPBU = $\frac{Realisasi \ nilai \ investasi \ proyek \ KPBU \ yang \ siap \ dikerjasamakan}{Target \ nilai \ investasi \ proyek \ KPBU \ yang \ siap \ dikerjasamakan}$ Capaian nilai investasi KPBU = $\frac{220.217.466.483.000}{195.888.486.000.000}$

= 112,42%

Setelah dilakukan pembobotan 70% terhadap capaian nilai investasi KPBU, maka capaian indikator kontributor 2 yaitu Nilai investasi/pembiayaan KPBU yang siap dikerjasamakan adalah sebesar **78,69%.**

Capaian Kinerja Nilai Investasi = 112,42% x 70%

Proyek KPBU

= 78,69%

Setelah hasil capaian indikator kontributor 1 dan 2 telah diperoleh, maka Capaian Kinerja IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif adalah sebagai berikut.

Capaian Kinerja = Capaian Kinerja Survei + Capaian Kinerja Nilai Investasi Proyek KPBU

= 28,88% + 78,69%

= 107,57%

Berdasarkan perhitungan di atas, Capaian Kinerja IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif adalah sebesar **107,57%**.

4.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Program

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengampu 2 program yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dengan koordinator program yaitu Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR; dan (2) Program

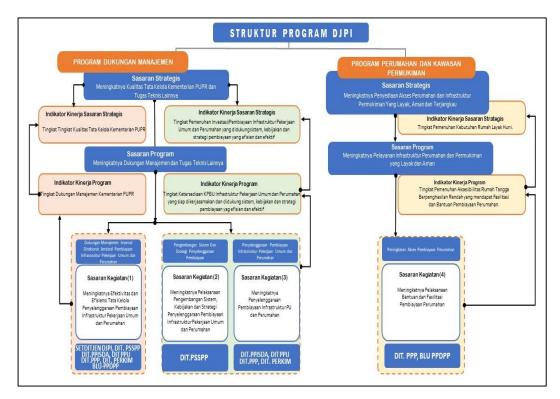


Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan coordinator program yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kedua Program tersebut merupakan program yang digunakan DJPI dalam rangka mencapai tujuan Sasaran Strategis. Sasaran Strategis tersebut di-*breakdown* menjadi Sasaran Program. Sasaran Program (SP) DJPI yaitu:

- a. Sasaran Program Dukungan Manajemen yaitu Meningkatnya
 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Indikator Kinerja
 Program terdiri dari dua indikator yaitu:
 - Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR), diampu oleh Sekretariat DJPI dan BLU PPDPP.
 - 2) Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif, diampu oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan.
- b. Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman. Indikator Kinerja Program tersebut mencakup Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Dalam rangka mendukung Program Dukungan Manajemen dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap Unit Kerja di lingkungan DJPI berkontribusi terhadap capaian Sasaran Program melalui Sasaran Kegiatan (SK) Unit Kerja. Adapun Peta Strategis DJPI untuk program dukungan manajemen serta program perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada Gambar 4.1.





Gambar 4.1 Struktur Program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Peta strategis di atas selanjutnya dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, sehingga capaian kinerja kedua Sasaran Program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat diukur. Capaian Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.4.



Tabel 4.4 Capaian Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022

PR	SASARAN STRATEGIS/SASARAN OGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	CAPAIAN
	(1)	(2)	(3)
PROGR	RAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMA	١N	
	AN STRATEGIS: Meningkatnya penyediaan akseuktur permukiman yang layak, aman, dan terjang		dan
IKSS: I Layak I	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Huni	58,02%	57,73%
SP	Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman		
1.	Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	100,00%	95,06%
PROGR	RAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
	AN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelo gas teknis lainnya	ola Kementeri	an PUPR
infrastr diduku	ingkat pemenuhan investasi/pembiayaan uktur pekerjaan umum dan perumahan yang ng sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan iisien dan efektif	100,00%	107,57%
SP	Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		
1.	Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00%	102,37%

Keterangan: Target kinerja berdasarkan Renstra 2020-2024

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 Nomor: 02/BA/Dp/2022

Capaian kinerja sasaran program DJPI tahun 2022 pada Tabel 4.4 diperoleh dari perbandingan antara realisasi program dengan target yang tertuang pada Perjanjian Kinerja DJPI tahun 2022. Pada program Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, target tahun 2022 adalah sebesar 100% dengan realisasi sebesar 95,06%.



Pada program Dukungan Manajemen dengan IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif, target tahun 2022 adalah sebesar 100% dengan realisasi sebesar 102,37%.

Capaian indikator kinerja masing-masing program DJPI akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

4.1.3 Capaian Indikator Kinerja Program

A. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan program yang mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman, dan Terjangkau, dengan IKSS Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni. Dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) berkontribusi melalui capaian Program Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Perumahan (DJP) berkontribusi melalui capaian Program Penyediaan Perumahan. Selanjutnya kedua capaian tersebut dimasukan kedalam rumus sesuai dengan metode perhitungan yang tertuang dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Hasil dari perhitungan tersebut merupakan capaian IKSS Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni.



IKSS tersebut diturunkan menjadi sasaran program Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Peruahan dan Permukiman yang Layak da aman dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Capaian IKSP Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dan fasilitasi pembiayaan perumahan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.



Gambar 4.2 Akad Massal Serentak KPR Bersubsidi

Target penyaluran bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2022 dihitung berdasarkan target bantuan pembiayaan perumahan FLPP, BP2BT, SMF, dan Tapera yang tertuang pada Renstra DJPI tahun 2020-2024 yaitu sebanyak 310.312 rumah tangga. Namun, berdasarkan DIPA tahun 2022 target program BP2BT adalah sebanyak 13.672 rumah tangga, sehingga target penyaluran bantuan pembiayaan perumahan tahun 2022 yang semula 310.312 rumah tangga berubah menjadi 323.672 rumah tangga. Total realisasi bantuan pembiayaan perumahan adalah sebanyak 307.683 rumah tangga yang terdiri dari FLPP sebanyak 226.000 rumah tangga,



BP2BT sebanyak 11.886 rumah tangga dan dukungan pembiayaan perumahan melalui sumber pembiayaan sekunder perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat (SMF dan Tapera) sebanyak 69.797 rumah tangga. Rincian realisasi dari masing-masing bantuan pembiayaan perumahan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Realisasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2022

NO	BANTUAN	PAGU	TARGET	REALISASI	
NO	PEMBIAYAAN PERUMAHAN	ANGGARAN	UNIT	KEUANGAN	UNIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	23.000.000.000.000	200.000	25.150.724.329.163	226.000
2	Subsidi Selisih Bunga (SSA/SSB) *	2.584.031.935.000	769.903	2.570.621.611.769	757.087
3	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)**	933.676.000.000	200.000	929.980.000.000	225.987
4	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)	546.970.000.000	13.672	460.903.053.015	11.886
5	SMF	-	10.000	-	65.263
6	Tapera	-	100.000	-	4.534
	TOTAL	27.064.677.935.000	323.672	29.112.228.993.947	307.683

Keterangan: *) Subsidi Selisih Bunga untuk pembayaran penerbitan KPR tahun sebelumnya
**) Realisasi Unit SBUM tidak dimasukkan ke penjumlahan

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 Nomor: 02/BA/Dp/2022

Berdasarkan realisasi pada Tabel 4.5, perhitungan persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja =
$$\frac{Realisasi\ program\ bantuan\ pembiayaan\ perumahan}{Target\ program\ bantuan\ pembiayaan\ perumahan}$$
Capaian Kinerja = $\frac{307.683}{323.672}$
= 95,06%

Capaian IKSP Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan tahun 2022 adalah sebesar 95,06% yang artinya kinerja tersebut berada di bawah target yang telah ditetapkan



(-4,94% dari target 100%), maka diperlukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja di tahun 2023 sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra DJPI 2020-2024.

Dalam mencapai IKSP Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yang harus terpenuhi yaitu

- Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan (50%) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Realisasi kinerja pada IKK ini adalah sebesar 49,35%.
- 2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (50%) yang dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. Realisasi kinerja pada IKK ini adalah sebesar 0%. Tidak tercapainya IKK ini karena pada tahun 2022 PPDPP telah bubar sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.

B. Program Dukungan Manajemen

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam mendukung Program Dukungan Manajemen memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif.



IKSS tersebut diturunkan menjadi sasaran program meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif.

Metode pengukuran capaian IKSS Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan pembiayaan yang efisien dan efektif yaitu berdasarkan penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:

- Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target (30%); dan
- Jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang siap dikerjasamakan pada tahun berjalan (70%)).

Pada tahun 2022, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan telah melakukan survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada 30 responden dari pihak internal dan eksternal DJPI. Survei merupakan salah satu alat penilaian yang digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dan dijadikan alat pengambilan kesimpulan akan kinerja yang ingin diteliti. Dengan adanya umpan balik ini, tingkat penerapan hasil pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur dapat dinilai



dan hasil penilaian tersebut dapat menjadi rujukan pengambilan keputusan terhadap kualitas mutu pelayanan publik.

Penetapan indikator kinerja yang akan diukur dan dijadikan pertanyaan dalam kuesioner atau survei berdasarkan pemetaan model logika, yaitu: (1) indikator masukan (input) yang mengukur jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan, (2) indikator keluaran (ouput) digunakan untuk mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan, (3) indikator hasil (*outcome*) digunakan untuk mengukur capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai dilaksanakan, serta (4) indikator dampak (impact) yang menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Berdasarkan hasil pengumpulan kuesioner, maka didapatkan hasil sebagaimana pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Jenis Indikator	Jumlah Pertanyaan	Nilai (%)	Bobot (30%)
Indikator Masukan	13	95,49	
Indikator Keluaran	2	94,00	
Indikator Hasil	9	94,44	28,48%
Indikator Dampak	2	94,67	
Nilai Total Survei	26	94,95	

Rincian perhitungan Hasil Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

$$X = A x 30\%$$

 $X = 94,95\% x 30\%$
 $= 28,48\%$



Keterangan:

- X = Capaian Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem,
 Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan
 Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)
- A = Nilai Hasil Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)

Berdasarkan Tabel 4.6, diperoleh nilai hasil survey adalah sebesar 94,95%. Setelah dilakukan pembobotan 30% terhadap hasil survey tersebut, maka capaian indikator kontributor 1 yaitu Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar 28,48%.

Selanjutnya, target proyek yang siap dikerjasamakan tahun 2022 adalah 18 proyek dan dapat terealisasi **19 proyek** sebagaimana tercantum pada Tabel 4.3 sehinga diperoleh capaian kinerja sebesar **105,56%**.

Capaian proyek KPBU =
$$\frac{Jumlah\ proyek\ KPBU\ yang\ siap\ dikerjasamakan}{Target\ proyek\ KPBU\ yang\ siap\ dikerjasamakan}$$
 Capaian proyk KPBU = $\frac{19}{18}$

= 105.56%

Setelah dilakukan pembobotan 70% terhadap capaian proyek KPBU, maka capaian indikator kontributor 2 yaitu Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif adalah sebesar **73,89%**.

Capaian Kinerja Proyek KPBU = 105,56% x 70% = 73,89%



Setelah hasil capaian indikator kontributor 1 dan 2 telah diperoleh, maka Capaian Kinerja IKSS Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja = Capaian Kinerja Survei +

Capaian Kinerja Proyek KPBU

= 28,48% + 73,89%

= 102,37%

Berdasarkan perhitungan di atas, Capaian Kinerja IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif adalah sebesar **102,37%**.

4.1.4 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam mendukung tercapainya Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen, terdapat 4 sasaran kegiatan di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Capaian dari 4 sasaran kegiatan DJPI adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Capaian Sasaran Kegiatan DJPI

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola	100%	84,4%
	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
2	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100%	105,25%
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100%	99,13%
4	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	100%	49,35%



Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Berdasarkan Renstra DJPI 2020-2024, Sasaran Kegiatan 1 yaitu Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diampu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan bersama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. Realisasi pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 84,4% yang diperoleh dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Capaian Dukungan Manajemen Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) adalah 0% dikarenakan anggaran sebesar Rp19.400.000.000 yang bersumber dari BA.033 diblokir oleh Kementerian Keuangan mengingat telah bubarnya pada September 2022 sesuai Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, sehingga seluruh kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Sasaran Kegiatan 2 yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diampu oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. Capaian sasaran kegiatan 2 ini adalah sebesar 105,25%. Capaian tersebut berasal dari capaian 8 (delapan) *output* kegiatan dan sesuai target Renstra 2020-2024. Secara keseluruhan, keberhasilan kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022 didukung oleh kontribusi capaian indikator kinerja kegiatan, yaitu: tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem,



kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 48%, tingkat implementasi internal dan manajemen kegiatan kepatuhan risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan sebesar 25%, tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP sebesar 32,25%.

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Sasaran Kegiatan 3 yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diampu oleh 4 (empat) Direktorat yaitu Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (Dit. PPISDA), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Dit. PPIJJ), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahah (Dit. PPP) dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (Dit. PPIP). Target dari masing-masing Direktorat adalah sebesar 25%. Capaian dari Sasaran kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar 99,13% yang diperoleh dari capaian Dit. PPISDA sebesar 25%, Dit. PPIJJ sebesar 25%, Dit. PPP 25%, dan Dit. PPIP sebesar 24,13%.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan

Sasaran Kegiatan 4 yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dengan IKK Tingkat Pencapaian Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan diampu oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. Capaian pada indikator Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 49,35% yang diperoleh dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, dan capaian yang diperoleh PPDPP pada tahun 2022 adalah 0%. Hal ini dikarenakan program FLPP



yang semula dilaksanakan oleh PPDPPP kini beralih kepada BP Tapera sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari BLU PPDPP kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah.

4.1.5 Capaian Kinerja Unit Kerja Eselon II

Dalam mendukung tercapainya Program Dukungan Manajemen dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan didukung oleh 6 (enam) unit kerja Eselon II. Adapun capaian kinerja masing-masing Unit Kerja Eselon II adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung pencapaian Program Dukungan Manajemen khususnya mendukung Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR. Indikator kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan:
- 2) Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- 4) Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;



- 5) Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
- 6) Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik.

Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas,	15%	16,9%
	Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik		
	Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan		
	Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum		
	dan Perumahan		
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk	15%	15%
	Hukum Pembiayaan Infrastruktur		
	Pekerjaan Umum dan Perumahan		
3	Tingkat Layanan Pengelolaan	10%	10%
	Kelembagaan dan Jabatan Fungsional		
	serta Pengadministrasian Pegawai		
	Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
4		10%	17.50/
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	10%	17,5%
	dan Perumahan		
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	15%	15%
	Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1070	1070
	dan Perumahan		
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi	10%	10%
	publik yang modern, terpadu dan		
	berorientasi publik		

Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2022



Isu strategis dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan pagu anggaran

Terdapat tiga kali perubahan pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sepanjang Tahun Anggaran 2022, dimana revisi terakhir terjadi pada Revisi DIPA ke-8 yang terbit pada tanggal 6 Desember 2022 dengan nilai pagu sebesar Rp68.781.137.000, dimana pagu tersebut berkurang dari pagu sebelumnya yaitu sebesar Rp70.799.902.000. Perubahan pagu anggaran ini disebabkan oleh adanya pengurangan pagu RO Layanan Perkantoran (4194.EBA.994) pada paket pekerjaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang semula Rp36.224.185.000 menjadi Rp34.205.420.000.

2. Penambahan paket kegiatan baru

Terdapat 8 paket kegiatan baru di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu:

- a. Penyusunan Laporan Manajemen Risiko;
- b. Penatausahaan dan Pengelolaan BMN Eks PPDPP;
- c. Penataan Arsip PPDPP;
- d. Operasional Satuan Kerja BLU PPDPP;
- e. Pelaksanaan Renovasi;
- f. Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi pada Satker BA.033.16.631021 Satker BLU PPDPPI; serta
- g. Fasilitasi Audit dan Riviu terhadap Satuan Kerja BLU PPDPP;
- h. Pembiayaan Infrastruktur Kreatif (*Creative Infrastructure Financing* (CreatIFF)).
- 3. Pengelolaan prasarana dan sarana bangunan beserta pengadaan kelengkapannya untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.



- 4. Kebutuhan revitalisasi infrastruktur jaringan untuk meningkatkan kualitas layanan internet Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- Pelaksanaan dan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- Internalisasi dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pasca terbitnya Permen PAN RB No. 44 Tahun 2022 tentang tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- 8. Pelaksanaan reviu SOP Struktural yang telah disusun, dan juga SOP yang terkait dengan tugas Satker, serta dilakukan sosialisasi dan evaluasi untuk perbaikan.





Gambar 4.3 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

b. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi PenyelenggaraanPembiayaan

Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Dalam mendukung Indikator



Kinerja Sasaran Program Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Direktorat Pengembangan Sistem Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan melakukan 2 (dua) survey, yaitu: (1) Tingkat Penerapan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan (2) Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Hasil survey kepada 30 responden menunjukan bahwa Tingkat Penerapan dan Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan cukup memuaskan, meskipun masih di bawah target yang ditetapkan. Hasil dari survey ini untuk melihat outcome dari pengembangan sistem dan strategi penyelenggaraan pembiayaan. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan akan terus meningkatkan capaian Tingkat Kualitas dan Penerapan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di masa mendatang. Capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah dapat dilihat pada Tabel 4.9

Tabel 4.9 Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan	100%	105,25%
	Pengembangan Sistem, Kebijakan dan		
	Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan		
	Infrastruktur Pekerjaan Umum dan		
	Perumahan		

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2022



Isu strategis dalam pelaksanaan kegiatan di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1. Belum adanya pedoman pengelolaan manajemen risiko proyek infrastruktur KPBU PUPR.
- 2. Belum optimalnya penggunaan *Dashboard* Simpul KPBU dalam rangka pemantauan dan evaluasi proyek KPBU bidang PUPR.
- 3. Pengembangan *Dashboard* Simpul KPBU dengan menyajikan hasil analisis *Input-Output* (I-O) untuk mengukur dampak ekonomi dari pembangunan proyek infrastruktur.
- 4. Rendahnya kedalaman analisis terhadap data dan informasi terkait pasar perumahan dan hasil kajian pembiayaan perumahan.
- Belum adanya Surat Edaran tentang penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- 6. Belum maksimalnya pengintegrasian dan pembaharuan *big data* pada HREIS.
- 7. Belum ditetapkannya regulasi tentang Rencana Umum proyek KPBU bidang PUPR periode 2022-2024.





Gambar 4.4 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (Dit. PPISDA) mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Berdasarkan Renstra DJPI 2020-2024, target proyek KPBU sektor SDA yang siap dikerjasamakan pada tahun 2022 adalah sebanyak 2 proyek. Dari target tersebut, berhasil terealisasi sebanyak 5 proyek



terdiri atas 1 proyek *solicited* yaitu Bendungan Bodri dan 4 proyek *unsolicited* yaitu Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW – NTB, Daerah Irigasi Komering, Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok – NTB, serta PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji – Sumatera Selatan. Capaian proyek KPBU sektor SDA yang siap dikerjasamakan pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Proyek KPBU Sektor SDA yang Siap Dikerjasamakan

NO	SEKTOR	TARGET TA. 2022		REALISASI		
NO SEKTOR	SERTOR	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sumber Daya Air	2	1.203.486.000.00 0	5	 Bendungan Bodri Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW – NTB Daerah Irigasi Komering Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok – NTB PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji – Sumatera Selatan 	7.113.956.483.000

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 No: 02/BA/Dp/2022

Capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air jika dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan	25%	25%
	Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur		
	Sumber Daya Air		

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 No: 02/BA/Dp/2022



Secara keseluruhan, terdapat 8 proyek KPBU Sektor SDA pada tahap perencanaan – transaksi, yang terdiri dari 4 proyek *solicited* dan 4 proyek *unsolicited* dengan total biaya investasi sebesar Rp14,39 Triliun.

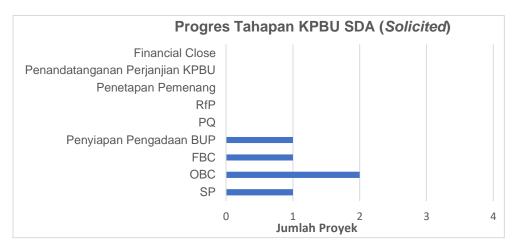


Gambar 4.5 Jumlah Proyek KPBU Sektor SDA

Tabel 4.12 Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor SDA (Solicited)

No	Nama Proyek	Lokasi	Biaya Investasi (Triliun)	Status Tahapan	
Taha	ap Perencanaan				
1	Daerah Irigasi Colo	Jawa Tengah	0,15	Studi Pendahuluan	
Taha	Tahap Penyiapan				
1	PLTM Bendungan Jenelata	Sulawesi Selatan	0,15	Outline Business Case (OBC)	
2	Bendungan Merangin	Jambi	6,36	Final Business Case (FBC)	
Taha	ap Transaksi				
1	Bendungan Bodri	Jawa Tengah	1,74	Penyiapan Pengadaan BUP (Pemenuhan Readiness Criteria)	
	Total Investas	i	8,40		



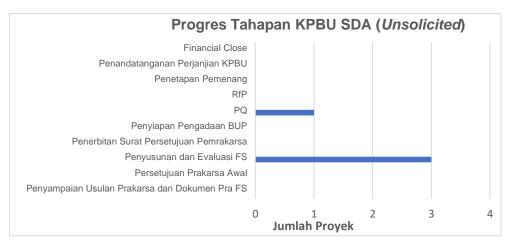


Gambar 4.6 Grafik Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor SDA (Solicited)

Tabel 4.13 Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor SDA (Unsolicited)

No	Nama Proyek	Lokasi	Biaya Investasi (Triliun)	Status Tahapan
Taha	ap Penyiapan			
1	Daerah Irigasi Komering	Sumatera Selatan	1,66	Penyusunan FS
2	Revitalisasi dan Modernisasi Sistem Interkoneksi <i>High</i> <i>Level Diversion</i> (HLD) Wilayah Sungai (WS) Lombok	NTB	2,42	Penyusunan FS
3	PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji	Sumatera Selatan	1,74	Penyusunan FS
Taha	ap Transaksi			
1	Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW	NTB	0,17	Prakualifikasi (PQ)
	Total Investas	i	5,99	





Gambar 4.7 Grafik Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor SDA (Unsolicited)

Isu strategis dalam pelaksanaan proyek KPBU Sektor SDA tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Isu Strategis pada Proyek KPBU Sektor SDA

No.	Isu/Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) untuk infrastruktur sumber daya air tidak termasuk dalam lingkup kerjasama pendanaan dengan badan usaha swasta berdasarkan Pasal 57 ayat (7) dan (8) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	DJPI telah menyampaikan usulan muatan KPBU pada RPP tentang Pengelolaan SDA yang berisikan arahan untuk diakomodasi, dan berkoordinasi dengan lebih lanjut dengan Ditjen SDA.
2	Belum adanya kepastian kapasitas fiskal Ditjen. SDA untuk pembayaran Availability Payment (AP)	DJPI akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Ditjen SDA terkait kapasitas fiskal, dan akan melakukan kajian pemanfaatan mekanisme blended finance untuk menekan pembayaran AP.
3	Kepastian mekanisme pengadaan lahan proyek KPBU yang termasuk PSN yang difasilitasi LMAN	DJPI berkoordinasi dengan KPPIP dan Ditjen SDA terkait pemenuhan persyaratan pengadaan lahan agar dapat difasilitasi oleh LMAN.
4	Tidak ada kepastian tarif listrik dalam PJBL (Perjanjian Jual Beli Listrik) pada proyek KPBU yang memanfaatkan Bendungan Multiguna milik Kementerian PUPR untuk PLTA maupun PLTM	DJPI akan melakukan koordinasi dengan PT PLN dan instansi terkait





Gambar 4.8 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Direktorat PPISDA

d. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Dit. PPIJJ) mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Berdasarkan Renstra DJPI 2020-2024, target proyek KPBU sektor Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan pada tahun 2022 adalah sebanyak 10 proyek. Dari target tersebut berhasil terealisasi sebanyak 10 proyek solicited yaitu Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena (Segmen Mamberamo – Elelim, Jalan Akses *Exit Toll*,



Jalan Tol Cilacap – Yogyakarta, Jalan Tol Demak – Tuban, Jalan Tol Ngawi – Babat, Jalan Tol Jember – Lumajang, Jalan Tol Jember – Situbondo, Jalan Tol Tulungagung – Kepanjen, Jembatan Tanah Bumbu - Pulau Laut, dan Jembatan Muna – Buton.

Capaian proyek KPBU sektor Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan

NO	SEKTOR	TARGET TA. 2022			REALISASI			
	SERIOR	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	JUMLAH PROYEK	N	IAMA PROYEK	NILAI INVESTASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	
1.	Jalan dan Jembatan	10	187.315.000.000.000	10	Ja (Sr Elé 2. Ja 3. Ja Yo 4. Ja 5. Ja 6. Ja Lu 7. Ja Sit 8. Ja Ke 9. Je - F	alan Trans Papua Ruas Iyapura – Wamena egmen Mamberamo – elim Ilan Akses Exit Toll Ilan Tol Cilacap – Dogyakarta Ilan Tol Demak – Tuban Ilan Tol Ngawi – Babat Ilan Tol Jember – Imajang Ilan Tol Jember – Itubondo Ilan Tol Tulungagung – Epanjen Ilan Tol Tanah Bumbu Pulau Laut Ilan Buton	181.173.460.000.000	

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 No: 02/BA/Dp/2022

Capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan jika dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.16.

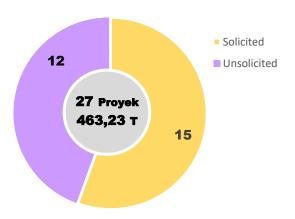
Tabel 4.16 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastuktur Jalan dan Jembatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan	25%	25%
	Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur		
	Jalan dan Jembatan		

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 No: 02/BA/Dp/2022



Secara keseluruhan, terdapat 27 proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan pada tahap perencanaan – transaksi, yang terdiri dari 15 proyek *solicited* dan 12 proyek *unsolicited* dengan total biaya investasi sebesar Rp463,23 Triliun.



Gambar 4.9 Jumlah Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan

Tabel 4.17 Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan (Solicited)

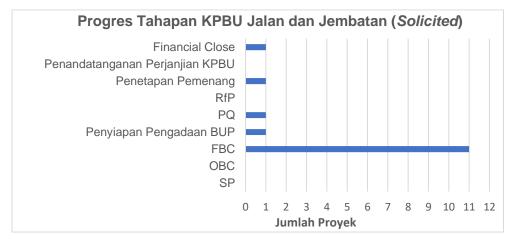
No	Nama Proyek	Lokasi	Biaya Investasi (Triliun)	Status Tahapan		
Taha	p Penyiapan					
1	Jalan Tol Cilacap – Yogyakarta	Jawa Tengah	53,77			
2	Jalan Tol Demak – Tuban	Jawa Tengah	56,58			
3	Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro – Babat*	Jawa Timur	16,83			
4	O&M Jembatan Suramadu <i>bundling</i> dengan Jalan Tol Surabaya <i>Eastern Ring</i> <i>Road</i> (SERR)	Jawa Timur	9,88			
5	Jalan Tol Jember – Lumajang*	Jawa Timur	7,40			
6	Jalan Tol Jember – Situbondo*	Jawa Timur	10,29	FBC		
7	Jalan Tol Tulungagung – Kepanjen*	Jawa Timur	14,52			
8	Jembatan Tanah Bumbu – Pulau Laut*	Kalimantan Selatan	2,46			
9	Jembatan Muna – Buton*	Sulawesi Tenggara	8,30			
10	Jalan Tol Tuban – Babat – Lamongan - Gresik	Jawa Timur	15,28			
11	Jalan Akses Exit Toll	Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi	7,90			



No	Nama Proyek	Lokasi	Biaya Investasi (Triliun)	Status Tahapan
Taha	p Transaksi			
1	Jembatan Batam Bintan	Kep. Riau	14,74	Pemenuhan Readiness Criteria dan Penyiapan Pengadaan BUP
2	Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena (Segmen Mamberamo – Elelim	Papua	3,12	Prakualifikasi (PQ)
3	Jalan Tol Akses Patimban	Jawa Barat	5,03	Penetapan Pemenang Lelang
4	Jalan Tol Yogyakarta – Bawen	Yogyakarta	14,26	Financial Close
	Total Investasi		240,36	

Keterangan:

^{*):} Proyek penundaan proritas setelah tahun 2024

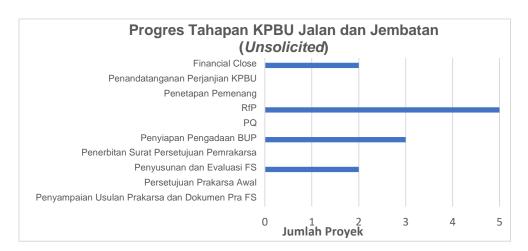


Gambar 4.10 Grafik Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan (Solicited)



Tabel 4.18 Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan (Unsolicited)

No	Nama Proyek	Lokasi	Biaya Investasi (Triliun)	Status Tahapan
Taha	p Penyiapan			
1	Jalan Tol Kohod (Pakuhaji) – Lebakwangi (Neglasari)	Banten	5,45	Penyusunan FS
2	Fly Over Sitinjau Lauik	Sumatera Barat	Dalam Perhitungan	Penyusunan FS
Taha	p Transaksi			
1	Jalan Tol Semanan – Balaraja	Banten	15,53	Penyiapan Pengadaan
2	Jalan Tol Layang Cikunir – Karawaci	Banten	26,15	BUP (Finalisasi
3	Jalan Tol Semarang Harbour (Semarang – Kendal)	Jawa Tengah	18,60	Readiness Criteria)
4	Jalan Tol Kediri – Tulungagung	Jawa Timur	10,26	RfP (Persiapan
5	Jalan Tol Bogor – Serpong via Parung	Jawa Barat	8,95	
6	Jalan Tol Sentul Selatan – Karawang Barat	Jawa Barat	15,38	
7	Jalan Tol JORR Elevated Ruas Cikunir – Ulujami	DKI Jakarta - Jawa Barat	21,57	RfP
8	Jalan Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg	Banten	18,77	RfP
9	Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap	Jawa Barat	57,59	FC
10	Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi	Bali	24,62	FC
	Total Investasi		222,87	



Gambar 4.11 Grafik Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan (*Unsolicited*)



Isu strategis dalam pelaksanaan proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19 Isu Strategis pada Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan

No.	Isu/Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Penundaan prioritas proyek berdasarakan daftar Rencana Umum Ditjen Bina Marga (dokumen tahap penyiapan proyek telah disusun oleh DJPI)	Pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka sinkronisasi timeline proyek antara DJPI dan Ditjen Bina Marga
2	Perubahan trase yang mengakibatkan desain, biaya investasi, dan aspek teknis lainnya berubah dan butuh kajian lebih lanjut	DJPI segera melakukan evaluasi pergeseran trase serta penyesuaian desain dan dokumen studi, dan mengkaji ulang biaya investasi
3	Pengadaan lahan	Kementerian PUPR melakukan koordinasi secara berkala dengan Pemerintah Daerah, dan LMAN untuk percepatan pengadaan lahan
4	Pemenuhan <i>readiness criteria</i> yang membutuhkan waktu cukup lama sehingga mundurnya target transaksi	Penyiapan <i>readiness criteria</i> paralel dengan penyusunan dokumen OBC/FBC
5	Pemrakarsa tidak melanjutkan proses prakarsa (mengundurkan diri) karena proyek tidak layak apabila biaya pengadaan lahan termasuk komponen yang harus diperhitungkan	Proyek akan dilanjutkan dengan skema solicited pada tahun 2023





Gambar 4.12 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastuktur Jalan dan Jembatan

e. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Kinerja dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (Dit. PPP) mendukung tercapainya Program Dukungan Manajemen dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam mendukung Program Dukungan Manajemen, Dit. PPP memiliki Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan.

Berdasarkan Renstra DJPI 2020-2024, target proyek KPBU sektor Perumahan yang siap dikerjasamakan pada tahun 2022 adalah sebanyak 2 proyek. Dari target tersebut, berhasil terealisasi sebanyak 2 proyek *solicited*.



Capaian proyek KPBU sektor Perumahan yang siap dikerjasamakan pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20 Proyek KPBU Sektor Perumahan yang Siap Dikerjasamakan

NO	TARGET TA. 2022 SEKTOR		REALISASI			
	SERIOR	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Perumahan	2	1.800.000.000.000	2	KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung KPBU Rumah Susun Karawang Spuur	1.240.050.000.000

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 No: 02/BA/Dp/2022

Realisasi bantuan pembiayaan perumahan tahun 2022 adalah sebanyak **307.683 rumah tangga**. Detail progres bantuan pembiayaan perumahan dapat dilihat pada Tabel 4.21.

Tabel 4.21 Realisasi Bantuan Pembiayaan Perumahan

NO	BANTUAN PEMBIAYAAN	PAGU	TARGET	REALISASI		
NO	PERUMAHAN	ANGGARAN	UNIT	KEUANGAN	UNIT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	23.000.000.000.000	200.000	25.150.724.329.163	226.000	
2	Subsidi Selisih Bunga (SSA/SSB)*	2.584.031.935.000	769.903	2.570.621.611.769	757.087	
3	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)**	933.676.000.000	200.000	929.980.000.000	225.987	
4	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)	546.970.000.000	13.672	460.903.053.015	11.886	
5	SMF	-	10.000	-	65.263	
6	Tapera	-	100.000	-	4.534	
IZ a t	TOTAL	27.064.677.935.000	323.672	29.112.228.993.947	307.683	

Keterangan: *) Subsidi Selisih Bunga untuk pembayaran penerbitan KPR tahun sebelumnya **) Jumlah unit Subsidi Bantuan Uang Muka tidak termasuk dalam perhitungan total capaian

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 No: 02/BA/Dp/2022

Capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan jika dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.22.



Tabel 4.22 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%	25%
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	49,35%

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 No: 02/BA/Dp/2022

Secara keseluruhan, terdapat 11 proyek KPBU Sektor Perumahan pada tahap perencanaan – transaksi, yang terdiri dari 8 proyek solicited dan 3 proyek unsolicited dengan total biaya investasi sebesar Rp45,50 Triliun. Sektor perumahan menjadi pionir proyek IKN dengan skema KPBU unsolicited. Pada tahun 2022 ini, Menteri PUPR telah menerbitkan 3 (tiga) Letter to Proceed untuk Proyek KPBU IKN, dimana proyek tersebut saat ini dalam tahap Penyusunan Feasibility Study/FS atau Studi Kelayakan yang ditargetkan selesai pada Q1 2023.

3
Unsolicited

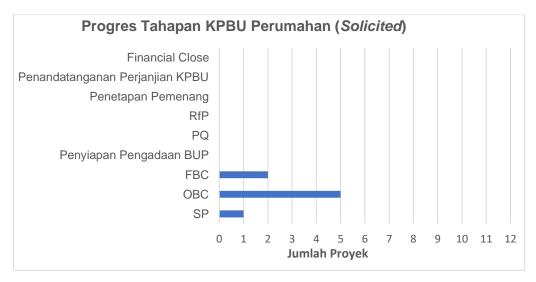
11 Proyek
45,50 T

Gambar 4.13 Jumlah Proyek KPBU Sektor Perumahan



Tabel 4.23 Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Perumahan (Solicited)

No	Nama Proyek	Lokasi	Biaya Investasi (Triliun)	Status Tahapan	
Taha	ap Inisiasi				
1	Rumah Susun Perkotaan Surabaya	Jawa Timur	Dalam Perhitungan	Studi Pendahuluan	
Taha	ap Penyiapan				
1	Rumah Susun Karawang Spuur	Jawa Barat	0,65		
2	Rumah Susun TOD Pasar Jumat- Lebak Bulus	Jakarta	0,61	OBC	
3	Rumah Susun Paldam Siliwangi Bandung	Jawa Barat	0,21		
4	Rumah Susun Daan Mogot	Jakarta	0,72	OBC	
5	Rumah Susun Desa Besar	Sumatera Utara	0,50	(On Hold)	
6	Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung	Jawa Barat	0,59	FBC	
7	Rusunawa Ferintegrasi KEK Sei Mangkei Sumatera Utara		1,1		
	Total Investas	4,38			

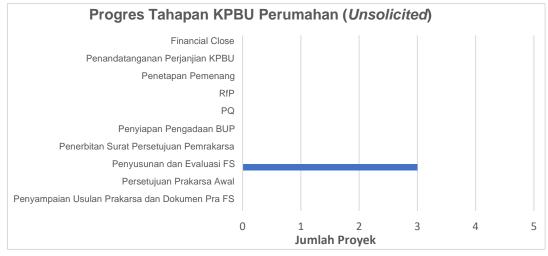


Gambar 4.14 Grafik Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Perumahan (*Solicited*)



Tabel 4.24 Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Perumahan (Unsolicited)

No			Biaya Investasi (Triliun)	Status Tahapan
Tahap	Penyiapan Penyiapan			
1	Rumah Susun ASN – Precint Core WP 1A KIPP IKN		8,65	
2	Rumah Susun ASN - North Government WP 1A KIPP IKN	Kalimantan Timur	1,67	Penyusunan FS
3	Rumah Susun Hankam WP 1A dan Rumah Susun ASN WP 1B		30,80	
	Total Investasi		41,12	



Gambar 4.15 Grafik Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Perumahan (*Unsolicited*)



Isu strategis dalam pelaksanaan proyek KPBU sektor Perumahan dan bidang pembiayaan perumahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.25 Isu Strategis Proyek KPBU Sektor Perumahan

No.	Isu/Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Ketersediaan lahan yang clear and clean	Kementerian PUPR melakukan koordinasi terkait status lahan (BMN) dengan <i>stakeholder</i> terkait
2	Belum efektifnya kelembagaan simpul KPBU dalam mendukung pelaksanaan KPBU	DJPI akan menyelenggarakan Rapat koordinasi Simpul KPBU secara rutin
3	Penentuan Skema Hulu Hilir	DJPI akan melakukan formulasi perhitungan agar nilai jual rumah sesuai dengan ketentuan dan melakukan formulasi penyerapan hunian oleh MBR
4	Legalisasi MoU peralihan kewenangan PJPK antara Menteri PUPR dengan Kepala OIKN pada Proyek KPBU IKN	Penyiapan Kepmen pendelegasian kewenangan PJPK dan pembentukan Panitia KPBU yang melibatkan OIKN
5	Kepastian alokasi AP (<i>Availability Payment</i>) pada tahun 2024 terutama untuk proyek KPBU IKN	Koordinasi dengan Pemrakarsa terkait kebutuhan pembayaran AP di tahun 2024.
6	Rendahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai PJPK	Sosialisasi serta pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala antara DJPI dengan para <i>stakeholder</i> terkait

Tabel 4.26 Isu Strategis Bidang Pembiayaan Perumahan

No.	Isu/Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Ketidaksesuaian antara kualitas bangunan rumah bersubsidi dengan ketentuan yang berlaku	<u>~</u>
2	Akses MBR terutama sektor informal masih terbatas terhadap pembiayaan perumahan	Kajian lebih lanjut oleh DJPI
3	Supply stock rumah bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan MBR	Kajian lebih lanjut oleh DJPI





Gambar 4.16 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (Dit. PPIP) mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Berdasarkan Renstra DJPI 2020-2024, target proyek KPBU sektor Permukiman yang siap dikerjasamakan pada tahun 2022 adalah sebanyak 2 proyek. Dari target tersebut, berhasil terealisasi sebanyak 2 proyek terdiri dengan skema *Business to Business* (BtoB) yaitu Pendampingan Transaksi SPAM Hilir DKI Jakarta (BtoB), dan Pendampingan SPAM Rajeg – Kabupaten Tangerang (BtoB). Capaian



proyek sektor Permukiman yang siap dikerjasamakan pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.27.

Tabel 4.27 Proyek KPBU Sektor Permukiman yang Siap Dikerjasamakan

NO	SEKTOP	TARGET TA. 2022 SEKTOR		REALISASI			
NO	SERTOR	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Permukiman	4	5.570.000.000.000	2	Pendampingan Transaksi SPAM Hilir DKI Jakarta (BtoB); Pendampingan SPAM Rajeg – Kabupaten Tangerang (BtoB)	30.690.000.000.000	

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 No: 02/BA/Dp/2022

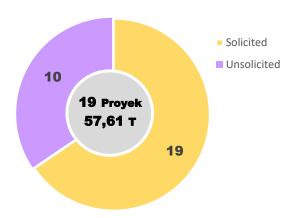
Capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastrukur Permukiman jika dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.28.

Tabel 4.28 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur	25%	24,13%
	Permukiman		

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 No: 02/BA/Dp/2022

Secara keseluruhan, terdapat 29 proyek KPBU Sektor Permukiman pada tahap perencanaan – transaksi, yang terdiri dari 19 proyek solicited dan 10 proyek unsolicited dengan total biaya investasi sebesar Rp57,61 Triliun.



Gambar 4.17 Jumlah Proyek KPBU Sektor Permukiman



Tabel 4.29 Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Permukiman (Solicited)

No	Nama Proyek	Lokasi	Biaya Investasi (Triliun)	Status Tahapan
Taha	ap Perencanaan			
1	SPAM Aceh Besar	Aceh	0,24	Studi
2	SPAM Samosir**	Sumatera Utara	0,20	Pendahuluan
Taha	ap Penyiapan			
1	SPAM Regional Petanglong Sistem Kali Boyo	Jawa Tengah	0,37	
2	SPAM Regional Dadimuria*	Jawa Tengah	0,66	
3	SPAL Zona 8 Marunda**	DKI Jakarta	5,80	OBC
4	TPSA Bakung Bandar Lampung	Lampung	0,67	
5	SPAM Regional Pantura	Jawa Timur	1,58	
6	SPAM Regional Bregas*	Jawa Tengah	0,24	
7	TPA Piyungan	Yogyakarta	1,60	
8	SPAM Regional Karian Serpong Sisi Hilir Kota Tangerang	Banten	Dalam Perhitungan	
9	SPAM Regional Karian Serpong Sisi Hilir Kota Tangerang Selatan	Banten	Dalam Perhitungan	
10	SPAM Regional Wosusokas	Jawa Tengah	0,84	
11	SPAM Regional Jatigede	Jawa Barat	0,29	
12	SPAM Regional Kamijoro	Yogyakarta	0,35	FBC
13	PSEL Tangerang Selatan	Banten	1,69	
14	PSEL Sarbagita***	Bali	2,30	
15	TPA Sampah Manggar	Kalimantan Timur	0,70	FBC
Taha	ap Transaksi			
1	PSEL Jatibarang	Jawa Tengah	2,8	Prakualifikasi (PQ)
2	TPPAS Regional Legok Nangka	Jawa Barat	4	Request for Proposal (RfP)
	Total Investasi	24,33		

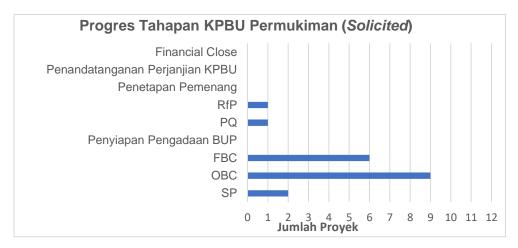
Keterangan:

^{*)} Terindikasi berubah skema pembiayaan

^{**)} On hold

^{***)} Terindikasi batal KPBU



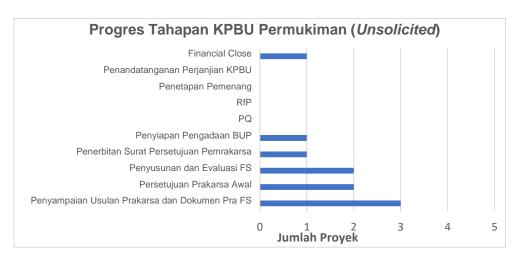


Gambar 4.18 Grafik Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Permukiman (*Solicited*)

Tabel 4.30 Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Permukiman (Unsolicited)

No	Nama Proyek	Lokasi	Biaya Investasi (Triliun)	Status Tahapan
Taha	ap Inisiasi			
1	SPAM Batang	Jawa Tengah	Dalam Perhitungan	Penyampaian
2	SPAM Patimban*	Jawa Barat	0,18	Usulan
3	TPA Regional Mebidangro	Sumatera Utara	7,10	Prakarsa
Taha	ap Penyiapan			
1	SPAM Karian Barat	Banten	1,40	Doroctuiuon
2	SPAM Sindangheula	Banten	Dalam Perhitungan	Persetujuan Prakarsa Awal
3	SPAM Regional Ayung 1 (Sarbagita)	Bali	2,30	Penyusunan FS
4	SPAM Sarbagikung**	Bali	3,20	F5
5	SPAM Jatiluhur II (Djuanda)	Jawa Barat	15,79	Penerbitan Surat Persetujuan Pemrakarsa
Taha	ap Transaksi			
1	SPAM Sinumbra	Jawa Barat	0,88	Penyiapan Pengadaan BUP
2	SPAM Regional Karian-Serpong	DKI Jakarta, Banten	2,43	Financial Close
	Total Investas	i	33,28	





Gambar 4.19 Grafik Progres Tahapan Proyek KPBU Sektor Permukiman (*Unsolicited*)

Isu strategis dalam pelaksanaan proyek KPBU Sektor Permukiman tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.31.

Tabel 4.31 Isu Strategis pada Proyek KPBU Sektor Permukiman

No.	Isu/Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Minimnya pengetahuan pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah terhadap skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Sosialisasi tentang KPBU kepada Pemerintah Daerah
2	Belum adanya pemilihan teknologi pemrosesan sampah yang terjangkau dan tidak membebani kapasitas fiskal daerah dalam proyek KPBU persampahan	Koordinasi antara PJPK dengan para stakeholder terkait mengenai pemilihan teknologi yang tepat
3	Belum ada kepastian ketersediaan dan kesiapan air baku pada proyek SPAM	Rapat koordinasi terkait potensi sumber air baku serta sinkronisasi timeline antara pembangunan sumber air baku dengan penyiapan proyek SPAM
4	Adanya indikasi perubahan usulan skema pembiayaan proyek KPBU	Rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagai PJPK mengenai kelanjutan proyek
5	Pengadaan lahan yang belum clean and clear	Koordinasi antara PJPK dengan stakeholder terkait serta diperlukan penyusunan timeline pengadaan lahan oleh PJPK
6	Kesepakatan tarif air minum	Koordinasi antara PJPK, Pemerintah Daerah, dan PDAM.
7	Lingkup KPBU SPAM yang menjadi satu kesatuan antara sisi hulu dan hilir.	Penyiapan proyek dilakukan dari hulu ke hilir





Gambar 4.20 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

f. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)

Pada tahun 2022, PPDPP sudah tidak menyalurkan program FLPP sesuai sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan No. 111 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari BLU PPDPP kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah, Keputusan Menteri PUPR Nomor 1187/KPTS/M/2021 tentang Pengalihan Fungsi Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Pada Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kepada Badan Pengelola Tabungan



Perumahan Rakyat. Berdasarkan peraturan tersebut, program FLPP bukan lagi tanggung jawab PPDPP sehingga target di tahun 2022 0 (nol) unit.

Kinerja PPDPP tahun 2022 adalah 0%. Hal ini dikarenakan program FLPP telah dialihkan ke BP Tapera sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan No. 111 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari BLU PPDPP kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah. Sedangkan untuk kinerja Dukungan Manajemen kinerja 0% dikarenakan anggaran sebesar Rp19.400.000.000 yang bersumber dari BA.033 diblokir oleh Kemenkeu sehingga seluruh kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Belanja Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2021, Keputusan Menteri Keuangan No.56/KMK.05/2022 tentang Pencabutan Status Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1187/KPTS/M/2021 tentang Pengalihan Fungsi Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Pada Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, maka seluruh kegiatan PPDPP tidak dapat dijalankan.

Selanjutnya, pasca terbitnya Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan pada bulan September 2022, maka secara resmi PPDPP dibubarkan, sehingga pada tahun 2022 kinerja PPDPP adalah 0%.



4.2 PERBANDINGAN KINERJA

Perbandingan kinerja dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tahun 2022 sebagai umpan balik dalam mencapai target kinerja pada tahun 2023. Perbandingan kinerja yang disajikan dalam beberapa aspek, yaitu:

- Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target;
- Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya;
- Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra
- Perbandingan Capaian Kinerja dengan RPJMN; dan
- Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Organisasi/Instansi lainnya.

4.2.1 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target

Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Sasaran Program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan antara tahun 2022 pada Tabel 4.32.

Tabel 4.32 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target DJPI

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KINERJA			
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perdan Aman	SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman					
IKSP. Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	100,00%	95,06%	95,06%			
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
IKSS. Tingkat pemenuhan investasi/ pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan efisien dan efektif	100,00%	107,57%	107,57%			
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan	Tugas Teknis	s Lainnya				
IKSP. Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00%	102,37%	102,37%			

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 No: 02/BA/Dp/2022



Tabel 4.32 menunjukan bahwa pada tahun 2022 capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 95,06%. Capaian Indikator Kinerja Strategis (IKSS) Sasaran Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan efisien dan efektif adalah sebesar 107,57% dan IKSP Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif adalah sebesar 102,37%.

Selain IKSS dan IKSP berikut disampaikan beberapa capaian kinerja DJPI tahun 2022 dibandingkan dengan target, yaitu capaian kinerja KPBU, realisasi anggaran, dan bantuan pembiayaan perumahan.

A. Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBU yang Siap Dikerjasamakan

Berdasarkan Rencana Strategis DJPI tahun 2020-2024, target proyek KPBU yang siap dikerjasamakan pada tahun 2022 adalah sebanyak 18 proyek dengan total nilai investasi Rp195.888.486.000.000. Realisasi proyek KPBU yang siap dikerjasamakan tahun 2022 adalah sebanyak 19 proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp220.217.466.483.000. Capaian tersebut terdiri atas 5 proyek sektor SDA, 10 proyek sektor Jalan dan Jembatan, 2 proyek sektor Perumahan, dan 2 proyek sektor Permukiman. Capaian proyek KPBU yang siap dikerjasamakan dapat dilihat pada Tabel 4.33.



Tabel 4.33 Capaian Proyek KPBU yang Siap Dikerjasamakan

		TAR	GET TA. 2022		REALISASI	
NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sumber Daya Air	2	1.203.486.000.000	5	 Bendungan Bodri Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW – NTB Daerah Irigasi Komering Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok – NTB PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji – Sumatera Selatan 	7.113.956.483.000
2.	Jalan dan Jembatan	10	187.315.000.000.000	10	Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena (Segmen Mamberamo – Elelim Jalan Akses Exit Toll Jalan Tol Cilacap – Yogyakarta Jalan Tol Demak – Tuban Jalan Tol Jember – Lumajang Jalan Tol Jember – Situbondo Jalan Tol Tulungagung – Kepanjen Jembatan Tanah Bumbu – Pulau Laut Jembatan Muna – Buton	181.173.460.000.000
3.	Perumahan	2	1.800.000.000.000	2	KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung KPBU Rumah Susun Karawang Spuur	1.240.050.000.000
4.	Permukiman	4	5.570.000.000.000	2	Pendampingan Transaksi SPAM Hilir DKI Jakarta (BtoB) Pendampingan SPAM Rajeg – Kabupaten Tangerang (BtoB)	30.690.000.000.000
	TOTAL	18	195.888.486.000.000	19		220.217.466.483.000

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 Nomor: 02/BA/Dp/2022

B. Capaian Realisasi Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Total pagu anggaran DJPI tahun 2022 adalah sebesar Rp4.310.325.109.000 yang terdiri dari 2 Bagian Anggaran (BA) yaitu BA. 033 sebesar Rp792.617.174.000 dan BA. 999.07 sebesar Rp3.517.707.935.000. Total realisasi anggaran DJPI tahun 2022 adalah sebesar **Rp4.310.325.109.000** atau sebesar **96,88%** yang terdiri dari BA. 033 sebesar Rp675.074.386.000 (85,17%) dan BA. 999.07 sebesar Rp3.500.601.611.769 (99,51%). Adapun rincian realisasi anggaran DJPI tahun 2022 untuk BA. 003 dapat dilihat pada Tabel 4.34 dan untuk BA. 999.07 dapat dilihat pada Tabel 4.35.



Tabel 4.34 Realisasi Anggaran BA. 033 DJPI Tahun 2022

			Pagu	Realisasi	Keuan	gan (%)		Fisik (%))
No	Kode	Program/Kegiatan	(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	Kinerja (%)
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	564.732.866	478.497.376	100,00	84,73	100,00	85,33	85,33
1	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	564.732.866	478.497.376	100,00	84,73	100,00	85,33	85,33
2	WA	Program Dukungan Manajemen	227.884.308	196.577.010	100	86,26	100	93,72	93,72
2	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	93.431.280	73.138.509	100,00	78,28	79,24	78,47	99,04
3	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	30.069.995	28.977.085	100	96,37	100	97,51	97,51
4	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	104.383.033	95.582.626	100	91,57	100	91,95	91,95
		TOTAL	792.617.174	675.074.386	100	85,17	97,55	85,81	87,97

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 Nomor: 02/BA/Dp/2022

Tabel 4.35 Realisasi Anggaran BA. 999.07 DJPI Tahun 2022

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
	Subsidi Selisih Bunga (SSB)	2.584.031.935.000	2.570.621.611.769	99,48%
2	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)	933.676.000.000	929.980.000.000	99,60%
	TOTAL	4.310.325.109.000	4.175.675.997.769	96,88%

C. Capaian Kinerja Bantuan Pembiayaan Perumahan

Target penyaluran bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2022 yang dihitung berdasarkan target bantuan pembiayaan perumahan FLPP, BP2BT, SMF, dan Tapera yang tertuang pada Renstra DJPI tahun 2020-2024 adalah sebanyak 310.312 rumah tangga. Namun, berdasarkan DIPA tahun 2022, target program BP2BT adalah sebanyak 13.672 rumah tangga, sehingga target penyaluran bantuan pembiayaan perumahan tahun 2022 yang semula 310.312 rumah



tangga berubah menjadi 323.672 rumah tangga. Total realisasi bantuan pembiayaan perumahan adalah sebanyak **307.683 rumah tangga**. Rincian realisasi dari masing-masing bantuan pembiayaan perumahan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.36.

Tabel 4.36 Realisasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2022

NO	BANTUAN PEMBIAYAAN	PAGU	TARGET	REALISASI	
NO	PERUMAHAN	ANGGARAN	UNIT	KEUANGAN	UNIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	23.000.000.000.000	200.000	25.150.724.329.163	226.000
2	Subsidi Selisih Bunga (SSA/SSB) *	2.584.031.935.000	769.903	2.570.621.611.769	757.087
3	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)**	933.676.000.000	200.000	929.980.000.000	225.987
4	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)	546.970.000.000	13.672	460.903.053.015	11.886
5	SMF	=	10.000	•	65.263
6	Tapera	=	100.000	-	4.534
	TOTAL	27.064.677.935.000	323.672	29.112.228.993.947	307.683

Keterangan: *) Subsidi Selisih Bunga untuk pembayaran penerbitan KPR tahun-tahun sebelumnya

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 No: 02/BA/Dp/2022

4.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2022 dengan tahun 2021 akan dilihat perbandingkan pada capaian IKSS dan IKSP, proyek KPBU yang siap dikerjasamakan, bantuan pembiayaan perumahan, dan realisasi anggaran. Perbandingan capaian IKSS dan IKSP dapat dilihat pada Tabel 4.37.

^{**)} Realisasi Unit SBUM tidak dimasukkan ke penjumlahan



Tabel 4.37 Perbandingan Capaian IKSS dan IKSP DJPI Tahun 2022

SASARAN PROGRAM/SASARAN	202	21	2022	2
KEGIATAN/INDIKATOR	REALISASI	KINERJA	REALISASI	KINERJA
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN P	ERMUKIMAN			
IKSS. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	57,09%	99,36%	57,73%	99,50%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Pelayanan Aman	erumahan dan	Permukima	n yang Layak	dan
IKSP. Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	80,37%	80,37%	95,06%	95,06%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
IKSS. Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan efisien dan efektif	111,01%	111,01%	107,57%	107,57%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen da	n Tugas Tekni	s Lainnya		
IKSP. Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	61,60%	61,60%	102,37%	102,37%

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 No: 02/BA/Dp/2022 dan Lakin DJP TA. 2022

Berdasarkan Tabel 4.37, dapat dilihat bahwa capaian DJPI tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Capaian IKSS Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni tahun 2022 adalah sebesar 99,50%, meningkat **0,14%** jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 99,36%. Capaian IKSP Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan tahun 2022 adalah sebesar 95,06%, meningkat 14,69% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 80,37%. Capaian IKSS Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan efisien dan efektif tahun 2022 adalah sebesar 107,57%, turun 3,44% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 111,01%. Capaian IKSP Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif tahun



2022 adalah sebesar 102,37%, **meningkat** signifikan **40,77%** jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 61,60%.

Selanjutnya, perbandingan capaian proyek KPBU yang siap dikerjasamakan dapat dilihat pada Tabel 4.38.

Tabel 4.38 Perbandingan Capaian Proyek KPBU yang Siap Dikerjasamakan Tahun 2021 dengan Tahun 2022

			REALISASI 2021			REALISASI 2022	
NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp.000)	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sumber Daya Air	0		0	5	Bendungan Bodri Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW – NTB Daerah Irigasi Komering Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok – NTB PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji – Sumatera Selatan	7.113.956.483
2.	Jalan dan Jembatan	9	1. Jalan Tol Sentul Selatan – Karawang 2. Jalan Tol Bogor –Serpong via Parung 3. Jalan Tol Semanan – Balaraja 4. Jalan Tol Kediri – Tulungagung 5. Jalan Tol Kamal – Teluk Naga – Rajeg 6. Jalan Tol Akses Patimban 7. Jalan Tol JORR Elevated ruas Cikunir – Ulijami 8. Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap 9. Jalan Tol Malang – Kepanjen	168.701.000.000	10	1. Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena (Segmen Mamberamo – Elelim 2. Jalan Akses Exit Toll 3. Jalan Tol Cilacap – Yogyakarta 4. Jalan Tol Demak – Tuban 5. Jalan Tol Ngawi – Babat 6. Jalan Tol Jember – Lumajang 7. Jalan Tol Jember – Situbondo 8. Jalan Tol Tulungagung – Kepanjen 9. Jembatan Tanah Bumbu – Pulau Laut 10.Jembatan Muna – Buton	181.173.460.000
3.	Perumahan	0	-	0	2	KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung KPBU Rumah Susun Karawang Spuur	1.240.050.000
4.	Permukiman	1	TPPAS Legok Nangka	4.000.000.000	2	Pendampingan Transaksi SPAM Hilir DKI Jakarta (BtoB) Pendampingan SPAM Rajeg Kabupaten Tangerang (BtoB)	30.690.000.000
	TOTAL	10		172.701.000.000	19		220.217.466.483

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 Nomor: 02/BA/Dp/2022

Berdasarkan Tabel 4.38, capaian proyek KPBU yang siap dikerjasamakan tahun 2022 meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun 2021 baik dilihat dari jumlah proyek maupun nilai investasi. Secara jumlah proyek capaian tahun 2022 adalah sebanyak 19 proyek, meningkat sebanyak 9 proyek jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu sebanyak 10 proyek. Jika dilihat dari capaian nilai investasi tahun 2022 adalah sebesar Rp220.217.466.483.000, meningkat sebesar Rp47.520.689.483.000 jika



dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu sebesar Rp 172.701.000.000.000.

Selain perbandingan proyek KPBU, perbandingan capaian bantuan pembiayaan perumahan antara tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.39.

Tabel 4.39 Perbandingan Capaian Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021 dengan Tahun 2022

NO	DANTHAN DEMOLAYAAN DEDUMAHAN	REALI	SASI
NO	BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	2021	2022
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	178.728	226.000
2	Subsidi Selisih Bunga (SSA/SSB) *	767.605	757.087
3	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)**	176.705	225.987
4	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)	11.999	11.886
5	SMF	13.329	65.263
6	Tapera	389	4.534
	TOTAL	204.445	307.683

Keterangan: *) Subsidi Selisih Bunga untuk pembayaran penerbitan KPR tahun- tahun sebelumnya

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 Nomor: 02/BA/Dp/2022

Selanjutnya perbandingan realisasi anggaran DJPI tahun 2022 dengan tahun 2021 dilihat berdasarkan realisasi anggaran pada BA. 033 dan BA. 999.07.

BA. 033

BA. 003 merupakan mata anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan, Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, dan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Total realisasi anggaran tahun 2022 pada BA. 003 adalah sebesar 85,17%, **turun 10,79%** jika dibandingkan dengan

^{**)} Realisasi Unit SBUM tidak dimasukkan ke penjumlahan



realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 95,96%. Hal ini karena pada tahun 2022 terdapat pemblokiran anggaran operasional BLU PPDPP oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp19.400.000.000, selain itu tidak tercapainya target BP2BT yaitu sebesar 86,93% dari 100%. Rincian perbandingan realisasi BA.003 dapat dilihat pada Tabel 4.40.

Tabel 4.40 Perbandingan Realisasi Anggaran BA. 033 Tahun 2021 dengan Tahun 2022

NO	K a da	Dua amana Manciatan	Realisasi 2	2021	Realisasi 20	22
NO	Kode	Program/Kegiatan	Rp. 000	%	Rp. 000	%
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	541.772.420	99,32	478.497.376	84,73
1	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	541.772.420	99,32	478.497.376	84,73
2	WA	Program Dukungan Manajemen	217.813.990	88,51	196.577.010	86,26
2	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	115.534.475	91,90	73.138.509	78,28
3	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	27.878.008	85,14	28.977.085	96,37
4	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	74.401.507	84,92	95.582.626	91,57
	TOTAL		759.586.409	95,96	675.074.386	85,17

Sumber: https://emonitoring.pu.go.id/ (31 Desember 2022)

BA. 999.07

BA. 999.07 merupakan mata anggaran untuk penyaluran SSB dan SBUM. Pada tahun 2021 dan 2022, anggaran SSB dialokasikan untuk pembayaran penerbitan KPR tahun-tahun sebelumnya, tidak ada akad baru. Total anggaran BA. 999.07 untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp3.517.707.935.000 yang terbagi untuk penyaluran SSB sebesar Rp2.584.031.935.000 dan SBUM sebesar Rp933.676.000.000. Realisasi penyaluran SSB tahun 2022 adalah sebesar Rp2.570.621.611.769 (99,48%) dan untuk penyaluran SBUM sebesar Rp929.980.000.000 (99,60%). Secara keseluruhan total realisasi BA. 999.07 tahun 2022 adalah sebesar Rp3.500.601.611.769 (99,51%), meningkat 53,30% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 vaitu sebesar



Rp3.048.605.580.687 (46,21%). Rincian perbandingan realisasi BA.999.07 dapat dilihat pada Tabel 4.41.

Tabel 4.41 Perbandingan Realisasi Anggaran BA.999.07 Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	Kegiatan		2021		2022				
	rtogiatari	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%		
1	Subsidi Selisih Bunga (SSA/SSB)	5.881.806.849.000	2.333.703.580.687	39,68%	2.584.031.935.000	2.570.621.611.769	99,48%		
2	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)	715.000.000.000	714.902.000.000	99,99%	933.676.000.000	929.980.000.000	99,60%		
	TOTAL	6.596.806.851.021	3.048.605.580.687	46,21%	3.517.707.935.000	3.500.601.611.769	99,51%		

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 Nomor: 02/BA/Dp/2022

4.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra

Dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPI 2020-2024 telah ditetapkan target pencapaian Program dan Kegiatan DJPI selama 5 tahun kedepan. Perbandingan capaian dihitung berdasarkan nilai capaian rata-rata tahun 2020-2024 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra DJPI tahun 2020-2024. Perbandingan capaian kinerja IKSS dan IKSP tahun 2022 terhadap target Renstra dapat dilihat pada Tabel 4.42.



Tabel 4.42 Perbandingan Capaian Kinerja IKSS dan IKSP terhadap Renstra 2020-2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN	TAR	GET RE	NSTRA 2	020-2024	4 (%)		RE	ALISASI	(%)	
KEGIATAN/INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PERUMAHAN DAN K	AWASAN	N PERMU	JKIMAN							
IKSS. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	56,86	57,46	58,02	58,71	59,48	56,66	57,09	57,73	-	-
SP. Meningkatnya Pelayanan Infr	astruktu	r Perum	ahan dar	n Permul	kiman ya	ing Laya	k dan Ar	nan		
IKSP. Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	100	100	100	100	100	70,88	80,37	95,06	1	-
PROGRAM DUKUNGAN MANAJE	MEN									
IKSS. Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan efisien dan efektif	100	100	100	100	100	116,88	111,01	107,57	•	-
SP. Meningkatnya Dukungan Mai	najemen	dan Tug	as Tekn	is Lainny	/a					
IKSP 1. Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100	100	100	100	100	98,93	61,60	102,37	-	-
IKSP 2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	55,92	63,35	71,54	79,26	84,12	55,50	63,35	60,37	-	-

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 Nomor: 02/BA/Dp/2022

- Perbandingan Kinerja Program Perumahan dan Kawasan
 Permukiman dengan Target Renstra 2020-2024
 - Kinerja IKSS Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni tahun 2020-2022 telah mencapai 59,02% dari target Renstra. Capaian kinerja tahun 2020-2022 bersifat progresif, mengalami peningkatan setiap tahunnya.
 - Kinerja IKSP Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan tahun 2020-2022 telah



mencapai 49,26% dari target Renstra 100%. Capaian kinerja tahun 2020-2022 bersifat progresif, mengalami peningkatan setiap tahunnya.

- Perbandingan Kinerja Program Dukungan Manajemen dengan Target Renstra 2020-2024
 - Kinerja IKSS Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan efisien dan efektif tahun 2020-2022 telah mencapai 67,09% dari target Renstra 100%.
 - Kinerja IKSP Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif tahun 2020-2022 telah mencapai 52,58% dari target Renstra 100%.
 - 3. Kinerja IKSP Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya telah mencapai 50,60% dari target Renstra. Salah satu penyebab rendahnya kinerja pada IKSP ini karena pada tahun 2022 terdapat 2 indikator yang capaiannya 0% yaitu Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP dan Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP, mengingat PPDPP telah dibubarkan sehingga 2 indikator tersebut tidak tercapai.

Dalam mendukung tercapainya IKSS Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni, DJPI berkontribusi terhadap penyaluran bantuan pembiayaan perumahan yaitu FLPP, SSB, BP2BT, SMF, dan Tapera. Perbandingan capaian penyaluran bantuan pembiayaan perumahan terhadap target Renstra dapat dilihat pada Tabel 4.43.



Tabel 4.43 Perbandingan Capaian Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Target Renstra 2020-2024

PENYALURAN BANTUAN	Target Renstra 2020-2024 (Rumah Tangga)							Capaian (Rumah Tangga)					
PEMBIAYAAN PERUMAHAN	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	TOTAL			
FLPP	102.500	157.500	200.000	220.000	220.000	900.000	109.253	178.728	226.000	513.981			
SSB	175.000	100.000	-	-	-	275.000	90.362	-	-	90.362			
BP2BT	31.823	39.684	312	-	-	71.819	1.357	11.999	11.886	25.242			
SMF	8.460	10.000	10.000	10.000	11.540	50.000	8.460	13.329	65.263	87.052			
Tapera	50.000	75.000	100.000	125.000	150.000	500.000	1	389	4.534	4.923			
TOTAL	367.783	382.184	310.312	355.000	381.540	1.796.819	209.432	204.445	307.683	721.560			

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 Nomor: 02/BA/Dp/2022

Berdasarkan Tabel 4.43, capaian penyaluran pembiayaan perumahan tahun 2020-2022 adalah sebanyak 721.560 rumah tangga atau telah mencapai **40,16%** dari target Renstra 2020-2024 sebanyak 1.796.819 rumah tangga. Penerapan inovasi baru terkait pembiayaan perumahan dibutuhkan agar dapat mencapai target Renstra.

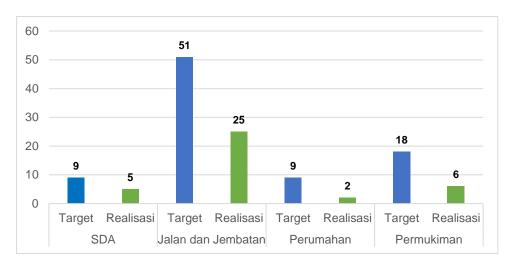
Selain penyaluran pembiayaan perumahan, DJPI juga mempunyai tugas mengembangkan skema pembiayaan KPBU. Perbandingan capaian proyek KPBU terhadap Renstra 2020-2024 yang dapat dilihat pada Tabel 4.44, dan perbandingan capaian KPBU per sektor dapat dilihat pada Gambar 4.21.

Tabel 4.44 Perbandingan Capaian Proyek KPBU yang Siap Dikerjasamakan dengan Target Renstra 2020-2024

PROYEK KPBU	Target Renstra 2020-2024 (Proyek)							Capaian (Proyek)					
YANG SIAP DIKERJASAMAKAN	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	TOTAL			
Sektor Sumber Daya Air	1	2	2	2	2	9	-	-	5	5			
Sektor Jalan dan Jembatan	4	13	10	12	12	51	6	9	10	25			
Sektor Perumahan	1	2	2	2	2	9	-	-	2	2			
Sektor Permukiman	3	4	4	4	3	18	3	1	2	6			
TOTAL	9	21	18	20	19	87	9	10	19	38			

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2022 Nomor: 02/BA/Dp/2022





Gambar 4.21 Grafik Perbandingan Capaian Proyek KPBU
Tiap Sektor dengan Target Renstra

Berdasarkan Tabel 4.44, capaian proyek KPBU yang siap dikerjasamakan tahun 2020-2022 adalah sebanyak 38 proyek atau telah mencapai **43,68%** dari target Renstra yaitu sebanyak 87 proyek. Capaian KPBU per sektor tahun 2020-2022 dengan target Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Sektor Sumber Daya Air sebesar 55,56%;
- Sektor Jalan dan Jembatan sebesar 49,02%;
- Sektor Perumahan sebesar 22,22%; dan
- Sektor Permukiman sebesar 33,33%.

4.2.4 Perbandingan Dengan RPJMN

Berdasarkan matriks pembangunan RPJMN 2020-2024, DJPI mendukung Kegiatan Prioritas (KP) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau serta Proyek Prioritas Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan. Adapun perbandingan kinerja bantuan pembiayaan perumahan dengan target Kegiatan Prioritas pada RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.45.



Tabel 4.45 Perbandingan Kinerja Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Target Kegiatan Prioritas RPJMN 2020-2024

		•	Target RPJ	IMN 2020-2	024 (Ruma	ah Tangga)	Ca	paian (Rur	nah Tangg	ga)	Vinania
KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS (KP)	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	TOTAL	Kinerja (%)
KP : Penyediaan Akses Perumahan dan	Jumlah rumah tangga berpendapatanrendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Läkulditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (rumah tangga)	112.500	216.154	200.000	220.000	220.000	968.654	109.253	178.728	226.000	513.981	53,06%
	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan, termasuk SMF dan TAPERA (rumah tangga)	58.460	85.000	110.000	135.000	161.540	550.000	8.460	13.718	69.797	91.975	16,72%

Berdasarkan Tabel 4.45, dapat dilihat bahwa perbandingan kinerja bantuan pembiayaan perumahan DJPI terhadap target RPJMN 2020-2024 pada Kegiatan Prioritas Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau adalah sebagai berikut:

- 1. Capaian Indikator Kegiatan Prioritas (IKP): Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2020-2022 adalah sebanyak 513.981 rumah tangga atau telah mencapai 53,06% dari target RPJMN 2020-2024 yaitu sebanyak 968.654 rumah tangga. Dalam hal ini capaian kinerja yang diperhitungkan adalah capaian penyaluran FLPP.
- 2. Capaian IKP: Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan, termasuk SMF dan TAPERA tahun 2020-2022 adalah sebanyak 91.975 rumah tangga atau telah mencapai 16,72% dari target RPJMN 2020-2024 yaitu sebanyak 550.000 rumah tangga. Penyebab rendahnya capaian kinerja pada IKP ini karena penyaluran TAPERA terealisasi mulai tahun 2021.

Selanjutnya, untuk perbandingan kinerja bantuan pembiayaan perumahan terhadap target Proyek Prioritas (ProP) Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dapat dilihat pada Tabel 4.46.



Tabel 4.46 Perbandingan Kinerja Bantuan Pembiayaan Perumahan terhadap Target Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024

PROYEK PRIORITAS	INDIKATOR	1	Farget RP.	JMN 2020-2	:024 (Ruma	ah Tangga)	Ca	paian (Rur	nah Tangg	ја)	Kinerja
PROTER PRIORITAS	INDIRATOR	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	(%)			
ProP : Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (rumah tangga)	102.812	225.842	200.000	220.000	220.000	968.654	200.972	190.727	237.886	629.585	65,00%
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan (rumah tangga)	58.460	85.000	110.000	135.000	161.540	550.000	8.460	13.718	69.797	91.975	16,72%
Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah rumah tangga yang terlayani bantuan pembiayaan perumahan melalui BP2BT, SBUM dan Penyelesaian SSB (rumah tangga)	312	68.342	-	-	-	68.654	91.719	11.999	11.886	115.604	168,39%
Bantuan Pembiayaan Perumahan melalui TA PERA	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan (rumah tangga)	50.000	75.000	100.000	125.000	150.000	500.000	1	389	4.534	4.923	0,98%
Fasilitas Pembiayaan Perumahan melalui PT. SMF	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan (rumah tangga)	8.460	10.000	10.000	10.000	11.540	50.000	8.460	13.329	65.263	87.052	174,10%
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan FLPP (rumah tangga)	102.500	157.500	200.000	220.000	220.000	900.000	109.253	178.728	226.000	513.981	57,11%

Berdasarkan Tabel 4.46, dapat dilihat bahwa perbandingan kinerja bantuan pembiayaan perumahan DJPI terhadap target RPJMN 2020-2024 pada Proyek Prioritas Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

- Capaian Indikator ProP: Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2020-2022 adalah sebanyak 629.585 rumah tangga atau telah mencapai 65,00% dari target RPJMN 2020-2024 yaitu sebanyak 968.654 rumah tangga. Dalam hal ini capaian kinerja yang diperhitungkan adalah capaian penyaluran FLPP, BP2BT, dan SSB.
- 2. Capaian Indikator ProP: Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan tahun 2020-2022 adalah sebanyak 91.975 rumah tangga atau telah mencapai 16,72% dari target RPJMN 2020-2024 yaitu sebanyak 550.000 rumah tangga. Penyebab rendahnya capaian kinerja pada indikator ProP ini karena penyaluran TAPERA terealisasi mulai tahun 2021.

Berdasarkan capaian kinerja bantuan pembiayaan perumahan DJPI tahun 2020-2022 terhadap target Kegiatan Prioritas maupun Proyek Prioritas



yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, DJPI akan terus melakukan upaya percepatan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dalam rangka meningkatkan akses dan keterjangkauan MBR terhadap rumah layak huni.

Perbandingan Kinerja Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) RPJMN 2020-2024

Kementerian PUPR turut berkontribusi dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) berdasarkan RPJMN 2020-2024 melalui pelaksanaan yang didanai oleh APBN dan KPBU. Saat ini, proyek KPBU yang tercantum dalam *Major Project* RPJMN tahun 2020-2024 belum memasuki tahap konstruksi. Berikut merupakan proyek KPBU yang merupakan kewenangan DJPI dalam mendukung capaian *Major Project* RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Wilayah Batam-Bintan

Proyek KPBU Jembatan Batam-Bintan merupakan proyek kewenangan DJPI untuk mendukung *Major Project* Pembangunan Wilayah Batam-Bintan. Status proyek saat ini adalah persiapan Transaksi KPBU. Tahap transaksi ditargetkan dilaksanakan pada tahun 2023, dan konstruksi pada tahun 2024.

2. 18 Waduk Multiguna

Dari 18 Waduk Multiguna yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 6 proyek yang menggunakan skema KPBU. Namun, hanya Bendungan Merangin yang saat ini dilaksanakan dengan skema KPBU, 4 proyek lainnya tidak dilanjutkan dengan skema KPBU yaitu: Bendungan Saka Gilas, Bendungan Krekeh, Bendungan Pasir Kopo, dan Bendungan Kusan, serta 1 proyek dalam tahap kajian lebih lanjut oleh PT. PLN. Adapun penjelasan proyek Waduk Multiguna yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.47.



Tabel 4.47 Penjelasan Proyek Waduk Multiguna yang Tercantum dalam RPJMN 2020-2024

No	Nama	Keterangan					
NO	Bendungan	Neteranyan					
1	Bendungan Merangin	Dalam Tahap Penyiapan KPBU, saat ini sedang penyusunan FBC dilaksanakan melalui fasilitasi PDF					
2	Bendungan Muara Juloi	 a. Ditjen. SDA telah menyusun Kajian Prastudi Kelayakan Proyek KPBU Bendungan Muara Juloi pada tahun 2018 dan akan dilakukan review oleh DJPI b. Terdapat disposisi dari Menteri PUPR agar Bendungan Muara Juloi "dijual" melalui skema KPBU berdasarkan Nota Dinas Dirjen SDA kepada Menteri PUPR Nomor: 18/ND/Da/2022 tanggal 25 Januari 2022 perihal Penyampaian Kegiatan Engineering Services for Muara Juloi Multipurpose Dam Project di Kalimantan Tengah c. Menteri PUPR telah menyampaikan surat kepada Menteri ESDM Nomor: SA.04.03-Mn/324 tanggal 23 Februari 2022 Perihal Rencana Pembangunan Bendungan Muara Juloi di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dimana Kementerian PUPR mengusulkan konstruksi Bendungan Muara Juloi untuk dilaksanakan oleh Kementerian ESDM d. Menteri ESDM telah menyampaikan surat kepada Direktur Utama PT. PLN (Persero) Nomor: T-118/EK.03/MEM.E/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Usulan Pembangunan Bendungan Muara Juloi, dimana Kementerian ESDM mengharapkan agar PT. PLN dapat melakukan kajian lebih lanjut terkait kondisi sistem termasuk rencana supply dan demand listrik di Kalimantan Tengah dan sekitarnya sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk memasukkan potensi PLTA di Bendungan Muara Juloi dalam daftar rencana pembangunan pembangkit pada dokumen RUPTL PT. PLN selanjutnya 					
3	Bendungan Saka Gilas	 a. Penyiapan KPBU Bendungan Saka Gilas tidak dilanjutkan karena pembangunan Bendungan Saka Gilas direncanakan dilaksanakan melalui loan berdasarkan informasi dari Ditjen. SDA b. Bendungan Saka Gilas diganti dengan Bendungan Warsamson berdasarkan Surat Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Ditjen. SDA kepada Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, DJPI Nomor: SA.0301-Aj/133 tanggal 19 Maret 2020 Perihal Penyampaian Daftar Proyek 					



No	Nama Bendungan	Keterangan
		Bidang SDA 2020-2024 dengan Kebutuhan Pendanaan Tinggi untuk Pertimbangan Pendanaan KPBU
4	Bendungan Krekeh	Bendungan Krekeh tidak diusulkan oleh Ditjen. SDA untuk dilaksanakan melalui skema KPBU dan berdasarkan informasi dari BWS Nusa Tenggara I: a. Bendungan Krekeh saat ini sedang dalam proses sertifikasi desain dan proses pembebasan tanah sedang dalam proses pembahasan melalui sharing Pemda dan APBN b. Dikarenakan adanya arahan Menteri PUPR tidak ada usulan baru di 2024, maka kemungkinan dapat masuk di rencana pembangunan TA. 2025
5	Bendungan Pasir Kopo	Penyiapan KPBU Bendungan Pasir Kopo tidak dilanjutkan karena terdapat penolakan dari Bupati Lebak berdasarkan Surat Bupati Lebak kepada Bapak Presiden RI, Menteri PUPR, Gubernur Banten, dan Kepala BBWS C3 Nomor: 611.11/3607-PEM/2020 tanggal 23 Oktober 2020 Perihal Penolakan Rencana Pembangunan Bendungan Pasir Kopo di Kecamatan Leuwidamar
6	Bendungan Kusan	Penyiapan KPBU Bendungan Kusan tidak dilanjutkan karena Bendungan Kusan berada di Wilayah Sungai kewenangan provinsi dan tidak terdapat permohonan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar pelaksanaan KPBU dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat

3. Ibu Kota Negara (IKN)

Dalam mendukung pembangunan IKN, DJPI turut berkontribusi terhadap pembangunan IKN dengan pembiayaan melalui skema KPBU. Menteri PUPR telah menerbitkan 3 (tiga) *Letter to Proceed* untuk Proyek KPBU IKN, dimana proyek tersebut saat ini dalam tahap Penyusunan *Feasibility Study* (FS). Adapun target ketiga proyek tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.48 Target Proyek KPBU IKN sektor Perumahan yang Mendukung *Major Project* RPJMN: Ibu Kota Negara (IKN)

No	Proyek KPBU	Km/Luas Lahan/Jumlah	2020-2023	2024
1	Rumah Susun ASN – Precint Core WP 1A KIPP IKN	23 Tower	Transaksi-Konstruksi	Konstruksi-Operasi
2	Rumah Susun Hankam WP 1A dan Rumah Susun ASN WP 1B	155 Tower	Transaksi-Konstruksi	Konstruksi-Operasi
3	Rumah Susun ASN - North Government WP 1A KIPP IKN	6 Tower	Transaksi-Konstruksi	Konstruksi-Operasi



4. Jalan Trans Papua Merauke - Sorong

Dalam rangka meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah perdalaman, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua, DJPI turut berkontribusi terhadap pembangunan Jalan Trans Papua pada Ruas Jayapura – Wamena (Segmen Mamberamo – Elilim) melalui skema KPBU. Selain itu, pembangunan Jalan Trans Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan nasional sesuai RPJMN 2020-2024 dan visium Kementerian PUPR. Jalan Trans Papua Mamberamo – Elilim sepanjang 50,14 km dengan biaya investasi Rp3,12 Triliun. Saat ini progres proyek KPBU Jalan Trans Papua yaitu dalam tahap Prakualifikasi. Penetapan pemenang lelang ditargetkan dilaksakana pada Q2 2023, dan Penandatanganan Perjanjian KPBU pada Q3 2023.

5. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)

Dalam rangka meningkatkan akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%, DJPI turut berkontribusi terhadap pembangunan SPAM melalui skema KPBU. Adapun progres proyek KPBU SPAM dapat dilihat pada Tabel 4.49.

Tabel 4.49 Proyek KPBU SPAM yang Mendukung *Major Project* RPJMN: Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)

No	Proyek KPBU	Kapasitas	2020-2023	2024
1	SPAB Kuwil Terintegrasi dengan SPAM Regional Bimatara	500 liter/detik	Penyiapan (FBC)	Penyiapan (FBC)
2	SPAM Ayung I (SPAB Sidan)	1.750 liter/detik	Penyiapan (FBC)	Penyiapan (FBC)
3	SPAM Bitung	300 liter/detik	Penyiapan (OBC)	Penyiapan (FBC)
4	SPAM Regional Sindangheula	800 liter/detik	Penyiapan (FBC)	Transaksi
5	SPAM Regional Karian Barat	1.500 liter/detik	Penyiapan (FBC)	Transaksi
6	SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II [DKI Jakarta + Jabar (Kab Bekasi dan Kota Bekasi)}	5.000 liter/detik	Penyiapan-Transaksi	Transaksi-Financial Close
7	SPAM Sinumbra	1.250 liter/detik	Transaksi	Transaksi-Financial Close
8	SPAM Regional Karian-Serpong	4.600 liter/detik	Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan Financial Close	/Konstruksi
9	SPAM Umbulan	4000 liter/detik	Operasi	Operasi
10	SPAM Semarang Barat	1.050 liter/detik	Operasi	Operasi
11	SPAM Kota Pekanbaru	750 liter/detik	Operasi	Operasi
12	SPAM Kota Bandar Lampung	1.575 liter/detik	Operasi	Operasi

Sumber: Usulan Proyek KPBU TA. 2024 dan hasil Trilateral Meeting dengan Kementerian PPN/BAPPENAS



6. Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa

Dalam rangka mengurangi dampak banjir rob serta penurunan muka tanah yang sering terjadi kota Semarang, DJPI turut berkontribusi dalam pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang akan terintegrasi dengan konstruksi tanggul laut. Saat ini, Jalan Tol Semarang-Demak telah beroperasi sebagian seksi yaitu pada Seksi 2 dan sebagian lainnya dalam tahap konstruksi.

Tabel 4.50 Proyek KPBU Jalan Tol yang Mendukung *Major Project* RPJMN: Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa

Proyek KPBU	Km	2020-2023	2024
Jalan Tol Semarang	27 km	Operasi Sebagian	Operasi Sebagian
Demak		(Seksi 2)	(Konstruksi Seksi 1)

7. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh, DJPI turut berkontribusi dalam Rumah Susun dengan skema KPBU.

Tabel 4.51 Proyek KPBU Rumah Susun yang Mendukung *Major Project* RPJMN: Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)

No	Proyek KPBU	Luas/Jumlah	2020-2023	2024
1	Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus)	16.159 m2	FBC	Transaksi-Financial Close
2	Rusun Kota Surabaya-Medokan Ayu	93.705 m2	FBC	Transaksi-Financial Close
3	Rusun Desa Besar	59.000 m2	Review OBC-FBC	Transaksi-Financial Close
4	Rusun Daan Mogot	47.599 m2	Review OBC-FBC	Transaksi-Financial Close
5	Rusun Kota Magelang		SP+OBC	FBC
6	Rusun Perkotaan Sumatera Selatan		SP+OBC	FBC
7	Rusun Cisaranten Bina Harapan	31.276 m2	Transaksi-Financial Close	Konstruksi
8	Rusun Terintegrasi KEK Sei Mangkei	3.300 m2	Transaksi-Financial Close	Konstruksi
9	Rusun Karawang Spuur	19.000 m2	FBC-Transaksi	Financial Close + Konstruksi



4.2.5 Perbandingan Dengan Unit Organisasi/Instansi Lainnya

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diperlukan perbandingan kinerja dengan Unit Organisasi yang setara. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) melakukan perbandingan kinerja dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Kedua instansi ini memiliki kesamaan terkait program pembiayaan KPBU. Kinerja KPBU DJPI diukur melalui capaian Indikator Kinerja Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif, sedangkan capaian Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan diukur melalui Indikator Kinerja Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan.

Capaian kinerja KPBU DJPI tahun 2022 adalah sebesar 102,37%, dihitung berdasarkan jumlah proyek KPBU yang siap dikerjasamakan. Capaian kinerja KPBU Sekjen Kementerian Perhubungan tahun 2022 adalah sebesar 100%, dihitung berdasarkan jumlah fasilitasi proyek KPBU yang ditindaklanjuti/ditandatangani.

Berdasarkan perbandingan di atas, capaian kinerja DJPI lebih tinggi daripada Sekjen Kementerian Perhubungan. Rincian perbandingan capaian dapat dilihat pada Tabel 4.52.

Tabel 4.52 Perbandingan Kinerja KPBU antara DJPI dan DJPPR

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KINERJA						
Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan									
Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100%	102,37%	102,37%						
Sekjen Kementerian Perhubungan									
Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	85%	85%	100%						



4.3 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengelola 2 mata anggaran, yaitu BA.033 dan BA.999.07.

A. BA. 033

Pagu BA. 033 Tahun Anggaran 2022 setelah dilakukan revisi adalah sebesar Rp792.617.174.000. Penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp675.074.386.000** atau sebesar **85,17%** dengan realisasi fisik 85,81%. Rincian realisasi masing-masing Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

- Realisasi Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan pagu anggaran Rp773.217.174.000,00, pada akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp675.074.386.000,00 (87,31%) dengan realisasi fisik 88,10%.
- Realisasi Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan dengan pagu anggaran Rp19.400.000.000,00, pada akhir Tahun Anggaran 2022 adalah 0%. Hal ini dikarenakan anggaran sebesar Rp19.400.000.000,00 yang bersumber dari BA.033 diblokir oleh Kemenkeu sehingga seluruh kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Belanja Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2021, Keputusan Menteri Keuangan No.56/KMK.05/2022 tentang Pencabutan Status Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1187/KPTS/M/2021 tentang Pengalihan Fungsi Pengelolaan Dana



Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Pada Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, maka seluruh kegiatan PPDPP tidak dapat dijalankan. Selanjutnya, pasca terbitnya Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan pada bulan September 2022, maka secara resmi PPDPP dibubarkan, sehingga pada tahun 2022 kinerja PPDPP adalah 0%.

Tabel 4.53 Realisasi Per Kegiatan

			Pagu	Realisasi	Keuang	jan (%)		Fisik (%)		
NO	Kode	Program/Kegiatan	(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	Kinerja (%)	
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	564.732.866	478.497.376	100,00	84,73	100,00	85,33	85,33	
1	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	564.732.866	478.497.376	100,00	84,73	100,00	85,33	85,33	
2	WA	Program Dukungan Manajemen	227.884.308	196.577.010	100	86,26	100	93,72	93,72	
2	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	93.431.280	73.138.509	100,00	78,28	79,24	78,47	99,04	
3	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	30.069.995	28.977.085	100	96,37	100	97,51	97,51	
4	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	104.383.033	95.582.626	100	91,57	100	91,95	91,95	
		TOTAL	792.617.174	675.074.386	100	85,17	97,55	85,81	87,97	

Sumber: emonitoring.pu.go.id (status: 31 Desember 2022)

B. BA. 999.07

Mata anggaran BA. 999.07 dikelola oleh Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan total anggaran sebesar Rp3.517.707.935.000 yang dialokasikan untuk penyaluran Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp2.584.031.935.000 dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp933.676.000.000.

Pada tahun 2022, anggaran SSB hanya digunakan untuk pembayaran penerbitan KPR tahun sebelumnya, sehingga tidak ada penerbitan



akad baru dengan realisasi Rp2.570.621.611.769 (99,48%). Realisasi SBUM sebesar Rp929.980.000.000 (99,60%) untuk menyalurkan 225.987 rumah tangga. Total realisasi keuangan untuk BA. 999.07 adalah sebesar Rp3.500.601.611.769 atau sebesar 99,51%.

4.4 ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah menerapkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022. Efektivitas merupakan hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Efisiensi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan target sesuai jangka waktu, serta hasil yang diharapkan. Suatu proses organisasi dinyatakan efisien bila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well).

Upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja yaitu:

- a. Mendorong digitalisasi keterpaduan pelaporan dan inputing data kinerja serta pertanggungjawaban anggaran pada sistem informasi eksisting, antara lain: Krisna Bappenas-Kemenkeu, Sakti Kemenkeu, i-eMonitoring PUPR, SiRUP-LPSE LKPP, e-Sakip PUPR dan Smart DJA Kemenkeu.
- b. Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet, serta mengoptimalkan ruang rapat kerja yang tersedia di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk pelaksanaan kegiatan rapat secara luring.



- c. Mengupayakan penggunaan kertas bekas untuk mencetak konsep surat dan/atau laporan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan juga mengoptimalkan penggunaan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) sehingga mengurangi penggunaan ATK pada saat pimpinan memberikan disposisi surat.
- d. Realisasi anggaran pada program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 84,73% dapat mencapai kinerja sebesar 95,06% pada IKSP Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan. Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja tersebut, didapat nilai efisiensi sebesar 89,13%. Realisasi anggaran pada program Dukungan Manajemen sebesar 86,26% dapat mencapai kinerja sebesar 102,37% pada IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif, sehingga nilai efisiensi yang didapat adalah sebesar 84,26%. Dari nilai efisiensi tersebut, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan cukup efektif dan efisien dalam mencapai outcome tahun 2022.

4.5 ANALISIS DAMPAK DAN MANFAAT

Dalam rangka mendukung ketercapaian Sasaran Strategis Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengampu 2 program yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen; dan (2) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kinerja *output/outcome* yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022 dapat memberikan manfaat yang besar bagi para *stakeholder* yaitu sebagai berikut:



- a. Penyaluran program bantuan pembiayaan perumahan yang dilakukan dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Capaian program bantuan pembiayaan perumahan tahun 2022 sebanyak 307.683 unit telah berkontribusi sebesar 27,53% terhadap pencapaian Program Sejuta Rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2022 sebanyak 1.117.491 unit.
- b. Skema KPBU memberikan manfaat: (1) Sebagai salah satu creative financing untuk mencukupi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta; (2) Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu; (3) Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur; dan (4) Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Melalui pelaksanaan KPBU di tahun 2022 dengan capaian investasi sebesar Rp220.217.466.483.000 DJPI telah berkontribusi mengurangi *funding gap* kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR TA. 2020-2024 sebesar **15,35%** dari total *funding gap* Rp1.435 Triliun.

4.6 ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tentunya tidak terlepas dari dukungan dari seluruh *stakeholders* baik dari pihak internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaaan Umum dan Perumahan, Unit Organisasi teknis di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, maupun pihak eksternal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, serta Pemerintah Daerah. Selain itu, komitmen dan tekad yang kuat dalam diri



insan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan turut memberikan kontribusi yang tinggi dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaaan Umum dan Perumahan tahun 2022 antara lain:

- a. Terjalinnya kerjasama yang baik dengan para stakeholder dalam pemenuhan dokumen readiness criteria proyek KPBU infrastruktur PUPR;
- b. Percepatan penyiapan dokumen FS pada semua proyek KPBU; dan
- c. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dengan para pihak dalam ekosistem investasi bidang PUPR (dalam dan luar negeri), khususnya terkait dengan pembiayaan alternatif atau kreatif lainnya.

Dalam proses pencapaian target kinerja, DJPI turut berkontribusi terhadap pencapaian kinerja SS-3 yaitu Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau yang diperoleh dari kinerja KPR FLPP, BP2BT, SMF, dan Tapera. Dari keempat program bantuan pembiayaan perumahan tersebut, hanya KPR Tapera yang tidak mencapai target. Hal ini karena:

- a. Anggota peserta Tapera saat ini hanya berasal dari PNS eks anggota Bapertarum PNS dan yang melakukan registrasi ulang hanya sebesar 29,5% (yang berhak mendapatkan bantuan Tapera). Dari peserta yang telah melakukan registrasi ulang tersebut, sebagian besar berpenghasilan di atas Rp8 Juta (non MBR), sebagian lainnya sudah mendapatkan kredit multiguna dari bank lain khususnya BPD sehingga mempunyai Repayment Capacity yang rendah untuk mengangsur KPR atau memperbaiki rumah.
- b. Dana kelolaan Tapera yang ada saat ini semuanya berasal dari dana eks Bapertarum PNS, dimana pemanfaatannya selain untuk



penyaluran KPR juga untuk pemupukan dana dan sebagian disimpan untuk dana cadangan. Dana untuk penyaluran KPR yang tersedia hanya sebesar Rp 2,96 Triliun (maksimal membiayai KPR sebanyak 22.855 Unit), jauh lebih rendah dari target Renstra sebanyak 100.000 unit (membutuhkan anggaran sebanyak Rp11,34 Triliun).

4.7 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

4.7.1 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP sebagai satu sistem pengendalian pemerintah, memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Pada akhirnya, dengan adanya SPIP tersebut, diharapkan dapat menciptakan kondisi adanya budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Unsur SPIP mengacu pada konsep Sistem Pengendalian Intern yang dikemukakan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commision (COSO) ERM – Integrated Framework*, yaitu meliputi:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pemantauan Berkelanjutan



Kegiatan Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan meliputi:

a. Komponen Penilaian

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen:

- 1) Penetapan Tujuan, yang meliputi penilaian kualitas strategi pencapaian sasaran strategis;
- 2) Struktur dan proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian;
- 3) Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, yang meliputi capaian *output* efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan.

b. Obyek Penilaian

Obyek Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dilakukan pada Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

c. Periode penilaian

Periode penilaian penyelenggaraan SPIP mulai dari Juli 2021 sampai dengan Juni 2022.

Dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021/2022 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level **Terkelola dan Terukur** atau tingkat 4 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap komponen Struktur dan Proses penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP pada **level 4** sebesar "**4,19**" dengan rincian nilai yang dapat dilihat pada Tabel 4.54.



Tabel 4.54 Hasil Penilaian SPIP

Rualitas Program (Outcome) Unit Kerja Eselon I	No.	Unsur dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
Kualitas Program (Outcome) Unit Kerja Eselon I	PENE				
Sub Jumlah Perencanaan 100%				100%	
Sub Jumlah Perencanaan					
STRUKTUR DAN PROSES 1	_				
1.1 Lingkungan Pengendalian 30% 1.1 Penegakkan Integritas dan Nilai Etika 4,72 1.2 Komitmen Terhadap Kompetensi 5 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 4,82 1.4 Pembentukan Struktur Organisasi yang 5 Sesuai dengan Kebutuhan 5 1.5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 4 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 4 1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait 2 2 Penilaian Risiko 20% 2.1 Identifikasi Risiko 4 2.1 Identifikasi Risiko 3,72 3 Kegiatan Pengendalian 25% 3.1 Riviu atas Kinerja Pemerintah 5 3.2 Pendialisa Risiko 3,72 3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 5 3.2 Penginan atas Pengelolaan Sistem Informasi 3 3.4 Pengendalian Fisik atas Aset 5<	STRU				
1.1 Penegakkan Integritas dan Nilai Etika 4,72 1.2 Komitmen Terhadap Kompetensi 5 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 4,82 1.4 Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan 5 1.5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat 4 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 4 1.7 Perwjudan Perena APIP yang Efektif 4 1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait 2 2 Penilaian Risiko 20% 2.1 Identifikasi Risiko 4 2.2 Analisis Risiko 4 3.1 Riviu atas Kinerja Pemerintah 5 3.2 Pembianan Sumber Daya Manusia 5 3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 3 3.4 Pengendalian Fisik atas Aset 5 3.5 Penetapan dan Riviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja 4 3.6 Pemisahan Fungsi 5 3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 5 <td></td> <td></td> <td>30%</td> <td></td> <td></td>			30%		
1.2 Komitmen Terhadap Kompetensi 5 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 4,82 1.4 Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan 5 1.5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat 4 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 4 1.7 Perwijudan Peran APIP yang Efektif 4 1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait 3 2 Penilaian Risiko 20% 2.1 Identifikasi Risiko 4 2.2 Analisis Risiko 4 3.1 Riviu atas Kinerja Pemerintah 5 3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia 5 3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 3 3.4 Pengendalian Fisik atas Aset 5 3.5 Penetapan dan Riviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja 4 3.6 Pemisahan Fungsi 5 3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 5 3.8 Pencatatan yang akurat dan Tepat Waktu atas transaksi dan Kejad	1.1			4.72	
1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 4,82 1.4 Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan 5 1.5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat 4 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 4 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 4 1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait 20% 2.1 Identifikasi Risiko 20% 2.1 Identifikasi Risiko 3,72 3 Kegiatan Pengendalian 25% 3.1 Riviu atas Kinerja Pemerintah 5 3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia 5 3.3 Pengendalian Fisik atas Aset 5 3.4 Pengendalian Fisik atas Aset 5 3.5 Penetapan dan Riviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja 4 3.6 Pemisahan Fungsi 5 3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 5 3.8 Pencatatan yang akurat dan Tepat Waktu atas transaksi dan Kejadian Pencatatannya 5 3.9 Pembatasan Ak					
1.4 Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan 1.5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait 2 Penilaian Risiko 2.1 Identifikasi Risiko 3.1 Riviu atas Kinerja Pemerintah 3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia 3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 3.4 Pengendalian Fisik atas Aset 3.5 Penetapan dan Riviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja 3.6 Pemisahan Fungsi 3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 3.8 Pencatatan yang akurat dan Tepat Waktu atas transaksi dan Kejadian 3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya Manusia 3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya 3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 4 Informasi dan Komunikasi 4.1 Informasi yang Relefan 4.2 Komunikasi yang Relefan 5.1 Pemantauan 5.2 Evaluasi Terpisah 5.3 Sub Jumlah Struktur dan Proses 7 Dokumentasi Perpisah 7 Sub Jumlah Struktur dan Proses 8 Pencapaian Outcome 108% A					
1.5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait 2 Penilaian Risiko 20% 2.1 Identifikasi Risiko 4 2.2 Analisis Risiko 5 3.1 Riviu atas Kinerja Pemerintah 5 3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia 5 3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 3 3.4 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 3 3.5 Penetapan dan Riviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja 9 3.6 Pemisahan Fungsi 5 3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 5 3.8 Pencatatan yang akurat dan Tepat Waktu atas transaksi dan Kejadian 9 3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya Manusia 5 3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 5 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 4 4 Informasi dan Komunikasi 10% 4.1 Informasi yang Relefan 3,71 4.2 Komunikasi yang Efektif 4 5 Pemantauan 15% 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 4 5.2 Evaluasi Terpisah 3,5 5 Sub Jumlah Struktur dan Proses 108% A Capaian Output 99% B		Pembentukan Struktur Organisasi yang			
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab			
1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait 2 Penilaian Risiko 20% 2.1 Identifikasi Risiko 3,72 3 Kegiatan Pengendalian 25% 3.1 Riviu atas Kinerja Pemerintah 5 3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia 5 3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 3 3.4 Pengendalian Fisik atas Aset 5 3.5 Penetapan dan Riviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja 5 3.6 Pemisahan Fungsi 5 3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 5 3.8 Pencatatan yang akurat dan Tepat Waktu atas transaksi dan Kejadian 5 3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya Manusia 5 3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 5 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 4 Informasi dan Komunikasi 10% 4.1 Informasi yang Relefan 3,71 4.2 Komunikasi yang Relefan 3,71 4.2 Komunikasi yang Efektif 4 5 Pemantauan 15% 5 Pemotapalan Struktur dan Proses 30% 4,19 PENCAPAIAN TUJUAN SPIP 6 25% 3,72	1.6			4	
Pemerintah Terkait	1.7			4	
2 Penilaian Risiko 20% 2.1 Identifikasi Risiko 4 2.2 Analisis Risiko 3,72 3 Kegiatan Pengendalian 25% 3.1 Riviu atas Kinerja Pemerintah 5 3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia 5 3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 3 3.4 Pengendalian Fisik atas Aset 5 3.5 Penetapan dan Riviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja 4 3.6 Pemisahan Fungsi 5 3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 5 3.8 Pencatatan yang akurat dan Tepat Waktu atas transaksi dan Kejadian Kejadian Kejadian Sumber Daya Manusia 5 3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya Manusia 5 3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 5 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 4 4 Informasi dan Komunikasi 10% 4.1 Informasi yang Relefan 3,71 4.2 Komunikasi yang Efektif 4 <	1.8			3	
2.1 Identifikasi Risiko 3,72 2.2 Analisis Risiko 3,72 3 Kegiatan Pengendalian 25% 3.1 Riviu atas Kinerja Pemerintah 5 3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia 5 3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 3 3.3 Pengendalian Fisik atas Aset 5 3.5 Penetapan dan Riviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja 4 3.6 Pemisahan Fungsi 5 3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 5 3.8 Pencatatan yang akurat dan Tepat Waktu atas transaksi dan Kejadian 5 3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya Manusia 5 3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 5 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 4 4 Informasi dan Komunikasi 10% 4.1 Informasi yang Relefan 3,71 4.2 Komunikasi yang Efektif 4 5 Pemantauan Berkelanjutan 4 5.1	2		20%		
2.2 Analisis Risiko 3,72 3 Kegiatan Pengendalian 25% 3.1 Riviu atas Kinerja Pemerintah 5 3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia 5 3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 3 3.4 Pengendalian Fisik atas Aset 5 3.5 Penetapan dan Riviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja 4 3.6 Pemisahan Fungsi 5 3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 5 3.8 Pencatatan yang akurat dan Tepat Waktu atas transaksi dan Kejadian 5 3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya Manusia 5 3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 5 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 4 4 Informasi dan Komunikasi 10% 4.1 Informasi yang Relefan 3,71 4.2 Komunikasi yang Efektif 4 5 Pemantauan 15% 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 4 5.2 Evaluasi Terpisah 3,5 Sub Jumlah Struktur dan				4	
3 Kegiatan Pengendalian 25% 3.1 Riviu atas Kinerja Pemerintah 5 3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia 5 3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 3 3.4 Pengendalian Fisik atas Aset 5 3.5 Penetapan dan Riviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja 4 3.6 Pemisahan Fungsi 5 3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 5 3.8 Pencatatan yang akurat dan Tepat Waktu atas transaksi dan Kejadian 5 3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya Manusia 5 3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 5 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 4 4 Informasi dan Komunikasi 10% 4.1 Informasi yang Relefan 3,71 4.2 Komunikasi yang Efektif 4 5 Pemantauan 15% 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 4 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 3,5 5 <td>2.2</td> <td>Analisis Risiko</td> <td></td> <td>3,72</td> <td></td>	2.2	Analisis Risiko		3,72	
3.1 Riviu atas Kinerja Pemerintah 3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia 3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 3.4 Pengendalian Fisik atas Aset 3.5 Penetapan dan Riviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja 3.6 Pemisahan Fungsi 3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 3.8 Pencatatan yang akurat dan Tepat Waktu atas transaksi dan Kejadian 3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya Manusia 3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 4 Informasi dan Komunikasi 4.1 Informasi yang Relefan 4.2 Komunikasi yang Efektif 5 Pemantauan Berkelanjutan 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 5.2 Evaluasi Terpisah 5 Sub Jumlah Struktur dan Proses 6 Capaian Outcome 7 108% A 7 Capaian Outcome 7 108% A	3		25%	,	
3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia 3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 3.4 Pengendalian Fisik atas Aset 3.5 Penetapan dan Riviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja 3.6 Pemisahan Fungsi 3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 3.8 Pencatatan yang akurat dan Tepat Waktu atas transaksi dan Kejadian 3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya Manusia 3.0 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 4 Informasi dan Komunikasi 4.1 Informasi yang Relefan 4.2 Komunikasi yang Efektif 5 Pemantauan 5.1 Pemantauan 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 5.2 Evaluasi Terpisah 5 Sub Jumlah Struktur dan Proses 6 Capaian Outcome 7 108% A	3.1			5	
3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 3.4 Pengendalian Fisik atas Aset 3.5 Penetapan dan Riviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja 3.6 Pemisahan Fungsi 3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 3.8 Pencatatan yang akurat dan Tepat Waktu atas transaksi dan Kejadian 3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya Manusia 3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 4 Informasi dan Komunikasi 4.1 Informasi yang Relefan 4.2 Komunikasi yang Efektif 5 Pemantauan 5 Informasi yang Berkelanjutan 5 Pemantauan Berkelanjutan 5 Informasi Terpisah	3.2				
3.4 Pengendalian Fisik atas Aset 3.5 Penetapan dan Riviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja 3.6 Pemisahan Fungsi 3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 3.8 Pencatatan yang akurat dan Tepat Waktu atas transaksi dan Kejadian 3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya Manusia 3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 4 Informasi dan Komunikasi 4.1 Informasi yang Relefan 4.2 Komunikasi yang Efektif 5 Pemantauan 5 Informasi yang Berkelanjutan 5 Pemantauan Berkelanjutan 5 Informasi dan Komunikasi 5 Informasi yang Relefan 4.2 Komunikasi yang Efektif 5 Pemantauan 5 Informasi yang Berkelanjutan					
3.5 Penetapan dan Riviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja 3.6 Pemisahan Fungsi 3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 3.8 Pencatatan yang akurat dan Tepat Waktu atas transaksi dan Kejadian 3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya Manusia 3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 4 Informasi dan Komunikasi 4.1 Informasi yang Relefan 4.2 Komunikasi yang Efektif 5 Pemantauan 5 15% 5 1 Pemantauan Berkelanjutan 5 2 Evaluasi Terpisah 5 3,5 5 30% 4,19 PENCAPAIAN TUJUAN SPIP Capaian Outcome 108% A Capaian Output					
3.6 Pemisahan Fungsi 3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 3.8 Pencatatan yang akurat dan Tepat Waktu atas transaksi dan Kejadian 3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya Manusia 3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 4 Informasi dan Komunikasi 4.1 Informasi yang Relefan 4.2 Komunikasi yang Efektif 5 Pemantauan 5 15% 5 1 Pemantauan Berkelanjutan 5 2 Evaluasi Terpisah 5 3,5 Sub Jumlah Struktur dan Proses 6 2 30% 7 108% 8 A Capaian Outcome 108% A 299% B		Penetapan dan Riviu atas Indikator dan Ukuran		4	
3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 3.8 Pencatatan yang akurat dan Tepat Waktu atas transaksi dan Kejadian 3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya Manusia 3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 4 Informasi dan Komunikasi 4.1 Informasi yang Relefan 4.2 Komunikasi yang Efektif 5 Pemantauan 5 15% 5 Pemantauan Berkelanjutan 5 2 Evaluasi Terpisah 5 3,5 Sub Jumlah Struktur dan Proses 6 2 30% 7 2 30% 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	3.6			5	
3.8 Pencatatan yang akurat dan Tepat Waktu atas transaksi dan Kejadian 3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya Manusia 3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 4 Informasi dan Komunikasi 4.1 Informasi yang Relefan 4.2 Komunikasi yang Efektif 5 Pemantauan 5 Pemantauan 5 15% 5 1 Pemantauan Berkelanjutan 5 2 Evaluasi Terpisah 5 3,5 5 30% 5 4,19 PENCAPAIAN TUJUAN SPIP Capaian Outcome Capaian Output 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang			
3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya Manusia 3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 4 Informasi dan Komunikasi 4.1 Informasi yang Relefan 4.2 Komunikasi yang Efektif 5 Pemantauan 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 5.2 Evaluasi Terpisah 5.3 Sub Jumlah Struktur dan Proses 7 Sub Jumlah Struktur dan Proses 8 Sub Jumlah Struktur dan Proses 9 Sub Jumlah Struktur dan Proses 7 Capaian Outcome 8 Capaian Output 9 99% 8 B	3.8	Pencatatan yang akurat dan Tepat Waktu atas		5	
3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 4 Informasi dan Komunikasi 4.1 Informasi yang Relefan 4.2 Komunikasi yang Efektif 5 Pemantauan 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 5.2 Evaluasi Terpisah 5 Sub Jumlah Struktur dan Proses Capaian Outcome Capaian Output 5 Daya dan 5 10% 4 10% 4 10% 5	3.9			5	
3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 4 Informasi dan Komunikasi 10% 4.1 Informasi yang Relefan 3,71 4.2 Komunikasi yang Efektif 5 Pemantauan 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 5.2 Evaluasi Terpisah 5.2 Evaluasi Terpisah 5.3 Sub Jumlah Struktur dan Proses 7 Sub Jumlah Struktur dan Proses 8 Sub Jumlah Struktur dan Proses 9 Sub Jumlah Struktur dan Proses 7 Capaian Outcome 8 Capaian Output 9 99% 8 B		Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan			
4 Informasi dan Komunikasi 10% 4.1 Informasi yang Relefan 3,71 4.2 Komunikasi yang Efektif 4 5 Pemantauan 15% 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 4 5.2 Evaluasi Terpisah 3,5 Sub Jumlah Struktur dan Proses 30% 4,19 PENCAPAIAN TUJUAN SPIP Capaian Outcome 108% A Capaian Output 99% B	3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi		4	
4.1 Informasi yang Relefan 3,71 4.2 Komunikasi yang Efektif 4 5 Pemantauan 15% 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 4 5.2 Evaluasi Terpisah 3,5 Sub Jumlah Struktur dan Proses 30% 4,19 PENCAPAIAN TUJUAN SPIP Capaian Outcome 108% A Capaian Output 99% B	4		10%		
4.2 Komunikasi yang Efektif 4 5 Pemantauan 15% 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 4 5.2 Evaluasi Terpisah 3,5 Sub Jumlah Struktur dan Proses 30% 4,19 PENCAPAIAN TUJUAN SPIP Capaian Outcome 108% A Capaian Output 99% B			- / -	3,71	
5 Pemantauan 15% 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 4 5.2 Evaluasi Terpisah 3,5 Sub Jumlah Struktur dan Proses 30% 4,19 PENCAPAIAN TUJUAN SPIP Capaian Outcome 108% A Capaian Output 99% B					
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 5.2 Evaluasi Terpisah Sub Jumlah Struktur dan Proses PENCAPAIAN TUJUAN SPIP Capaian Outcome Capaian Output			15%	•	
5.2 Evaluasi Terpisah 3,5 Sub Jumlah Struktur dan Proses 30% 4,19 PENCAPAIAN TUJUAN SPIP Capaian Outcome 108% A Capaian Output 99% B				4	
Sub Jumlah Struktur dan Proses 30% 4,19 PENCAPAIAN TUJUAN SPIP Capaian Outcome 108% A Capaian Output 99% B					
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP Capaian Outcome 108% A Capaian Output 99% B			30%		
Capaian Outcome108%ACapaian Output99%B	PENC			.,	
Capaian Output 99% B				108%	Α
		-			
		Sub Jumlah Pencapaian Tujuan SPIP	30%		



Dengan tingkat maturitas "terkelola dan terukur", memiliki karakteristik penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik. Namun, belum memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada belum dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rangka meningkatkan nilai terhadap Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan anggaran dan jumlah SDM untuk kegiatan pengelolaan risiko *fraud*/kecurangan;
- Peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai dengan cakupan seluruh pegawai;
- Membuat kebijakan dan melakukan evaluasi atas pengelolaan risiko terkait kemitraan dan penerapannya telah terintegrasi dengan proses bisnis Instansi Pemerintah;
- d. Melaksanakan tindak pengendalian risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja yang belum dilaksanakan;
- e. Melakukan evaluasi atas kebijakan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi organisasi;
- f. Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti klasifikasi informasi produk, standar, prosedur layanan/pelaksanaan tugas fungsi pengaduan, informasi layanan internal, dan informasi manajemen kinerja; dan
- g. Melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap Area of Improvement tersebut di atas dengan melibatkan seluruh unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.



4.7.2 Pencanangan Zona Integritas

Pencanangan Zona Integritas merupakan tahap awal dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, dimana kesiapan unit kerja dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui upaya tindakan reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencanangan Zona Integritas ditandai dengan penandatangan pakta Integritas.

Pada tanggal 26 Oktober 2022 telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas, Pakta Integritas antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, serta penandatanganan Deklarasi Bersama Pengendalian Gratifikasi antara Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Consumer Bank BTN.



Gambar 4.22 Deklarasi Bersama Pengendalian Gratifikasi



Gambar 4.23 Pakta Integritas Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan



Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian, pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.



Gambar 4.24 Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan merupakan salah satu unit kerja tingkat eselon 2 di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang telah melakukan langkah dan upaya untuk melaksankan pembangunan Zona Integritas di tahun 2022 ini. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2023 diharapkan agar dapat diajukan penilaian Pembangunan Zona Integritas ke tingkat Kementerian PUPR dan Tingkat Nasional dan dapat lolos penilaian dan mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta menjadi *pilot project* dan *benchmarking* bagi unit kerja lainnya. Secara umum pelaksanaan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berjalan dengan lancar.





Gambar 4.25 Dokumentasi Pelaksanaan Pelaksanaan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

4.7.3 Penyelenggaraan Kegiatan CreatIFF 2022

Pada tahun 2022 DJPI sukses menyelenggarakan kegiatan CreatIFF (*Creative Infrastructure Financing*/Pembiayaan Infrastruktur Kreatif) Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi pembangunan infrastruktur PUPR yang berkelanjutan dan inklusif melalui pembiayaan kreatif sekaligus dalam rangka partisipasi pada Hari Bakti PU ke 77.



Selain itu, penyelenggaraan kegiatan ini juga sebagai sarana untuk:

- Memperkenalkan pembiayaan kreatif sebagai alternatif pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur bidang PUPR;
- b. Meningkatkan partisipasi para *stakeholder* dalam pembiayaan infrastruktur PUPR dan perumahan; dan
- c. Menyebarluaskan tusi DJPI sebagai salah satu unit organisasi di Kementerian PUPR yang menangani bidang pembiayaan infrastruktur dan perumahan dengan pembiayaan kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tema yang diangkat dalam kegiatan CreaTIFF ini adalah "Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan", didasari oleh tantangan pembangunan infrastruktur kedepan yang akan semakin berat, diantaranya: funding gap, isu backlog pembiayaan perumahan, dan target global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) dan the Paris Agreement, yang menargetkan penurunan emisi karbon dan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan isu-isu tersebut, pembiayaan berkelanjutan merupakan solusi dalam menjawab tantangan masa kini dan masa depan.

Kegiatan CreaTIFF terdiri dari rangkaian kegiatan berikut, yaitu:

- a. Forum Wartawan (*Press Conference*)
- b. Webinar Series Road to CreatIFF 2022 yang diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Oktober hingga November 2022. Tiap Webinar mengulas inovasi pembiayaan infrastruktur bidang PUPR, yang mencakup inovasi pada bidang Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Permukiman, dan Perumahan.
- c. Kompetisi *Call for Policy Brief* untuk menjaring gagasan dari insan PUPR dan juga pihak eksternal untuk memperkaya inovasi pembiayaan infrastruktur bidang PUPR.



- d. Hari Puncak CreatIFF dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan yaitu:
 - 1) Sambutan Menteri PUPR;
 - Soft-Launching Sistem Informasi Proyek KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha (SIPRABU);
 - 3) Soft-Launching Sistem Informasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan Proyek KPBU (SIPADU);
 - 4) Penandatanganan Cooperation Framework Agreement on the Variable Capital Company for Infrastructure Investment Projects in Indonesia dengan CRCCII (CRCC International Investment Co., Ltd);
 - 5) Penyerahan simbolis kepada MBR Informal (Pedagang Pasar dan Mitra Gojek) penerima BP2BT serta penyerahan piagam pengahargaan kepada IKAPPI dan Gojek; dan
 - 6) Investor Dialog yaitu forum diskusi antara Pemerintah dengan para pemangku kepentingan seperti investor dan lenders. bertujuan untuk menjaring masukan dari para pelaku pembiayaan alternatif infrastruktur PUPR terkait peluang dan hambatan investasi infrastruktrur PUPR di Indonesia.

Kesuksesan kegiatan CreatIFF ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak yaitu insan Kementerian PUPR, Kementerian/Lembaga lain, Perbankan, Badan Usaha, Lembaga Internasional, Pemerintah Daerah, Asosiasi, insan Media, serta para sponsor.





Gambar 4.26 Dokumentasi Pelaksanaan *Press Conference Road to* CreatIFF 2022



Gambar 4.27 Penyerahan Hadiah Pemenang *Call for Policy Brief* CreatIFF 2022





Gambar 4.28 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan *Webinar Series*CreatIFF 2022





Gambar 4.29 Dokumentasi Pelaksanaan Hari Puncak CreatIFF 2022

4.7.4 *Soft-Launching* Sistem Informasi Proyek KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha (SIPRABU) dan Sistem Informasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan Proyek KPBU (SIPADU)

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan meluncurkan 2 (dua) sistem/inovasi pembiayaan infrastruktur baru, yaitu Sistem Informasi Proyek KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha (SIPRABU) dan Sistem Informasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan Proyek KPBU (SIPADU). Peluncuran kedua sistem pembiayaan infrastruktur ini dilakukan oleh Menteri PUPR pada



Hari Puncak *Creative Infrastructure Financing Day* (CreatIFF) 2022 pada tanggal 01 Desember 2022 dalam rangka partisipasi pada Hari Bakti PU ke 77.

SIPRABU adalah inovasi untuk memudahkan setiap badan usaha dalam melakukan pengusulan proyek KPBU secara transparan dan kredibel. Layanan ini bisa diakses melalui tautan https://siprabu.pu.go.id/.

Sedangkan SIPADU adalah inovasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU bidang PUPR serta meningkatkan kualitas pengadaan. Adapun SIPADU dikembangkan dengan mengacu kepada Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 dan Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018. SIPADU dapat diakses melalui tautan https://pembiayaan.pu.go.id/sipadu/.

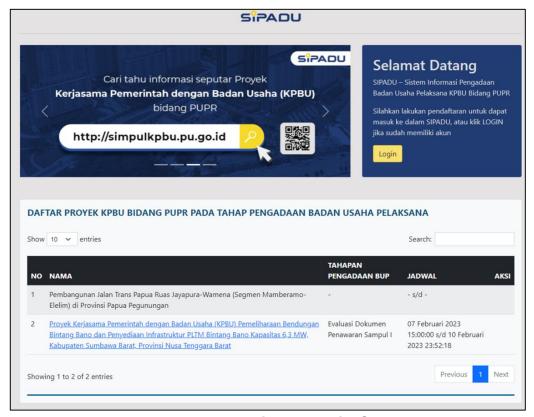


Gambar 4.30 Soft Launching SIPADU dan SIPRABU





Gambar 4.31 Tampilan Website SIPRABU



Gambar 4.32 Tampilan Website SIPADU

BAB 5 PENUTUP



BAB 5 PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Laporan Kinerja ini berisi akuntabilitas kinerja yang merupakan capaian Indikator Kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, analisis pencapaian tahun 2022, analisis keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja, permasalahan atau kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah kebijakan penanganan serta rekomendasi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Berdasarkan hasil analisis akuntabilitas kinerja, dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2022 berhasil mencapai target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif dengan capaian 107,57%, dan pada Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif dengan capaian 102,37%. Keberhasilan capaian ini didukung oleh:

 Adanya kerjasama yang baik dengan para stakeholders dalam pemenuhan dokumen readiness criteria pada proyek KPBU infrastruktur PUPR;



- 2. Adanya percepatan penyiapan dokumen *Feasibility Study*/FS pada semua proyek KPBU; dan
- 3. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dengan para pihak dalam ekosistem investasi bidang PUPR (dalam dan luar negeri), khususnya terkait dengan pembiayaan alternatif atau kreatif lainnya.

Namun, untuk Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dengan capaian pada Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 95,06%. Pencapaian kinerja pada IKSP ini berasal dari kinerja KPR FLPP, BP2BT, SMF, dan Tapera. Namun, dari keempat program tersebut, hanya KPR Tapera yang tidak mencapai target. Hal ini karena:

- 1. Anggota peserta Tapera saat ini hanya berasal dari PNS eks anggota Bapertarum PNS dan yang melakukan registrasi ulang hanya sebesar 29,5% (yang berhak mendapatkan bantuan Tapera). Dari peserta yang telah melakukan registrasi ulang tersebut, sebagian besar berpenghasilan di atas Rp8 Juta (non MBR), sebagian lainnya sudah mendapatkan kredit multiguna dari bank lain khususnya BPD sehingga mempunyai Repayment Capacity yang rendah untuk mengangsur KPR atau memperbaiki rumah.
- 2. Dana kelolaan Tapera yang ada saat ini semuanya berasal dari dana eks Bapertarum PNS, dimana pemanfaatannya selain untuk penyaluran KPR juga untuk pemupukan dana dan sebagian disimpan untuk dana cadangan. Dana untuk penyaluran KPR yang tersedia hanya sebesar Rp 2,96 Triliun (maksimal membiayai KPR sebanyak 22.855 Unit), jauh lebih rendah dari target Renstra sebanyak 100.000 unit (membutuhkan anggaran sebanyak Rp11,34 Triliun).



5.2 **REKOMENDASI**

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala dan tantangan terhadap pencapaian kinerja tahun 2022 serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melaksanakan pelelangan Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka tertib penatausahaan aset BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- 2. Menyusun Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pegawai.
- Melakukan evaluasi dalam penataan organisasi/kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi.
- 4. Melaksanakan sosialisasi PermenPAN-RB No. 44 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- 5. Menyusun pedoman pengelolaan manajemen risiko proyek infrastruktur KPBU PUPR;
- Melakukan legalisasi Rencana Umum proyek KPBU bidang PUPR periode 2022-2024;
- 7. Penguatan koordinasi dengan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam pemanfaatan serta pengembangan Dashboard Simpul KPBU sebagai *monitoring tools* proyek KPBU bidang PUPR.
- 8. Melakukan pengembangan *Dashboard* Simpul KPBU dengan menyajikan hasil analisis *Input-Output* (I-O) untuk mengukur dampak ekonomi dari pembangunan proyek infrastruktur.



- 9. Melakukan revitalisasi atau pengembangan lanjutan Sistem Informasi Registrasi Pengembang (SIRENG) sebagai persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen Asosisasi Pengembang Perumahan dan Badan Usaha Pengembang Perumahan.
- 10. Pembaharuan data yang sudah tersedia di laman (Website) HREIS, terdiri dari data Susenas Badan Pusat Statistik (BPS), data Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data realisasi subsidi bantuan perumahan, dan beberapa data pendukung lainnya, serta Pengembangan data Housing Queue Monitoring System.
- 11. Mendorong pelaksanaan proyek KPBU *unsolicited* guna mempercepat penyiapan proyek serta mengurangi biaya Pemerintah (Kementerian PUPR) dalam menyusun dokumen penyiapan proyek.
- 12. Pengajuan PDF kepada Kementerian Keuangan dalam rangka percepatan proyek KPBU.
- 13. Melakukan kolaborasi riset dengan akademisi terkait skema pembiayaan alternatif khususnya KPBU, pada proyek sejenis yang telah selesai sehingga dapat merumuskan skema pembiayaan kreatif dan inovatif dengan tetap memperhatikan aspek kelembagaan Indonesia.
- 14. Melakukan pengembangan fitur integrasi antara FLPP dan SBUM oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan bersama dengan BP Tapera, sehingga ketika dana FLPP cair, terdapat notifikasi ke aplikasi SISIBUM.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran sekaligus informasi kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan secara komprehensif kepada pihak-pihak terkait, serta sebagai masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022.





REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Herry Trisaputra Zuna

Jabatan

: Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: M. Basuki Hadimuljono

Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, 30 Desember 2022

Pihak Pertama

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

REVISI

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM		TARGET
PRO	(1) OGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		(2)
SP	Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman		
1.	Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan		100,00%
PRO	GRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
SP	Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		
1.	Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif		100,00%
Prog	gram:		Anggaran
1.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	4.082.440.801.000,00
	-BA. 033	Rp	564.732.866.000,00
	-BA. 999.07	Rp	3.517.707.935.000,00
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp	227.884.308.000,00
	-BA. 033	Rp	227.884.308.000,00

Jakarta, 30 Desember 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

M. BASUKI HADIMULJONO

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022



DS:4883-2393-6051-7674

Jumlah Uang

Revisi ke 02

Tanggal: 30 Desember 2022

NOMOR: SP DIPA- 999.07.1.987252/2022

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga: (999)BENDAHARA UMUM NEGARA2. Unit Organisasi: (07)PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA

4. Kode/Nama Satker : (987252) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Sebesar : Rp. 3.517.707.935.000 (TIGA TRILIUN LIMA RATUS TUJUH BELAS MILIAR TUJUH RATUS TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi:

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11.07 BANTUAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

 999.07.11
 Program Pengelolaan Subsidi
 Rp.
 3.517.707.935.000

 999.07.11.4873
 Pengelolaan Subsidi Perumahan
 Rp.
 3.517.707.935.000

C. Sumber Dana Berasal Dari:

1. Rupiah Murni	Rp.	3.517.707.935.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA II (019) Rp. 3.517.707.935.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA BUN ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp dan ditandatangani oleh pemimpin PPA BUN.
- 2. DIPA BUN berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 3. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam halaman III DIPA BUN diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 4. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA BUN dengan database RKAKL/DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat didalam database RKAKL DIPA Kementerian Keuangan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA BUN sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. KPA BUN wajib menyampaikan lap. keuangan kepada Sekjen/Sektama/Sekban/Pejabat yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan, yang selanjutnya disampaikan kepada pemimpin PPA BUN atau koordinator penyusunan lap. pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN.
- 7. DIPA BUN berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 27 Desember 2021 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR: DIPA-999.07.1.987252/2022





Halaman: IA. 1

2.584.031.935.000

Kementerian Negara/Lembaga: (999) BENDAHARA UMUM NEGARA Unit Organisasi : (07) PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

: (987252) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Kode/Nama Satker

Subsidi Bunga Kredit Perumahan

9FB.002

Program : 999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		3.517.707.935.000
Kegiatan : 4873	Pengelolaan Subsidi Perumahan		3.517.707.935.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 1. 01	Persentase Subsidi Bunga Kredit Perumahan yang dibayarkan		
2. 02	Persentase Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan yang dibayarkan		
Klasifikasi Rincian Output 1 . 4873.9FB	Subsidi Kredit Program	995.903.00 Debitur/Unit/ Penyalur/Penjamin	3.517.707.935.000
Klasilikasi Kirician Output 1 4073.9FB	Subsidi Kredit Program	995.903,00 Debitui/Onit/ Penyatui/Penjamin	3.517.707.935.000
Rincian Output : 01 9F	.001 Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	226000.00 Unit	933.676.000.000

769903.00 Unit

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR: DIPA-999.07.1.987252/2022



DS:4883-2393-6051-7674

Halaman: IB. 1

IB. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA

Unit Organisasi : (07) PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (987252) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	3.517.707.935.000	Ket:	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	3.517.707.935.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		(dalam ribuan ru

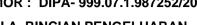
No.	1. Pinjama 2. Hibah L 3. Pinjama	ER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register an Luar Negeri Luar Negeri an Dalam Negeri Dalam Negeri	2) Ekuival	en USD en Rupiah	1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -	RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING	(datain inscarring president)
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H: Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA **TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR: DIPA-999.07.1.987252/2022





Kementerian Negara/Lembaga : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA Unit Organisasi : (07) PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

: (01) DKI JAKARTA Provinsi

Kode/Nama Satker : (987252) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kewenangan	: (KP)	Halaman : II	A. 1
KODE	URAIAN SATKER / PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / LOKASI / JENIS BELANJA / SUMBER DANA / KPPN	JUMLAH	@
1	2	3	4
987252	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	3.517.707.935.000	
55	BELANJA SUBSIDI	3.517.707.935.000	
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	3.517.707.935.000	
55	BELANJA SUBSIDI	3.517.707.935.000	
4873	Pengelolaan Subsidi Perumahan	3.517.707.935.000	
55	BELANJA SUBSIDI	3.517.707.935.000	
4873.9FB	Subsidi Kredit Program	3.517.707.935.000	
	LOKASI: 01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT	3.517.707.935.000	
55	BELANJA SUBSIDI	3.517.707.935.000	
01	RM KPPN: 019	3.517.707.935.000	
	JUMLAH	3.517.707.935.000	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN **TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR: DIPA-999.07.1.987252/2022



II B. RINCIAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI Unit Organisasi : (07)

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (987252) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kewenangan	: (KP)	Halaman : II B. 1
KODE	URAIAN SATKER / PROGRAM / KEGIATAN / AKUN	JUMLAH
1	2	3
	JUMLAH	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR: DIPA-999.07.1.987252/2022





DS:4883-2393-6051-7674

Kementerian Negara/Lembaga : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA

Unit Organisasi : (07) PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (987252) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 1

O KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN										JUMLAH		
KODE		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	SELURUH
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
987252	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN													
	RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	103.704.000	50.444.000	32.706.000	181.641.000	605.392.000	510.808.000	410.498.000	351.954.000	602.134.000	668.426.935	3.517.707.9
999.07.11.4873	Pengelolaan Subsidi Perumahan	0	0	103.704.000	50.444.000	32.706.000	181.641.000	605.392.000	510.808.000	410.498.000	351.954.000	602.134.000	668.426.935	3.517.707.
	55 BELANJA SUBSIDI	0	0	103.704.000	50.444.000	32.706.000	181.641.000	605.392.000	510.808.000	410.498.000	351.954.000	602.134.000	668.426.935	3.517.707

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR: DIPA- 999.07.1.987252/2022

IV A. B L O K I R



DS:4883-2393-6051-7674

Kementerian Negara/Lembaga : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA

Unit Organisasi : [07] PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [987252] DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.A. 1 (dalam ribuan rupiah)

		1	(dalam nodan rupian)
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR: DIPA-999.07.1.987252/2022 IV B. C A T A T A N



DS:4883-2393-6051-7674

Kementerian Negara/Lembaga : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA

Unit Organisasi : [07] PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [987252] DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman: IV.B. 1 (dalam ribuan rupiah)

ODE	URAIAN			KODE	URAIAN	
999.07.11		AN UMUM DAN	I PERUMAHAN			
4873.9FB	Subsidi Kredit Program	Rp.	25.896.098			
552112	 Utang SBUM TA 2019 - 2020 dan TA 2021 berdasarkan LHP BPK RI Nomor 13/LHP/XVII/05/2022 	Rp.	11.676.000			
552125	Belanja Subsidi Bunga KPR * Utang SBK TA 2019 - 2020 dan TA 2021 berdasarkan LHP BPK RI Nomor 13/LHP/XVII/05/2022	Rp.	14.220.098			



DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili: (021) 7200793, (021) 7245751

NOMOR: 02 / BA / Dp / 2022

Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 bertempat di Ruang Rapat 1 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah diadakan Rapat Pembahasan Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiyaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2022, yang dihadiri oleh perwakilan dari Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiyaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Rapat ini dimaksud untuk menghasilkan Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiyaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2022 sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiyaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022

refullialiali falluli 2022			C.						
SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KINERJA						
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUK	IMAN								
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumah dan Aman	SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman								
IKSP. Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	100,00%	95,06%	95,06%						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
IKSS. Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan efisien dan efektif	100,00%	107,57%	107,57%						
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas	Teknis La	innya							
IKSP. Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00%	102,37 %	102,37%						

2. Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBU yang Siap Dikerjasamakan

		TAR	GET TA. 2022		REALISASI	
NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sumber Daya Air	2	1.203.486.000.000	5	 Bendungan Bodri Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW – NTB Daerah Irigasi Komering Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok – NTB PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji – Sumatera Selatan 	7.113.956.483.000
2.	Jalan dan Jembatan	10	187,315.000.000.000	10	1. Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena (Segmen Mamberamo – Elelim 2. Jalan Akses Exit Toll 3. Jalan Tol Cilacap – Yogyakarta 4. Jalan Tol Demak – Tuban 5. Jalan Tol Ngawi – Babat 6. Jalan Tol Jember – Lumajang 7. Jalan Tol Jember – Situbondo 8. Jalan Tol Tulungagung – Kepanjen 9. Jembatan Tanah Bumbu – Pulau Laut 10. Jembatan Muna – Buton	181.173.460.000.000
3.	Perumahan	2	1.800.000.000.000	2	KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung KPBU Rumah Susun Karawang Spuur	1.240.050.000.000
4.	Permukiman	4	5.570.000.000.000	2	 Pendampingan Transaksi SPAM Hilir DKI Jakarta (BtoB) Pendampingan SPAM Rajeg – Kabupaten Tangerang (BtoB) 	30.690.000.000.000
	TOTAL	18	195.888.486.000.000	19		220.217.466.483.000

Keterangan: Target berdasarkan Renstra DJPI 2020-2024

3. Capaian Realisasi Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

			Pagu	Realisasi	Keuangan (%)		Fisik (%)		
МО	Kode	Program/Kegiatan	(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	Kinerja (%)
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	564.732.866	478.497.376	100,00	84,73	100,00	85,33	85,33
1	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	564.732.866	478.497.376	100,00	84,73	100,00	85,33	85,33

			Pagu	Realisasi	Keuan	gan (%)		Fisik (%)	
NO	Kode	Program/Kegiatan	(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	Kinerja (%)
2	WA	Program Dukungan Manajemen	227.884.308	196.577.010	100	86,26	100	93,72	93,72
2	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	93.431.280	73.138.509	100,00	78,28	79,24	78,47	99,04
3	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	30.069.995	28.977.085	100	96,37	100	97,51	97,51
4	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	104.383.033	95.582.626	100	91,57	100	91,95	91,95
	TOTAL		792.617.174	675.074.386	100	85,17	97,55	85,81	87,97

Sumber: emonitoring.pu.go.id

4. Capaian Kinerja Bantuan Pembiayaan Perumahan

NO	BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	PAGU ANGGARAN	TARGET UNIT	REALISA	ASI	
				KEUANGAN	UNIT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	23.000.000.000.000	200.000	25.150.724.329.163	226.000	
2	Subsidi Selisih Bunga (SSA/SSB) *	2.584.031.935.000	769.903	2.570.621.611.769	757.087	
3	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)**	933.676.000.000	200.000	929.980.000.000	225.987	
4	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)	546.970.000.000	13.672	460.903.053.015	11.886	
5	SMF	-	10.000	-	65.263	
6	Tapera	-	100.000	-	4.534	
TO	TAL	27.064.677.935.000	323.672	29.112.228.993.947	307.683	

5. Capaian Kinerja Unit Kerja Eselon II

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	16,9%

Keterangan : Target berdasarkan Renstra DJPI 2020-2024

*) Subsidi Selisih Bunga untuk pembayaran penerbitan KPR tahun sebelumnya

**) Realisasi Unit SBUM tidak dimasukkan ke penjumlahan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	15%
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	17,5%
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	15%
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%	10%

b. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100%	105,25%

c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan P Infrastruktur Sumber Daya Air	embiayaan 25%	25%

d. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25%	25%

e. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25%	24,13%

f. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%	25%
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	49,35%

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiyaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2022. Atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan Terima kasih.

Jakarta, 30 Desember 2022

Yang Menyepakati,

Sekretaris Direktorat Jenderal

Sudiro Roi Santoso

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Reni Ahiantini

Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Agus Sulaeman

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Meike Kencanawulan Martawidjaja

Mengetahui, Direktur Jenderal

Herry Trisaputra Zuna

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA

Arvi Argyantoro

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Haryo Bekti Martoyoedo

HASIL EVALUASI IMPELEMENTASI SAKIP DJPI TA 2021

Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Nomor PW 0204-Lj/313 tanggal 14 Maret 2022 hal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA 2021, penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi SAKIP, maka implementasi atas SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021 dapat dikategorikan A (Memuaskan), yang menunjukkan bahwa telah memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel, dengan pencapaian nilai 80,41% dengan rincian per komponen sebagai berikut:

Penilaian Komponen Evaluasi SAKIP DJPI TA 2021

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30%	24,74%
2.	Pengukuran Kinerja	25%	20,94%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	12,78%
4.	Evaluasi Internal	10%	7,17%
5.	Capaian Kinerja	20%	14,79%
	Jumlah	100%	80,41%

Berdasarkan tabel di atas, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan perlu melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai bentuk penguatan akuntabilitas serta meningkakan kinerja organisasi di masa mendatang. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP DJPI TA. 2021 dapat dilihat pada Tabel 1, dan bukti dukung dapat diakses pada tautan https://bit.ly/TLSAKIP_DJPI.

TABEL 1. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP DJPI TA 2021

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Perencanaan Kinerja	 a. Merevisi metode perhitungan capaian kinerja untuk mewujudkan tujuan/hasil kegiatan dan sasaran dalam Renstra/ Dokumen Perencanaan Lainnya pada <i>Mid Term</i> reviu Renstra 2020-2024; b. Dalam menyusun Dokumen Rencana Kinerja tahun berikutnya agar: Selaras dengan dokumen pengajuan anggaran dan dokumen perjanjian kinerja; Indikator Kinerja pada Dokumen Perjanjian Kinerja selaras dengan Renstra DJPI. Dalam menyusun Dokumen Rencana Aksi tahun berikutnya agar: Menyajikan analisis permasalahan disertai dengan pemecahan masalah/solusi; Menyajikan rincian target dalam rencana aksi yang dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan dan otorisasi serta eksekusi atas target kinerja. Mempertimbangkan untuk menggunakan capaian target kinerja sebagai dasar untuk memberikan <i>reward</i> dengan cara berkoordinasi kepada BPSDM Kementerian PUPR. 	terkait metode perhitungan capaian kinerja untuk mewujudkan tujuan/hasil kegiatan dan sasaran dalam Renstra/Dokumen Perencanaan Lainnya pada <i>Mid Term</i> reviu Renstra 2020-2024.
2.	Pengukuran Kinerja	a. Dalam menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada	a. SKP yang disusun telah mengukur target
		tingkat Eselon III hingga staf agar memiliki target yang terukur; b. Mempertimbangkan untuk menggunakan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebagai dasar promosi atau kenaikan/penurunan peringkat dan dasar insentif atau disinsentif terkait dengan reward dengan cara berkoordinasi kepada BPSDM Kementerian PUPR.	yang terukur. b. Ketentuan reward and punishment diatur oleh level Kementerian PUPR sehingga DJPI menunggu penetapan pengaturan tersebut dapat diimplementasikan.

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
3.	Pelaporan Kinerja	 a. Dalam penyusunan Laporan Kinerja periode berikutnya agar menyajikan seluruh informasi mengenai perbandingan data kinerja tahun berjalan terhadap standar nasional atau RPJMN; b. Menindaklanjuti rekomendasi pada Laporan Kinerja dan menyajikan informasi perbaikan perencanaan pada LAKIN yang akan datang sesuai dengan rekomendasi LAKIN TA 2021. 	 a. Laporan Kinerja DJPI telah menyajikan seluruh informasi mengenai perbandingan data kinerja tahun berjalan terhadap standar nasional atau RPJMN. b. DJPI telah menindaklanjuti rekomendasi pada Laporan Kinerja dan menyajikan informasi perbaikan perencanaan pada LAKIN yang akan datang sesuai dengan rekomendasi LAKIN TA 2021.
4.	Evaluasi Internal	 a. Mengikutsertakan Tim Evaluator Internal dalam pelatihan/bimbingan teknis Evaluasi SAKIP yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR atau Kementerian PAN RB; b. Menindaklanjuti rekomendasi dan mendokumentasikan tindaklanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Eselon II dan Eselon I; c. Membuat alternatif saran perbaikan atas penilaian seluruh aksi dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi. 	 a. Pegawai DJPI telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis evaluator SAKIP sebagai berikut: Bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Biro PAKLN, Sekjen Kementerian PUPR pada tanggal 29 November – 1 Desember 2022. Workshop Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan DJPI Tahun 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2022. b. Pada Laporan Kinerja Eselon I dan Eselon II DJPI TA. 2022 telah menyajikan hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun 2021. c. Pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan dan Tahunan pada Eselon I dan Eselon II di DJPI TA 2022 telah mencantumkan alternatif saran perbaikan atas penilaian seluruh aksi/kegiatan.

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	 a. Melakukan analisis seluruh informasi perhitungan Capaian Indikator Kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan sumber data yang dapat diandalkan untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun yang akan datang: b. Mendorong terbentuknya zona wilayah bebas dari korupsi sehingga dapat tercipta kondisi bebas korupsi di lingkungan DJPI PUPR; c. Mempertimbangkan untuk menggunakan Capaian SKP sebagai dasar untuk memberikan reward dengan cara berkoordinasi kepada BPSDM Kementerian PUPR. 	

